PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DI KECAMATAN MEDAN TIMUR DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL *MODERATING*

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi

OLEH:

NAMA	**:**	**NAURAH JACINDA SYAZWANA**
NPM	**:**	**2405170245P**
PROGRAM STUDI	**:**	**AKUNTANSI**
KONSENTRASI	**:**	**AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2026, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama Lengkap : **NAURAH JACINDA SYAZWINA**
NPM : **2405170245P**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Konsentrasi : **AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK**
Judul Tugas Akhir : **PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DI KECAMATAN MEDAN TIMUR DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI PARAMETER MODERASI**

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Penguji I

Dr. HENNY ZURIKA LUBIS, S.E., M.Si.

Penguji II

LUFRIANSYAH, S.E., M.Ak.

Pembimbing

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA.

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. RADIMAN, S.E., M.Si

Assoc. Prof. Dr. HASRUDY TANJUNG, S.E., M.Si

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3. Medan. Telp. 061-6624567. Kode Pos 20238

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini disusun oleh:

Nama	: NAURAH JACINDA SYAZWANA
NPM	: 2405170245P
Program Studi	: AKUNTANSI
Konsentrasi	: AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Tugas Akhir	: PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DI KECAMATAN MEDAN TIMUR DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL *MODERATING*

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan tugas akhir.

Medan, Juli 2026

Pembimbing Tugas Akhir

(Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi **Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU**	**Dekan** **Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU**
(Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc)	**(Dr. Radiman, S.E., M.Si.)**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa	:	Naurah Jacinda Syazwana
NPM	:	2405170245P
Dosen Pembimbing	:	Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA
Program Studi	:	Akuntansi
Konsentrasi	:	Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian	:	Pengaruh Transparansi, Dan Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan di Kecamatan Medan Timur Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel *Moderating*

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	—		
Bab 2	—		
Bab 3	—		
Bab 4	pembahasan yg sudah disesuaikan lebih mendalam.	26/6 26	
Bab 5	Ketarbatasan sudah pula dibuat	26/6 26	
Daftar Pustaka	—		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	—		

Medan, Juni 2026

Diketahui Oleh:
Ketua Program Studi

(Nabilla Dwi Agintha, SE., M.SC)

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA)

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa	:	Naurah Jacinda Syazwana
NPM	:	2405170245P
Dosen Pembimbing	:	Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA
Program Studi	:	Akuntansi
Konsentrasi	:	Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian	:	Pengaruh Transparansi, Dan Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan di Kecamatan Medan Timur Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel *Moderating*

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	—		
Bab 2	—		
Bab 3	—		
Bab 4	deskripsi variabel buat dlm diagram pi. Olah data dg benar yg dibuat 0,F². dan perbaiki lagi yg salah.	9/6 26	
Bab 5	- lihat lagi salah	9/6 26	
Daftar Pustaka	pdul menelong	9/6 26	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	—		

Medan, Juni 2026

Diketahui Oleh:
Ketua Program Studi

(Nabilla Dwi Agintha, SE., M.SC)

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA)

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa	:	Naurah Jacinda Syazwana
NPM	:	2405170245P
Dosen Pembimbing	:	Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA
Program Studi	:	Akuntansi
Konsentrasi	:	Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian	:	Pengaruh Transparansi, Dan Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan di Kecamatan Medan Timur Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel *Moderating*

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	—		
Bab 2	—		
Bab 3	—		
Bab 4	—		
Bab 5	—		
Daftar Pustaka	-		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	ACC lanjut sidang meja hijau	13/6/26	

Medan, 13 Juni 2026

Diketahui Oleh:
Ketua Program Studi

(Nabilla Dwi Agintha, SE., M.SC)

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA)

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3. Medan. Telp. 061-6624567. Kode Pos 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Mahasiswa	: Naurah Jacinda Syazwana
NPM	: 2405170245P
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir saya yang berjudul "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan di Kecamatan Medan Timur Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel *Moderating*" adalah bersifat asli (original), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



NAURAH JACINDA SYAZWANA

ABSTRAK

PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DI KECAMATAN MEDAN TIMUR DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL *MODERATING*

Naurah Jacinda Syazwana
NPM: 2405170245P

Efektivitas pengelolaan dana kelurahan sebagai sumber daya publik tidak terlepas dari sejauh mana transparansi dan akuntabilitas diterapkan. Namun rendahnya keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban anggaran masih menjadi permasalahan nyata yang kerap berujung pada penyalahgunaan wewenang dan anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan serta peran pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel *moderating*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain asosiatif kausal melalui metode survei. Populasi penelitian adalah perangkat kelurahan di 11 kelurahan Kecamatan Medan Timur, dengan pengambilan sampel sebanyak 4 orang per kelurahan sehingga total responden berjumlah 44 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan pengumpulan data melalui penyebaran angket tertutup. Data kemudian diolah menggunakan SEM-PLS dengan bantuan software SmartPLS 4.1.1.6. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas masing-masing berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan. Namun pemanfaatan teknologi informasi tidak memoderasi pengaruh keduanya. Temuan ini menunjukkan pentingnya pelatihan untuk meningkatkan kompetensi aparatur kelurahan sekaligus mendorong investasi teknologi informasi guna menunjang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Transparansi.

ABSTRACT

THE EFFECT OF TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY ON THE EFFECTIVENESS OF URBAN VILLAGE FUND MANAGEMENT IN MEDAN TIMUR *SUB-DISTRICT WITH INFORMATION TECHNOLOGY UTILIZATION AS A MODERATING VARIABLE*

Naurah Jacinda Syazwana
NPM: 2405170245P

The effectiveness of village fund management as a public resource is closely tied to the extent to which transparency and accountability are upheld. In practice, however, limited information disclosure and weak budget accountability remain persistent issues, often leading to the misuse of authority and funds. This study aims to examine the influence of transparency and accountability on the effectiveness of village fund management, as well as the moderating role of information technology utilization. A quantitative approach with a causal associative design was employed through a survey method. The study population consisted of village apparatus across 11 villages in Medan Timur District, with four respondents selected from each village, yielding a total sample of 44 participants. Sampling was conducted using purposive sampling, and data were collected through a closed-ended questionnaire. The data were subsequently analyzed using PLS-SEM with the aid of SmartPLS 4.1.1.6. The findings indicate that transparency and accountability each have a positive and significant effect on the effectiveness of village fund management. Information technology utilization, however, was not moderate these relationships. These findings underscore the importance of training programs aimed at strengthening the competence of village apparatus, while also highlighting the need for investment in information technology to better support transparency and accountability in public financial management.

Keywords: Accountability, Effectiveness of Kelurahan Fund Management, Information Technology Utilization, and Transparency.

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "**PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DI KECAMATAN MEDAN TIMUR DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL *MODERATING*** " tepat pada waktunya. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Akrim, M.Pd.** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **Dr. Radiman, S.E., M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **M. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Ibu **Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc.** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak **M. Firza Alpi, S.E., M.Si.** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak **Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si.** selaku Dosen Penasehat Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu **Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA.** selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan selama penulisan tugas akhir ini.
9. Kepada **Staf Pengajar dan Staf Administrasi** Program Studi S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Terkhusus kepada **kedua orang tua tercinta** yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.

Pada akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga proses penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis juga menyadari bahwa tugas akhir ini masih terdapat kekurangan, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan tugas akhir ini.

Medan, 19 Agustus 2026
Penulis



Naurah Jacinda Syazwana
NPM. 2405170245P

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**
ABSTRACT ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **v**
DAFTAR TABEL ..... **vii**
DAFTAR GAMBAR ..... **viii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **ix**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Identifikasi Masalah 12
1.3. Rumusan Masalah 14
1.4. Tujuan Penelitian 14
1.5. Manfaat Penelitian 15

BAB II KAJIAN PUSTAKA **16**
2.1. Landasan Teori 16
2.1.1. Teori Agency *(Agency Theory)* 16
2.1.2. Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan 17
2.1.3. Transparansi 22
2.1.4. Akuntabilitas 26
2.1.5. Pemanfaatan Teknologi Informasi 31
2.1.6. Penelitian Terdahulu 35
2.2. Kerangka Berpikir Konseptual 37
2.2.1. Pengaruh Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan 37
2.2.2. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan 38
2.2.3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Memoderasi Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan 39
2.2.4. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Memoderasi Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan 41
2.3. Hipotesis 43

BAB III METODE PENELITIAN **44**
3.1. Jenis Penelitian 44
3.2. Definisi Operasional 44
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian 46
3.4.1. Tempat Penelitian 46
3.4.2. Waktu Penelitian 46
3.4. Teknik Pengambilan Sampel 46
3.4.1. Populasi 46

3.4.2. Sampel 47
3.5. Teknik Pengumpulan Data 49
3.5.1. Uji Instrumen Penelitian 50
3.6. Teknik Analisis Data 52
3.6.1. Metode Analisis Deskriptif 53
3.6.2. SEM-PLS *(Structural Equation Modeling - Partial Least Square*) 53
3.6.3. Uji Hipotesis 58

BAB IV HASIL PENELITIAN 59
4.1. Hasil Penelitian 59
4.1.1. Deskripsi Data 59
4.1.2. Karakteristik Responden 59
4.1.3. Deskripsi Variabel Penelitian 62
4.2. Hasil Uji Persyaratan Analisis 76
4.2.1. Evaluasi Model Pengukuran *(Outer Model)* 76
4.2.2. Evaluasi Model Struktural *(Inner Model*) 82
4.2.3. Pengujian Hipotesis 84
4.3. Pembahasan 86
4.3.1. Pengaruh Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan 86
4.3.2. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan 90
4.3.3. Pemanfaatan Teknologi Informasi Memoderasi Pengaruh Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan 94
4.3.4. Pemanfaatan Teknologi Informasi Memoderasi Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan 97

BAB V PENUTUP 100
5.1. Kesimpulan 100
5.2. Saran 101

DAFTAR PUSTAKA 103
LAMPIRAN 112

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi anggaran Dana Kelurahan di Wilayah Kecamatan Medan Timur Tahun 2023-2025 7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 35
Tabel 3.1 Definisi Operasional 45
Tabel 3.2 Rencana Waktu Penelitian 46
Tabel 3.3 Sampel Lokasi Penelitian 49
Tabel 3.4 Skor Skala Likert 50
Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 59
Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 60
Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Periode Bekerja 60
Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Jabatan 60
Tabel 4.5 Distribusi Responden Berdasarkan Periode Jabatan 61
Tabel 4.6 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Perangkat Lunak 61
Tabel 4.7 Distribusi Responden Berdasarkan Pengalaman Penggunaan Perangkat Lunak 62
Tabel 4.8 Pedoman Kategorisasi Rata-rata Skor Jawaban Responden 63
Tabel 4.9 Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden tentang Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan (Y) 63
Tabel 4.10 Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden tentang Transparansi (X1) 67
Tabel 4.11 Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden tentang Akuntabilitas (X2) 69
Tabel 4.12 Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi (Z) 73
Tabel 4.13 Validitas Konvergen 77
Tabel 4.14 Hasil Uji Validitas Konvergen Setelah Eliminasi 78
Tabel 4.15 *Heterotrait-Monotrait Ratio of Correlation* (HTMT) 80
Tabel 4.16 Hasil Uji C*ronbach Alpa* dan *Composite Reliability* 81
Tabel 4.17 Hasil Uji *R-Square* 82
Tabel 4.18 Hasil Uji *F-Square* 83
Tabel 4.19 *Path Coefficient* 85
Tabel 4.20 *Interaction Effects* 86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Konseptual	42
Gambar 3.1	Model Persamaan Struktural PLS	55
Gambar 4.1	Persentase Jawaban Responden tentang Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan (Y)	66
Gambar 4.2	Distribusi Rata-rata Jawaban Responden tentang Transparansi (X1)	69
Gambar 4.3	Distribusi Rata-rata Jawaban Responden tentang Akuntabilitas (X2)	72
Gambar 4.4	Distribusi Rata-rata Jawaban Responden tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi (Z)	75
Gambar 4.5	Hasil Model Struktural PLS	76
Gambar 4.6	Hasil Pengujian Ulang Model PLS-SEM Setelah Eliminasi	80
Gambar 4.7	*Path Coefficient*	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner Penelitian	112
Lampiran 2	Tabulasi Data Jawaban Responden	121
Lampiran 3	Hasil Output Pengelolaan Data SmartPLS 4	125
Lampiran 4	Form Pengajuan Judul	128
Lampiran 5	Permohonan Izin Riset	131
Lampiran 6	Surat Izin Riset dari Prodi	132
Lampiran 7	SK Penetapan Dosen Pembimbing	133
Lampiran 8	Surat Balasan Izin Riset dari Instansi	134
Lampiran 9	Berita Acara Seminar dan Pengesahan Seminar	135
Lampiran 10	Berita Acara Bimbingan Proposal	137
Lampiran 11	Surat Selesai Riset dari Prodi	139
Lampiran 12	Surat Selesai Riset dari Instansi	140
Lampiran 13	Daftar Riwayat Hidup	141
Lampiran 14	Surat Pernyataan Keaslian Tugas Akhir	142

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kecamatan merupakan bagian dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kecamatan Medan Timur merupakan salah satu dari total 21 Kecamatan di Kota Medan dengan luas wilayah 7,82 km2 (Pemerintah Kota Medan, 2022). Kecamatan ini terdiri dari 11 Kelurahan, yaitu Kelurahan Gang Buntu, Kelurahan Sidodadi, Kelurahan Durian, Kelurahan Gaharu, Kelurahan Glugur Darat I, Kelurahan Glugur Darat II, Kelurahan PB. Darat I, Kelurahan PB. Darat II, Kelurahan PB. Bengkel, Kelurahan PB. Bengkel Baru, dan Kelurahan Perintis. Kelurahan-kelurahan tersebut mendukung pelaksanaan fungsi administratif kecamatan, termasuk pengelolaan dana publik yang bersumber dari pemerintah pusat.

Dana kelurahan mulai dioperasikan pada pembuka tahun 2019 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui tambahan Dana Alokasi Umum (DAU), yang kemudian disalurkan kepada pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan, 2020). Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pengelolaan dana di tingkat kelurahan mencakup serangkaian kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan kelurahan. Pengelolaan dana di kelurahan ini tentunya harus dilakukan dengan baik, secara profesional, dan

tepat sasaran sesuai dengan peraturan yang berlaku (Supit & Lumingkewas, 2023). Dalam Pasal 230 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran bagi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat sekurang-kurangnya 5% dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana kelurahan diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 yang mengatur kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Dalam pengelolaan dana kelurahan, tata kelola yang baik menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik dilakukan secara efektif dan efisien. Terdapat 9 prinsip yang menjadi fondasi dalam pengelolaan keuangan publik yang baik, yakni; partisipasi, kepatuhan terhadap regulasi, transparansi, responsivitas, berorientasi pada kepentingan masyarakat, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi yang strategis (UNDP, 2006).

Efektivitas pengelolaan Dana Kelurahan dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan pemanfaatan dana dalam mendukung penyediaan sarana dan prasarana serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Khoirudin dkk., 2025). Dana Kelurahan yang dikelola secara efektif dan efisien dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Menurut (Khoirudin dkk, 2025) untuk melihat sejauh mana dana kelurahan dikelola dan dipergunakan secara efektif, dapat dipertimbangkan melalui aspek transparansi, akuntabilitas,

partisipasi masyarakat, dan kesesuaian dengan prioritas pembangunan lokal. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan oleh (Mojo, 2023), yang membuktikan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa. Penelitian tersebut memang berfokus pada Dana Desa, namun prinsip tata kelola yang baik dapat diterapkan pada Dana Kelurahan mengingat kesamaan tujuan dan mekanisme pengelolaanya.

Transparansi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan kemudahan dan keterbukaan dalam memperoleh informasi, dengan tujuan untuk mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara, badan publik lainnya, serta setiap kebijakan dan aktivitas yang berdampak pada kepentingan publik. Transparansi dapat dimaknai sebagai bentuk keterbukaan informasi *(informativeness)* dan pengungkapan informasi *(disclosure)* yang akurat terhadap publik (Safrizal, 2024). Transparansi mencakup kejelasan, kelengkapan, keandalan, ketepatan waktu, aksesibilitas, serta kemudahan pemanfaatan informasi keuangan publik (OECD, 2025).

Terdapat 3 faktor yang mendorong transparansi pelayanan publik, seperti profesionalisme aparatur, keberadaan sistem dan regulasi yang tepat, dan persaingan lingkungan yang sehat (Fadjar Trisakti dkk., 2022). Penelitian oleh (Djamiraga & Widajantie, 2022) menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Kelurahan. Maka dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, bahwa semakin tinggi tingkat keterbukaan informasi oleh pemerintah terhadap publik, maka semakin efektif pula pengelolaan Dana Kelurahan yang dijalankan.

Akuntabilitas merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi pejabat publik yang bertanggung jawab atas suatu tindakan dalam bentuk tuntutan pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya. Pemerintah berkewajiban dalam mempertanggungjawabkan tujuan dan aturan fiskal yang ditetapkan (OECD, 2025). Pemerintah diimbau untuk dapat berinteraksi dengan masyarakat secara adil, objektif, dan terbuka. Dalam kerangka *good governance*, transparansi, dan akuntabilitas menjadi prinsip utama yang memandu penyelenggaraan pemerintahan sekaligus instrumen penting dalam mencegah dan memberantas korupsi (OECD, 2002). Akuntabilitas sendiri menuntut agar setiap pengelolaan keuangan publik dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan regulasi (Hartono, 2025). Akuntabilitas sendiri bertujuan dalam meningkatkan kinerja suatu organisasi, bukan untuk menitikberatkan pada pencarian kesalahan atau pemberian sanksi (Haikal & Mauliana, 2022).

Akuntabilitas menjadi aspek penting yang bertujuan untuk memperoleh kepercayaan pubik serta bentuk penilaian dalam melihat kemampuan suatu individu atau organisasi dalam menjalankan kewajibannya (Januri dkk., 2024). Hal ini didukung penelitian oleh (Mojo, 2023) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa. Artinya, ketika pejabat publik telah melaksanakan tanggung jawab pengelolaan dana secara memadai melalui penerapan prinsip akuntabilitas, maka pengelolaan dana publik dapat berjalan secara efektif. Penelitian tersebut memang berfkokus mengkaji Dana Desa, meskipun demikian prinsip tata kelola yang baik dapat diterapkan pada pengelolaan Dana Kelurahan. Namun, dalam pengelolaan Dana Kelurahan tidak terlepas dari tantangan-tantangan yang ada mulai dari

kurangnya keterbukaan informasi terhadap masyarakat, kualitas SDM aparatur yang belum begitu baik sehingga berdampak kepada rendahnya akuntabilitas, dan masih terdapat keterbatasan masyarakat untuk dapat berkontribusi dalam berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Jika dikaitkan dengan teori keagenan *(agency theory)*, masyarakat memiliki peran sebagai *(principal)* dan aparatur kelurahan berperan sebagai *(agent).* Dalam teori tersebut terjadi yang namanya konflik kepentingan, apabila aparatur kelurahan menjadi pihak yang diberi mandat bertindak sesuai keingainan pribadi maka hal ini dapat menimbulkan biaya keagenan *(agency cost)*. Maka penerapan prinsip *good governance* terutama transparansi, dan akuntabilitas didampingi pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi mekanisme dalam meminimalkan potensi konflik kepentingan, serta sebagai sarana dalam mempermudah perencanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dapat diwujudkannya pemerintahan di tingkat kelurahan yang berintegritas, efektif, serta mampu mendukung pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan (Hartono, 2025).

Di tingkat nasional, fenomena pengelolaan dana desa dan kelurahan telah menjadi perhatian serius pemerintah. Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) masih menyoroti tingginya kasus penyelewengan wewenang dan anggaran di tingkat desa dan kelurahan. Melalui diskusi tersebut ditegaskan bahwa penguatan tata kelola keuangan melalui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta pemanfaatan teknologi pengawasan digital, dapat menjadi langkah strategis untuk menekan potensi penyimpangan (BPHN, 2025). *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat sepanjang tahun 2023 terdapat 791 kasus korupsi dengan

1.695 tersangka yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 28,4 triliun. Dari keseluruhan kasus tersebut, sektor desa menjadi sektor yang paling dominan dengan 187 kasus. Hal ini menunjukkan adanya urgensi tata kelola pemerintahan yang baik di berbagai sektor, tidak hanya pada sektor desa, tetapi juga pada sektor kelurahan.

Sebelum membahas fenomena yang terjadi di kelurahan pada wilayah Kecamatan Medan Timur, perlu disampaikan bahwa masalah terkait efektivitas pengelolaan Dana Kelurahan menjadi masalah krusial dan perlu adanya perhatian yang serius oleh pemerintah di Kota Medan. Di mana pengelolaan Dana Kelurahan yang dinilai tidak transparan dan tidak berdampak nyata pada masyarakat. Pada Oktober 2024, tepatnya di depan Kantor Wali Kota Medan terjadi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh DPD Lembaga Pemberdayaan Msyarakat (LPM) Kota Medan bersama Pengurus DPC LPM Kecamatan dan LPM Kelurahan se-Kota Medan. Salah satu orator aksi mengangkat suara dengan menyatakan *"Fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran Dana Kelurahan tidak melibatkan LPM secara maksimal. Aspirasi masyarakat seringkali tidak terakomodasi LPM tidak diberikan ruang yang cukup untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program. Akibatnya, program yang dijalankan menjadi tidak efektif dan tidak berdampak signifikan bagi masyarakat".* ujar Suheri Can (Pewarta, 2024).

Berdasarkan fenomena tersebut, pengelolaan dana kelurahan perlu menerapkan nilai transparansi dan akuntabilitas sehingga penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Adapun data tersebut di Kecamatan Medan Timur selama tiga tahun terakhir, yakni disajikan

pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 2 Realisasi anggaran Dana Kelurahan di Wilayah Kecamatan Medan Timur Tahun 2023-2025

NO.	KELURAHAN	2023			2024			2025		
		ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	(%)
1.	Gang Buntu	361.132.500	322.740.980	89,36	138.392.000	128.229.205	92,65	171.846.000	100.258.485	58
2.	Sidodadi	361.208.000	309.403.849	85,65	134.595.000	116.844.600	86,81	171.852.000	73.104.350	43
3.	Durian	361.053.372	316.909.725	87,77	115.965.000	105.294.069	90,79	170.224.000	102.427.875	60,17
4.	Gaharu	346.585.157	330.858.402	95,46	88.420.000	75.165.350	85	199.690.000	123.691.275	61,94
5.	Glugur Darat I	361.208.000	321.702.139	89,06	179.702.200	149.799.584	83,35	171.856.150	120.993.630	70,40
6.	Glugur Darat II	356.893.693	314.629.891	88,15	126.885.000	116.413.920	91,74	171.624.000	126.999.575	73,99
7.	Pulo Brayan Darat I	359.680.000	309.520.897	86,05	118.695.000	100.952.235	85,05	171.860.000	118.687.578	69,06
8.	Pulo Brayan Darat II	398.510.000	349.021.032	87,58	128.030.000	111.000.017	86,69	111.711.750	99.239.677	88,83
9.	Pulo Brayan Bengkel	361.194.568	312.463.987	86,50	208.691.600	198.006.985	94,88	170.962.000	109.479.528	64,03
10.	Pulo Brayan Bengkel Baru	365.087.102	340.114.632	93,16	122.561.600	118.105.475	86,47	170.224.000	101.199.050	59,42
11.	Perintis	285.949.000	261.428.383	91,42	118.200.200	102.215.928	96,36	170.118.250	101.795.002	59,83

Sumber: Data diolah peneliti berdasarkan dokumen realisasi Anggaran Dana Kelurahan Kecamatan Medan Timur, Subbag Keuangan TA 2023-2025.

Berdasarkan Tabel 1.1, capaian realisasi anggaran Dana Kelurahan di Kecamatan Medan Timur pada tahun 2023 dan 2024 secara umum berada pada kategori efektif hingga sangat efektif, dengan mayoritas kelurahan mencapai realisasi di atas 85%. Namun, pada tahun 2025 terjadi penurunan signifikan di hampir seluruh kelurahan, meskipun anggaran yang dialokasikan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kelurahan Sidodadi bahkan hanya mencapai realisasi sebesar 43%, masuk kategori tidak efektif berdasarkan kriteria Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996, sementara capaian tertinggi tahun 2025 hanya diraih Kelurahan Pulo Brayan Darat II sebesar 88,83%, masih berada pada kategori cukup efektif. Penurunan capaian yang konsisten di hampir seluruh kelurahan pada tahun yang sama mengindikasikan adanya kendala sistemik dalam pengelolaan anggaran, bukan sekadar variasi kinerja antar kelurahan, sehingga menjadi urgensi bagi penelitian ini untuk mengkaji lebih lanjut faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan dana kelurahan tersebut.

Di sisi lain, Kelurahan Pulo Brayan Barat II menunjukkan capaian yang relatif stabil selama periode 2023-2025, dengan capaian (%) sebesar 87,58% pada tahun 2023, 86,69% pada tahun 2024, dan 88,83% pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya konsistensi dalam pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran, meskipun tidak secara langsung mencerminkan keberhasilan program dari sisi dampak nyatanya terhadap masyarakat. Adapun data realisasi anggaran seluruh kelurahan dalam penelitian ini, tidak tersedia melalui kanal publik mana pun dan hanya dapat diperoleh melalui permintaan langsung ke kantor kecamatan.

Dana Kelurahan tidak memiliki sistem informasi khusus seperti Dana Desa. Anggaran kelurahan masuk sebagai bagian dari anggaran kecamatan,

sehingga masyarakat yang ingin mengetahui penggunaan dana di kelurahannya pun harus datang langsung ke kantor kecamatan suatu kondisi yang menghambat transparansi sekaligus menunjukkan bahwa tata kelola informasi keuangan di tingkat kelurahan belum berjalan secara efisien. Berbeda dengan Dana Desa yang telah memiliki sistem informasi khusus seperti Sistem Informasi Desa Kemendesa. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya akses informasi publik terhadap proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun secara administratif penyerapan anggaran pada beberapa periode tergolong tinggi, aspek transparansi dan sistem pelaporannya masih menghadapi tantangan. Kondisi ini sejalan dengan berbagai fenomena tata kelola yang sebelumya diidentifikasi, yang menekankan pentingnya penguatan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta dukungan teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas pengelolaan Dana Kelurahan secara berkelanjutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, adapun fenomena yang ditemukan di kelurahan pada wilayah Kecamatan Medan Timur yakni berupa dugaan korupsi dari pelaksanaan program pelatihan tata boga, menjahit, dan UMKM yang dijalankan oleh CV. Cevreitta Kencana di Kelurahan Durian, Gang Buntu, Sidodadi, dan Glugur Darat II di Kecamatan Medan Timur (Mudanews, 2022). Dugaan tersebut diperoleh dari hasil investigasi dan diperkuat oleh informasi yang dihimpun dari pihak internal kelurahan sendiri. Pelaksanaan program tersebut menggunakan Dana Kelurahan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan melalui APBD Kota Medan tahun 2021. Ketua Koordinasi Pusat (Korpus) Aliansi Pemantau Independen (API) Sumatera Utara menyatakan adanya indikasi penyimpangan, seperti item kegiatan dalam Rancangan Anggaran Biaya

(RAB) yang tidak sesuai realisasi, bahan praktik yang seharusnya digunakan diganti dengan sembako (Waspada.id, 2022).

Dugaan kasus korupsi tersebut memperlihatkan bahwa prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Kelurahan belum dilaksanakan secara optimal. Kondisi ini membuka peluang terjadinya penyimpangan, terlebih ketika masyarakat kurang dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan masih terbatas. Selain itu, permasalahan ini juga mencerminkan lemahnya integritas aparatur dalam pengelolaan dana publik di tingkat kelurahan. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), aparatur pemerintah kelurahan diharuskan untuk dapat bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan serta ada mekanisme pelaporan dan audit secara jelas. Ketika aparatur tidak menunjukkan sikap bertanggungjawab dan tidak ada sistem pelaporan yang terbuka dan terdokumentasi dengan baik, efektivitas pengelolaan Dana Kelurahan menjadi sulit diwujudkan. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa Dana Kelurahan, sebagaimana Dana Desa, memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap terjadinya praktik korupsi (Saskia dkk., 2025).

Kondisi ini diperparah ketika pemanfaatan teknologi informasi di tingkat kelurahan di Kecamatan Medan Timur masih belum berjalan optimal. Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Medan Timur Tahun 2021-2026, disebutkan bahwa jumlah peralatan komputer dan perangkat digital lainnya masih terbatas, sehingga pelayanan berbasis digital belum dapat diterapkan secara maksimal dan masih menghadapi keterbatasan. Pemanfaatan teknologi informasi dipandang sebagai instrumen strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan publik. Rahmatsyah menegaskan bahwa teknologi dapat menjadi

instrumen penting dalam menekan celah penyalahgunaan. Dengan mengoptimalkan penggunaan sistem pengawasan digital, transparansi dapat ditingkatkan, respons penanganan lebih cepat, serta akuntabilitas dapat diwujudkan (BPHN, 2025). Ketika sistem digital belum tersedia atau belum berjalan secara maksimal, pengelolaan dana publik dilakukan secara manual hingga semi-manual. Hal ini berpotensi menyulitkan proses pengawasan, pencatatan, pelaporan, serta dapat memicu terjadinya penyelewengan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Penelitian mengenai efektivitas pengelolaan Dana Desa telah banyak dilakukan, sementara penelitian yang secara khusus mengkaji pengelolaan Dana Kelurahan masih relatif terbatas. Salah satu penelitian yang secara langsung berfokus pada pengelolaan Dana Kelurahan dilakukan oleh (Djamiraga dan Widajantie., 2022) yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Kelurahan. Selanjutnya, penelitian (Yulita dkk. 2023) menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan secara simultan maupun parsial terhadap efektivitas pengelolaan keuangan kelurahan di Kecamatan Palu Timur. Meskipun penelitian tersebut mengkaji keuangan kelurahan secara umum, Dana Kelurahan merupakan bagian dari keuangan kelurahan sehingga temuan tersebut tetap relevan sebagai rujukan konseptual.

Penelitian lain oleh Nurfani Salasa dkk., (2024) yang mengkaji pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan Dana Desa juga menemukan adanya pengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan. Namun, penelitian tersebut berfokus mengkaji Dana Desa dan belum mengkaji

efektivitas pengelolaan dana di kelurahan serta belum mempertimbangkan peran pemanfaatan teknologi informasi. Selanjutnya, penelitian oleh Juniarti dkk., (2022) yang menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa. Meskipun penelitian tersebut berfokus terhadap Dana Desa dan variabel penelitian yang berbeda, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berkontribusi terhadap efektivitas pengelolaan dana publik.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, penelitian yang secara khusus mengkaji efektivitas pengelolaan Dana Kelurahan masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian penelitian sebelumnya yang membahas efektivitas pengelolaan Dana Kelurahan cenderung menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian perbedaan latar belakang wilayah dan fenomena yang terjadi juga menunjukkan adanya peluang untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian ini dengan mengangkat judul "**Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Di Kecamatan Medan Timur Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel *Moderating***."

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tata kelola keuangan publik di tingkat kelurahan dan desa secara nasional masih menghadapi tantangan serius dalam aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN) dan *Indonesia Corruption Watch* (ICW)

yang menyoroti tingginya kasus penyelewengan wewenang dan anggaran di tingkat desa dan kelurahan.

2. Pengelolaan Dana Kelurahan di Kota Medan mendapat sorotan masyarakat terkait belum optimalnya transparansi dan keterlibatan LPM dalam proses perencanaan dan penganggaran, sebagaimana tercermin dari aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh DPD LPM Kota Medan bersama DPC LPM Kecamatan dan LPM Kelurahan se-Kota Medan di depan Kantor Wali Kota Medan.
3. Tingkat realisasi anggaran Dana Kelurahan antar kelurahan di Kecamatan Medan Timur menunjukkan fluktuasi yang tidak konsisten dari tahun 2023 hingga 2025, dengan kecenderungan penurunan capaian yang signifikan pada tahun 2025. Sehingga efektivitas pengelolaan Dana Kelurahan belum terlihat merata dan stabil.
4. Terdapat indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program pelatihan tata boga, menjahit, dan UMKM yang menggunakan Dana Kelurahan di beberapa kelurahan di Kecamatan Medan Timur. Item kegiatan dalam RAB tidak sesuai realisasi dan bahan praktik diganti dengan sembako, yang menunjukkan lemahnya penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Kelurahan.
5. Pemanfaatan teknologi informasi di tingkat kelurahan di Kecamatan Medan Timur masih belum berjalan optimal, sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Medan Timur Tahun 2021-2026 yang menyebutkan bahwa jumlah perangkat komputer dan sarana digital masih terbatas, sehingga pelayanan berbasis digital belum dapat diterapkan secara maksimal.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Transparansi Berpengaruh Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Pada Kecamatan Medan Timur?
2. Apakah Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Pada Kecamatan Medan Timur?
3. Apakah Transparansi Berpengaruh Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel *Moderating*?
4. Apakah Akuntabilitas Berpengaruh Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel *Moderating*?

1.4. Tujuan Penelitian

Bersasarkan rumusan masalah di atas, adapaun tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk Menguji Dan Menganalisis Pengaruh Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Pada Kecamatan Medan Timur.
2. Untuk Menguji Dan Menganalisis Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Pada Kecamatan Medan Timur.
3. Untuk Menguji Dan Menganalisis Pengaruh Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel *Moderating.*

4. Untuk Menguji Dan Menganalisis Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel *Moderating.*

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti sebagai sarana dalam memperkaya wawasan dan ilmu mengenai transparansi, akuntabilitas, pemanfaatan teknologi informasi, dan efektivitas pengelolaan dana publik pada tingkat kelurahan. Serta bentuk implementasi pembelajaran yang didapati selama masa perkuliahan.
2. Bagi pihak Kecamatan Medan Timur dan kelurahan di bawahnya, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dalam memperbaiki tata kelola Dana Kelurahan, terutama pada aspek transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat membantu menambah wawasan dan informasi mengenai trnasparansi dan akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan Dana Kelurahan dengan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel moderasi serta sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian serupa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Agency *(Agency Theory)*

Teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara *principal* dan *agent*, di mana principal mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent untuk bertindak atas namanya. Perbedaan kepentingan di antara keduanya menimbulkan risiko asimetri informasi dan perilaku oportunistik, sehingga memerlukan pengawasan dan keterbukaan. Namun, perbedaan kepentingan memicu risiko penyelewengan, sehingga diperlukan akuntabilitas, transparansi, dan mekanisme pengawasan (KSAP, 2020). Dalam ranah pemerintahan, masyarakat diposisikan sebagai principal sedangkan pemerintah bertindak sebagai agent yang menerima mandat untuk mengelola sumber daya publik (Juliyanti & Ditasari, 2025).

Dalam sebuah perusahaan hampir tidak mungkin mencapai kondisi tanpa biaya keagenan *(zero agency cost)*. Perbedaan kepentingan ini yang berpotensi mendorong manajemen untuk mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan pemilik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan biaya keagenan adalah dengan meningkatkan transparansi melalui pengungkapan informasi secara sukarela (Purba, 2023). Dalam organisasi publik pada tingkat kelurahan, teori keagenan menjelaskan hubungan antara masyarakat sebagai pihak yang memberikan mandat *(principal)* dan aparatur kelurahan sebagai pihak yang menerima mandat untuk mengelola sumber daya publik *(agent).* Aparatur kelurahan memiliki otoritas untuk merencanakan, mengelola,

dan melaporkan penggunaan dana publik, sementara masyarakat berperan sebagai pihak yang menilai dan mengawasi kinerja tersebut (Ririhena & Richard, 2022).

Teori keagenan menjelaskan upaya penyelesaian dua masalah utama, yaitu konflik kepentingan antara prinsipal dan agen akibat perbedaan tujuan serta keterbatasan prinsipal dalam memantau kinerja agen, dan permasalahan pembagian risiko yang muncul ketika prinsipal dan agen memiliki perilaku yang berbeda terhadap risiko (Ikhsan dkk., 2019). Jika dikaitkan dengan pengelolaan Dana Kelurahan, teori ini menggambarkan hubungan antara masyarakat *(principal)* dan aparatur kelurahan *(agent)* yang diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya publik. Dalam hubungan tersebut terdapat potensi konflik kepentingan dan asimetri informasi yang dapat mendorong munculnya perilaku oportunistik dari pihak aparatur. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengendalian berupa transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan berbasis digital agar aparatur menjalankan pengelolaan dana sesuai dengan kepentingan masyarakat.

2.1.2. Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan

2.1.2.1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berkaitan dengan tingkat pencapaian tujuan atau sasaran kebijakan (hasil guna). Suatu kegiatan dinilai efektif apabila hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan dan sasaran akhir *(spending wisely)*. Efektivitas hanya melihat ketepat sasaran suatu program dan kegiatan (Mardiasmo, 2002). Efektivitas merupakan konsep penting yang menggambarkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang dilihat dari sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang direncanakan

sebelumnya (Joko dkk., 2022). Suatu program dinilai efektif apabila pelaksanaannya selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan sauatu program dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Efektivitas pengelolaan anggaran dapat dinilai dengan membandingkan antara perencanaan anggaran dan realisasinya. Apabila realisasi anggaran belum mampu memenuhi target yang telah direncanakan, maka pengelolaan anggaran publik dapat dikatakan belum berjalan secara efektif (Sinambela dkk., 2018). Dalam hal efektivitas pengelolaan anggaran Dana Kelurahan jika tidak dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, hal ini akan terasa tidak efektif meskipun program tersebut berhasil dijalankan (Assa dkk., 2020). Efektivitas dalam pengelolaan Dana Kelurahan menjadi tolak ukur untuk menilai sejauh mana penggunaan dan alokasi dana mampu memberikan dampak nyata terhadap pembangunan sarana dan prasarana serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Khoirudin dkk., 2025).

2.1.2.2. Pengelolaan Dana Kelurahan

Anggaran merupakan instrumen strategis dalam pengendalian dan efisiensi biaya melalui perencanaan kegiatan yang memerlukan pembiayaan, selain itu, anggaran berperan sebagai alat perencanaan untuk mencapai tujuan berdasarkan visi dan misi organisasi (Sari, 2010). Seiring dengan kebijakan penguatan pemerintahan di tingkat kelurahan, pemerintah pusat mengalokasikan dukungan anggaran tambahan bagi kelurahan sebagai bagian dari perangkat kecamatan yang menjalankan fungsi pelayanan publik. Dukungan anggaran tersebut diwujudkan melalui kebijakan Dana Kelurahan (Pramono dkk., 2020). Awal mula penyaluran Dana Kelurahan pada awal tahun 2019 dengan menetapkan sejumlah persyaratan

bagi pemerintah kabupaten/kota. Salah satu persyaratan tersebut adalah dalam bentuk surat komitmen dukungan dana oleh kepala daerah untuk mendukung pendanaan kelurahan melalui APBD (BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan, 2020).

Dana Kelurahan diatur melalui sejumlah peraturan pemerintah, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yang menegaskan pemanfaatan Dana Kelurahan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, serta pemberdayaan masyarakat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 230 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran bagi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat sekurang-kurangnya 5% dari APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 memberikan pedoman teknis bagi pemerintah daerah dan kelurahan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan, termasuk pengaturan mengenai alokasi dan penggunaan Dana Kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan Dana Kelurahan secara normatif pengelolaannya tetap mengikuti tahapan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi:

1. Perencanaan, proses penetapan kegiatan dan kebutuhan anggaran berdasarkan prioritas dan tujuan pembangunan.
2. Penganggaran, proses penyusunan dan penetapan anggaran.

3. Pelaksanaan, yaitu kegiatan realisasi penggunaan Dana Kelurahan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
4. Penatausahaan, yaitu kegiatan pencatatan dan pengelolaan administrasi keuangan atas setiap transaksi penggunaan Dana Kelurahan.
5. Pelaporan, penyusunan laporan keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan.
6. Pertanggungjawaban, yaitu penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Kelurahan kepada pihak yang berwenang dan masyarakat.
7. Pengawasan keuangan daerah, yaitu kegiatan pengendalian dan pemeriksaan untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Keberadaan dasar hukum yang mengatur kebijakan alokasi Dana Kelurahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat menjadi pedoman dalam upaya meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Landasan hukum tersebut berfungsi sebagai instrumen pengendalian dalam pengelolaan Dana Kelurahan agar dilaksanakan secara tertib, terarah, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya mekanisme hukum yang jelas, pengelolaan Dana Kelurahan diharapkan dapat dijalankan secara efektif. Hal ini sekaligus menjaga integritas aparatur dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana publik.

2.1.2.3. Prinsip Pengelolaan Dana Kelurahan

Pengelolaan dana publik pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)*. Tata kelola yang baik menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan publik dilakukan secara bertanggung jawab, transparan, serta berorientasi pada

kepentingan masyarakat. Menurut (UNDP, 2006) terdapat 9 prinsip dalam pelaksanaan *good* governance, meliputi:

1. Partisipasi *(participation).*
2. Kepatuhan hukum *(rule of law).*
3. Transparansi *(transparency).*
4. Responsivitas *(responsiveness).*
5. Berorientasi pada kepentingan masyarakat *(consensus orientation).*
6. Keadilan *(equity).*
7. Efektivitas dan efisiensi *(effectiveness and efficiency).*
8. Akuntabilitas *(accountability).*
9. Visi yang strategis *(strategic vision).*

2.1.2.4. Faktor Pendukung Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan

Penelitian empiris yang juga dilakukan oleh (Cahyaningtyas & Natsir, 2025) mengidentifikasi sejumlah faktor pendukung yang berkontribusi terhadap pengelolaan dana kelurahan, antara lain:

1. Adanya peraturan walikota yang menjadi dasar hukum.
2. Tersedianya pedoman perencanaan berupa kamus musrembang.
3. Ketersediaan anggaran yang memadai.
4. Adanya keberadaan kelompok masyarakat pelaksana (pokmas).
5. Adanya pendampingan bagian hukum dan kejaksaan.
6. Pelaksanaan reviu oleh inspektorat.

2.1.2.5. Indikator Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan

Dalam mencapai keberhasilan pengelolaan dana kelurahan dapat pula diukur berdasarkan sejumlah indikator yang disesuaikan dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan serta Peraturan Wali Kota Medan Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, ialah sebagai berikut:

1. Penganggaran.
2. Pelaksanaan anggaran.
3. Penatausahaan dan pertanggungjawaban.
4. Pembinaan dan pengawasan.
5. Pelaksanaan musyawarah pembangunan kelurahan.
6. Perlibatan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.

2.1.3. Transparansi

2.1.3.1. Pengertian Transparansi

Transparansi berlandaskan pada kebebasan akses terhadap informasi, khususnya informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sehingga dapat diperoleh secara langsung oleh pihak-pihak yang membutuhkan (Mardiasmo, 2002). Transparansi merupakan prinsip yang menjamin hak setiap individu untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, termasuk kebijakan publik, proses perumusan dan pelaksanaannya, serta capaian yang dihasilkan (Krina, 2003). Transparansi mencerminkan sikap keterbukaan pemerintah dalam proses perumusan kebijakan keuangan sehingga dapat diakses serta diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah mendorong terwujudnya akuntabilitas horizontal antara pemerintah daerah dan masyarakat guna mendukung terciptanya

pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, serta responsif terhadap kepentingan publik (Moenek & Suwanda, 2019).

Keterbukaan informasi publik bertujuan untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi kebijakan, mendorong partisipasi publik, meningkatkan akuntabilitas penyelenggara negara, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab. Asas dan tujuan keterbukaan informasi publik tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Transparansi memungkinkan masyarakat mengakses berbagai aktivitas dan keputusan pemerintah. Pemerintah dituntut untuk membuka akses informasi terkait proses perumusan kebijakan, alokasi anggaran, serta pelaksanaan dan evaluasi kebijakan publik. Transparansi menekankan ketersediaan informasi yang jelas, mudah diakses, dan dipahami oleh pihak yang membutuhkan, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pelayanan publik (Fadjar Trisakti dkk., 2022). Dalam penerapan prinsip transparansi, tujuan utama yang hendak dicapai adalah terciptanya kenyamanan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah (Haikal & Mauliana, 2022).

Berdasarkan berbagai definisi transparansi tersebut diharapkan mendorong terciptanya persaingan politik yang sehat dan toleran, serta mendukung perumusan kebijakan yang berlandaskan pada kepentingan publik. Prinsip transparansi mencakup dua aspek, yaitu komunikasi publik dan hak masyarakat terhadap akses informasi (Siregar dkk., 2019). Dalam perspektif teori keagenan, transparansi berfungsi mengurangi asimetri informasi antara masyarakat sebagai *principal* dan aparatur pemerintah sebagai *agent.* Keterbukaan informasi atas

perencanaan, pelaksanaan, serta penggunaan anggaran memungkinkan publik melakukan pengawasan. Sehingga membatasi ruang bagi aparatur kelurahan untuk berperilaku oportunistik seperti penyimpangan, manipulasi, maupun penggunaan kewenangan secara tidak semestinya. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga menghindari timbulnya *agency cost* yang muncul akibat perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent.*

2.1.3.2. Karakteristik Transparansi

Adapun menurut (Mardiasmo, 2002) transparansi publik dapat diidentifikasi melalui beberapa karakteristik, sebagai berikut:

1. Informatif *(informativeness)*

   Tersedianya informasi yang memadai berupa penjelasan mekanisme, berita, data, fakta, dan informasi lain yang relevan, sehingga dapat diakses dan dipahami secara jelas dan akurat oleh para pemangku kepentingan.

2. Keterbukaan *(openness)*

   Keterbukaan memberikan hak kepada publik untuk memperoleh informasi dengan mengakses data yang dikelola oleh badan publik. Informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, kecuali informasi tertentu yang secara tegas dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pengungkapan *(disclosure)*

   Pengungkapan informasi kepada masyarakat terkait kinerja keuangan dan aktivitas penyelenggaraan organisasi publik. Pengungkapan tersebut dapat bersifat wajib maupun bersifat sukarela sebagai bentuk komitmen organisasi dalam meningkatkan akuntabilitas publik.

2.1.3.3. Indikator Transparansi

Menurut (Krina, 2003), pengukuran prinsip transparansi dapat diukur melalui sejumlah indikator seperti:

1. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab.
2. Kemudahan akses informasi.
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap.
4. Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintahan.

Berdasarkan (OECD, 2025), transparansi didasarkan pada prinsip-prinsip yang kemudian dioperasionalkan dalam penelitian ini menjadi indikator sebagai berikut:

1. Publikasi dokumen anggaran dan laporan keuangan secara tepat waktu dan sistematis.
2. Penyediaan informasi anggaran dan keuangan yang komprehensif serta andal.
3. Peningkatan aksesibilitas dan relevansi informasi anggaran dan keuangan bagi publik.

Sedangkan menurut (Yanti, 2020) dalam mengukur transparansi ada beberapa indikator yakni sebagai berikut:

1. Sistem transparansi kebijakan anggaran.
2. Memudahkan mengakses dokumen anggaran.
3. Ketepatan waktu dalam pelaporan pertanggungjawaban.
4. Terakomodasi suara rakyat.

5. Metode pemberian informasi kepada publik

Dalam penelitian ini, pengukuran transparansi mengacu pada indikator yang dikemukakan oleh (Krina, 2003) dan (Yanti, 2020). Akan tetapi, tidak seluruh indikator dari kedua sumber tersebut digunakan sepenuhnya. Peneliti hanya memilih indikator yang paling relevan dengan fokus penelitian, dan lokus yaitu lokasi penelitian pada tingkat kelurahan. Adapun indikator yang digunakan meliputi: (1) penyediaan informasi yang jelas mengenai prosedur, biaya, dan tanggung jawab; (2) kemudahan akses informasi; (3) sistem transparansi kebijakan anggaran; dan (4) ketepatan waktu dalam pelaporan pertanggungjawaban.

2.1.4. Akuntabilitas

2.1.4.1. Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak yang memegang amanah (agen) untuk menyampaikan pertanggungjawaban, menyajikan laporan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberi amanah (prinsipal) atau pihak yang memiliki hak serta wewenang untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas berdasarkan yang dituturkan oleh Prof Miriam Budiardjo merupakan bentuk pertanggungjawaban pihak yang menerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangannya kepada pihak pemberi mandat. Hal ini menciptakan mekanisme pengawasan melalui pembagian kewenangan di berbagai lembaga pemerintah, sehingga mengurangi pemusatan kekuasaan dan mendorong terciptanya sistem saling mengawasi (Krina, 2003).

Akuntabilitas menjadi kewajiban bagi penyelenggara negara dan aparatur pemerintahan untuk memberikan pertanggungjawaban atas segala bentuk kebijakan, kegiatan, dan penggunaan anggaran yang mereka lakukan. Pertanggungjawaban ini ditujukan kepada masyarakat dan disampaikan melalui mekanisme pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral, hukum, serta administrasi (Sawir, 2022). Akuntabilitas menuntut agar setiap pengambil keputusan menjalankan kewenangannya sesuai dengan amanah yang diberikan. Hal ini mencakup tanggung jawab dalam proses perumusan kebijakan, pelaksanaan strategi pencapaian tujuan, serta kewajiban menyampaikan hasil kebijakan secara terbuka melalui mekanisme pertanggungjawaban baik secara vertikal kepada atasan maupun secara horizontal kepada masyarakat (Moenek & Suwanda, 2019).

Akuntabilitas publik berkembang dalam sistem pemerintahan demokratis yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap proses dan hasil penyelenggaraan pemerintahan wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Umuri, 2019). Akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik mencerminkan upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar serta hak-hak sipil masyarakat melalui penyediaan barang, jasa, dan layanan administrasi. Akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik menekankan bagaimana pemerintah melaksanakan setiap program serta mempertanggung jawabkannya, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan (Mareta & Firdaus, 2024).

Akuntabilitas menjadi kewajiban individu dan lembaga dalam suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan serta menjelaskan setiap kinerja dan tindakan yang dilakukan kepada pihak yang berwenang dan berhak menerima pertanggungjawaban tersebut (LAN dan BPKP, 2000). Dengan demikian aparatur dapat menerima tanggung jawab atas apa yang ditugaskan demi mencapai tujuan yang diawali dengan perencanaan yang matang sampai dengan pelaporan kegiatan kepada pemerintah dan masyarakat. Menurut (Mardiasmo, 2002) dalam akuntabilitas publik terdapat 2 arah pertanggunngjawaban, yaitu:

1. Akuntabilitas Vertikal *(vertical accountability)*

   Pertanggungjawaban vertikal *(vertical accountability*) merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi dalam struktur pemerintahan, mulai dari unit kerja hingga pemerintah pusat, serta pemerintah pusat kepada MPR.

2. Akuntabilitas Horizontal *(horizontal accountability)*

   Pertanggungjawaban horizontal merupakan bentuk pertanggungjawaban yang ditujukan kepada masyarakat secara luas sebagai pihak yang berhak memperoleh penjelasan dan informasi atas penyelenggaraan kegiatan publik.

2.1.4.2. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas sebagai bentuk tanggungjawab penyelenggara kebijakan berdasarkan (LAN dan BPKP, 2000), akuntabilitas memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Harus didukung oleh adanya kesepakatan dan komitmen antara pimpinan dan seluruh staf instansi guna mewujudkan akuntabilitas.
2. Harus melalui suatu sistem yang mampu menjamin pemanfaatan sumber daya

secara konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Harus dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Pelaksanaan akuntabilitas harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
5. Harus menjunjung kejujuran, transparansi, objektivitas, dan inovasi, sehingga mendorong terjadinya pembaruan dalam manajemen melalui penyempurnaan metode dan teknik pengukuran kinerja serta penyusunan laporan akuntabilitas.

2.1.4.3. Indikator Akuntabilitas

Dalam akuntabilitas publik, menurut (Ellwood, 1993) terdapat 4 dimensi seperti akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum *(accountability for probity and legality)*, akuntabilitas proses *(process accountability)*, akuntabilitas program *(program accountability)*, dan akuntabilitas kebijakan *(policy accountability)*. Adapun indikator yang diturunkan dari keempat dimensi akuntabilitas publik menurut (Mardiasmo, 2002), sebagai berikut:

1. Penghindaran penyalahgunaan jabatan.
2. Ketaatan terhadap hukum.
3. Proses dan pertanggungjawaban anggaran.
4. Pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan minim anggaran.
5. Pertimbangan tujuan dapat tercapai atau tidak dan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.
6. Pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD dan masyarakat.

Berdasarkan konsep akuntabilitas publik yang dikemukakan oleh (Krina, 2003), adapun indikator akuntabilitas dalam penelitian ini disesuaikan dengan konteks pengelolaan Dana Kelurahan dan keterbatasan fokus dan lokus penelitian. Indikator yang digunakan meliputi:

1. Ketersediaan informasi tertulis, tersedia bagi warga yang membutuhkan, dengan setiap keputusan yang diambil sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, dan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.
2. Akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.
3. Kejelasan dari sasaran kebijakan yang telah diambil dan dikomunikasikan.
4. Kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas.
5. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan kepada masyarakat.
6. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan setelah keputusan dibuat dan mekanisme pengaduan masyarakat.
7. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil.

Sedangkan menurut (Haikal & Mauliana, 2022), akuntabilitas dapat diukur berdasarkan seperangkat indikator yang meliputi:

1. *Adanya Standart Operating Procedure* dalam penyelenggaraan kewenangan dan pelaksanaan kebijakan.
2. Mekanisme pertanggungjawaban.
3. Laporan tahunan.
4. Laporan pertanggungjawaban.
5. Sistem pengawasan.

6. Mekanisme reward and punishment.

Berdasarkan perbandingan indikator akuntabilitas di atas, maka penelitian ini menggunakan indikator yang dikemukakan oleh (Mardiasmo, 2002). Pemilihan indikator ini didasarkan pada karakteristik objek dan lokus penelitian, indikator ini bersifat lebih fleksibel dan dapat dioperasionalkan dalam konteks pengelolaan dana kelurahan. Sementara itu, indikator yang dikemukakan oleh (Krina, 2003) serta (Haikal & Mauliana, 2022) cenderung bersifat makro dan lebih sesuai apabila digunakan dalam penelitian pada level organisasi pemerintahan yang lebih besar, seperti pemerintah daerah atau pemerintah pusat.

2.1.5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.1.5.1. Pengertian Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah tingkat penggunaan teknologi informasi oleh individu dalam pekerjaan, yang dipengaruhi oleh perasaan individu terhadap teknologi, norma sosial di lingkungan kerja, persepsi manfaat jangka pendek dan jangka panjang, serta kondisi yang memfasilitasi penggunaan teknologi (Thompson *et al*., 1991). Dalam *Technology Acceptance Model* (TAM) dijelaskan bahwa pemanfaatan suatu teknologi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu *perceived usefulness* (persepsi kegunaan) dan *perceived ease of use* (persepsi kemudahan penggunaan). Persepsi kegunaan mengacu pada keyakinan pengguna bahwa penggunaan sistem informasi dapat meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan tugas, sedangkan persepsi kemudahan penggunaan berkaitan dengan keyakinan bahwa sistem tersebut mudah dipahami dan dioperasikan (Davis, 1987).

Teknologi informasi digunakan untuk mendukung proses pengolahan data dalam berbagai bentuk, termasuk data numerik, teks, suara, maupun visual (Silitonga dkk., 2021). Dalam pengelolaan Dana Kelurahan, pemanfaatan teknologi informasi berperan dalam mempermudah arus informasi dan proses administrasi keuangan. Hal ini berperan penting dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan dana (Safrizal, 2024). Secara substansial, pemanfaatan teknologi informasi dipandang mampu meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan melalui keakuratan, ketepatan waktu, dan kemudahan dalam memverifikasi informasi (Alpi & Akmalia, 2025).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan kewajiban pemerintah daerah dalam mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dalam hal peningkatan pengelolaan keuangan daerah, dan penyaluran informasi terhadap publik. Memanfaatkan kemajuan teknologi tidak hanya sebatas perangkat komputer, tetapi juga mencakup jaringan internet. Dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui kemudahan mengakses informasi lembaga pemerintah daerah melalui situs resmi (Hadis dkk., 2022).

Dalam pengelolaan dana di tengkat desa dan kelurahan, pemanfaatan teknologi informasi memiliki peranan penting sebagai alat dalam mendukung pengolahan data keuangan dan proses administrasi (Sabdosih & Sarwono, 2023). Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan publik tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan sistem, tetapi juga berkaitan dengan tingkat

penerimaan dan penggunaan sistem tersebut oleh aparatur kelurahan. Meskipun suatu oragnisasi telah menginvestasikan sumber daya berupa tekonologi informasi untuk mendukung kinerja pegawai, ketersediaanya tidak otomatis menjamin bahwa teknologi tersebut akan dimanfaatkan secara efektif (Thompson *et al.*, 1991).

2.1.5.2. Faktor Penghambat Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut (Renanda & Rosidin, 2025) terdapat beberapa faktor penghambat pemanfaatan teknologi informasi, yang meliputi:

1. Keterbatasan infrastruktur teknologi yang belum memadai.
2. Keterbatasan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi informasi.
3. Budaya organisasi birokrasi yang relatif lambat dalam beradaptasi terhadap perubahan.

2.1.5.3. Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi

Adapun indikator pemanfaatan teknologi informasi menurut (Thompson *et al*., 1991), yang meliputi:

1. Intensitas pemanfaatan.
2. Frekuensi pemanfaatan.
3. Perangkat lunak yang digunakan.

Pemanfaatan teknologi informasi jika mengacu pada *Technology Acceptance Model* (TAM) oleh (Davis, 1987) dapat diukur melalui beberapa indikator, adalah sebagai berikut:

1. *Perceived Usefulness* (Persepsi Kegunaan)

a. Kinerja pekerjaan *(job performance).*

b. Bekerja lebih cepat *(work more quickly).*

c. Meningkatkan produktivitas *(increase productivity).*

d. Efektivitas *(effectiveness).*

e. Mempermudah pekerjaan *(makes job easier).*

f. Kegunaan *(useful).*

2. *Perceived Ease of Use* (Persepsi Kemudahan Penggunaan)

a. Mudah dipelajari *(easy to learn).*

b. Mudah dikendalikan *(controllable).*

c. Jelas dan mudah dimengerti *(clear and understandable).*

d. Fleksibel *(flexible).*

e. Mudah menjadi terampil *(easy to become skillful).*

f. Mudah digunakan *(easy to use).*

Sedangkan menurut (Sarosa & Zowghi, 2003) mengenai konsep pemanfaatan teknologi informasi dalam organisasi, dalam mengukur pemanfaatan teknologi informasi dapat diukur berdasarkan beberapa indikator, seperti:

1. Intensitas penggunaan TI.
2. Ketersediaan tenaga ahli/dukungan teknis.
3. Investasi pada teknologi informasi.
4. Kemudahan bertukar informasi.
5. Kemudahan akses dan kerjasama.

Dengan demikian, penelitian ini menggunakan indikator pemanfaatan teknologi informasi yang dikemukakan oleh (Thompson *et al*., 1991). Pemilihan indikator ini didasarkan pada kesesuaian dengan fokus utama penelitian, konteks permasalahan, serta karakteristik lokus penelitian pada tingkat kelurahan sebagai perangkat pemerintahan di bawah kecamatan. *Technology Acceptance Model*

(TAM) oleh (Davis, 1987) dan indikator yang dikemukakan oleh (Sarosa & Zowghi, 2003) tidak digunakan karena lebih berorientasi pada pengukuran penerimaan teknologi secara psikologis dan pengelolaan teknologi dalam organisasi dengan tingkat kesiapan teknologi yang relatif tinggi. Oleh karena itu, pengukuran dalam penelitian ini difokuskan pada sejauh mana teknologi informasi benar-benar dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas, pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Kelurahan.

2.1.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada sejumlah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan dana kelurahan sebagai fokus utama, serta penelitian mengenai dana desa yang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang kemudian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Author	Judul, Jurnal, Vol, No, Thn, dan Web	Hasil Penelitian
1..	Sinta Suciana, C.Tri Widiastuti, Rita Meiriyanti (2025)	Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dombo Dengan Good Governance Sebagai Variabel Intervening, **Balance: Jurnal Akuntansi dan Manajemen, Vol. 4 (2).** https://jurnal.risetilmiah.ac.id/index.php/jam	a. Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan alokasi Dana Desa. b. *Good Governance* berhasil memediasi secara signifikan hubungan antara transparansi dan akuntabilitas dengan pengelolaan Dana Desa.
2.	Rifki Forisa Riofan Gandi, Maxion Sumtaky, Dyah Ani Pangastuti (2025)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Dana Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Intervening, **Jurnal Global Ilmiah Vol. 2, No. 5, Februari 2025.** https://www.researchgate.net/search	Hasil penelitian menunjukkan transparansi dan TI berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dengan akuntabilitas sebagai variabel mediasi. Ini menunjukkan adanya peran variabel moderasi dalam hubungan X dan

No.	Author	Judul, Jurnal, Vol, No, Thn, dan Web	Hasil Penelitian
			Y.
3.	Nurfani Salasa, Muhsin N. Bailusy,Suratno Amiro (2024)	Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur, **Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis Kewirausahaan Vol. 11, No. 2**https://univ45sby.ac.id/ejournal/index.php/ekonomika	a. secara parsial transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa b. akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa c. secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa.
4.	Rahma Yulita, Nurlailah, Nunung Apriani, Sri Dewi Fitrianingsih (2023)	Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan Di Kecamatan Palu Timur, Jurnal: **Kolaboratif Sains, Vol. 6 No. 12, Desember 2023, hlm.1975–1982.** https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/jks	Akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan kelurahan di Kecamatan Palu Timur.
5.	Axl Christopher Djamiraga, Tituk Diah Widajantie (2022)	Pengaruh Kompetensi Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Pada Kelurahan Di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, **Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Volume 4 No. 11 2022.** https://www.researchgate.net/search	Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Kelurahan.
6.	Ulvia Juniarti, Biana Adha Inapty, Intan Rakhmawati (2022)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Labuhan Haji Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Intervening, **Jurnal Risma Vol. 2 No. 3 September 2022.** https://jurnal.fe.unram.ac.id	a. Kompetensi aparatur tidak berpengaruh terhadap efektivitas (secara langsung atau melalui TI). b. Partisipasi masyarakat dan pemanfaatan TI berpengaruh positif langsung terhadap efektivitas. c. Tidak ditemukan pengaruh mediasi X1/X2 → Y melalui TI).
7.	Agnes Mojo (2023)	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa, **Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi Vol. 12 No. 7https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/**	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, akuntabilitas berpengaruh positif terhadap efektivitas

No.	Author	Judul, Jurnal, Vol, No, Thn, dan Web	Hasil Penelitian
			pengelolaan Dana Desa. Hasil yang kedua bahwa Transparansi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa.

2.2. Kerangka Berpikir Konseptual

Kerangka berpikir konseptual merupakan alur berpikir yang menjelaskan hubungan antar konsep dalam penelitian. Konsep sendiri adalah pengelompokan fenomena yang sejenis dan bersifat abstrak, sehingga tidak dapat diamati secara langsung (Rangkuti dkk., 2022). Kerangka berpikir yang benar harus dapat menguraikan secara teoritis keterkaitan antar variabel. Lebih jelasnya, hubungan antar variabel independen dan dependen perlu dijabarkan secara teoritis. Begitu juga pada variabel moderator dan interveing, keterlibatan variabel tersebut perlu dijelaskan perlibatannya dalam penelitian (Sugiyono, 2023).

2.2.1. Pengaruh Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan

Transparansi berlandaskan kebebasan dalam memperoleh informasi dan hak dalam menuntut keterbukaan informasi (Mardiasmo, 2002). Transparansi tercermin dalam adanya kebijakan yang terbuka terhadap pengawasan publik, di mana seluruh aspek kebijakan pemerintah dapat diakses oleh masyarakat (Krina, 2003). Jika dilihat berdasarkan perspektif Teori Keagenan, transparansi berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang dapat meminimalkan terjadinya konflik kepentingan, di mana masyarakat sebagai *principal* memiliki posisi untuk mengawasi kinerja aparatur kelurahan sebagai *agent.* Hal ini didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh (Djamiraga & Widajantie, 2022) menunjukkan

bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan Dana Kelurahan. Sama halnya, dengan penelitian oleh (Mojo, 2023) yang membuktikan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa.

Penelitian lain oleh (Salasa dkk., 2024) menunjukan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap pengelolaan dana desa. Temuan yang sama dalam penelitian (Ashsifa dkk., 2023) menunjukkan pengaruh positif akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian yang dilakukan (Iskandar dkk., 2024) juga menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Meskipun beberapa penelitian tersebut secara spesifik berfokus pada pengelolaan Dana Desa, terdapat kesamaan antara Dana Desa dan Dana Kelurahan dalam hal pengelolaannya yang menuntut prinsip akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap regulasi. Temuan tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat keterbukaan informasi oleh pemerintah terhadap publik, maka semakin efektif pula pengelolaan sumber daya publik.

2.2.2. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan

Dalam oragnisasi pemerintahan, akuntabilitas publik dimaknai sebagai kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi dan melakukan pengungkapan *(disclosure)* (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas merupakan klasifikasi dasar dalam upaya pencegahan penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan bahwa pelaksanaan kekuasaan diarahkan untuk mencapai tujuan

nasional secara efisien, efektif, jujur, dan bertanggungjawab (Edowai dkk., 2021). Hal ini didukung penelitian (Mojo, 2023) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan Dana Desa. Selanjutnya penelitian oleh (Salasa dkk., 2024) menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap pengelolaan dana desa.

Ditemukan hasil yang sama dalam penelitian (Ashsifa dkk., 2023) menunjukkan pengaruh positif akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan (Iskandar dkk., 2024) juga menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Kemudian penelitian (Tangdilintin dkk., 2025) juga menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian di atas menggambarkan bahwa pemerintah telah melaksanakan tanggung jawab pengelolaan dana secara memadai melalui penerapan prinsip akuntabilitas, sehingga pengelolaan dana publik dapat berjalan secara efektif.

2.2.3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Memoderasi Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapakan dari penggunaan sistem informasi dalam pelaksanaan tugas. Pengukurannya berasarkan intensitas pemanfaatan, frekuensi pemanfaatan, dan jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan (Thompson *et al*., 1991). Seiring

perkembangan teknologi, perangkat keras dan perangkat lunak komputer mengalami kemajuan pesat sehingga pemrosesan informasi menjadi lebih cepat dan fleksibel yang memungkinkan organisasi publik memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan keuangan dan pelayanan publik secara lebih efektif (Insawan & Alwahidin, 2021).

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, mengharuskan pemerintah daerah untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah, dan penyaluran informasi terhadap publik. Pemanfaatan teknologi informasi dapat menjembatani prinsip transparansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Transparansi tidak hanya sebabatas keterbukaan informasi, melainkan kemudahaan dalam mengakses informasi itu sendiri.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Kusrawan, 2019) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transparansi keduanya mempengaruhi secara positif terhadap akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Didukung penelitian oleh (Supartini dkk., 2025) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan variabel yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap pengelolaan dana desa dibandingkan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Adapun dalam penelitian (Safrizal, 2024) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan desa. Mengingat dana desa/kelurahan merupakan bagian dari pengelolaan keuangan desa, khususnya dalam laporan realisasi anggaran.

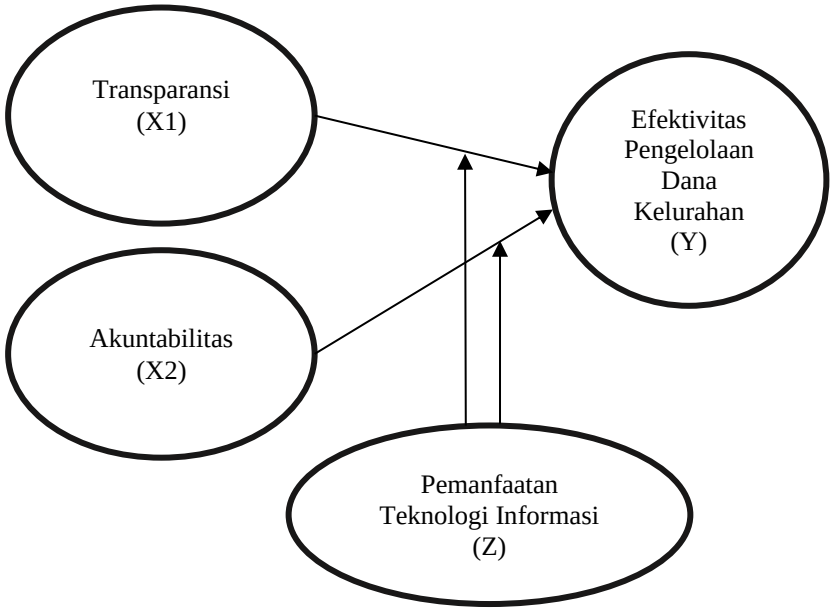
Penelitian (Rahmat dkk., 2025) menunjukkan bahwa teknologi informasi memberikan kontribusi positif terhadap transparansi dalam pengelolaan dana desa, dengan memanfaatkan perangkat komputer dan aplikasi khusus untuk pelaporan keuangan. Berdasarkan temuan (Haris, 2025), pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai faktor yang memperkuat transparansi dalam pengelolaan dana publik. Dengan demikian pemanfaatan teknologi tidak hanya mendukung implementasi prinsip transparansi, tetapi juga berperan sebagai sarana dalam meningkatkan kualitas pertanggungjawaban terhadap publik. Temuan dari hasil penelitian tersebut dapat disesuaikan dalam konteks pengelolaan Dana Kelurahan, mengingat adanya kesamaan tujuan serta prinsip pengelolaan dana publik.

2.2.4. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Memoderasi Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan

Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah tingkat penggunaan teknologi oleh individu untuk mendukung tugas, pengambilan keputusan, dan peningkatan kinerja, yang dipengaruhi oleh faktor kognitif, afektif, sosial, dan kondisi lingkungan yang memfasilitasi penggunaan teknologi (Thompson *et al*., 1991). Penggunaan teknologi informasi yang efektif selanjutnya dapat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi (Rachmawaty, 2014). Penelitian terdahulu oleh (Kusrawan, 2019) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa. Penelitian (Octavia dkk., 2023) membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan dalam

meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Temuan oleh (Indraswari & Rahayu, 2021) juga mengemukakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berkontribusi positif dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan temuan penelitian oleh (Ariasih dkk., 2024) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, yang selanjutnya dibuktikan dengan adanya pengaruh positif dan signifikan dengan nilai signifikansi 0,032 < 0,05. Kemudian, penelitian oleh (Maharani & Susanto, 2021) juga menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi dapat memengaruhi secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan nilai p-value sebesar 0,009 (<0,05). Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa teknologi informasi berperan penting daam mendukung prinsip *good governance*, khususnya transparansi dan akuntabilitas. Maka, pemanfaatan teknologi informasi diposisikan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh baik transparansi dan akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.3. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara dari rumusan masalah dan disusun berdasarkan teori yang relevan dan belum didasarkan oleh data empiris, sehingga perlu diuji kebenarannya (Sugiyono, 2023). Berdasarkan kerangka berpikir tersebut selanjutnya disusun hipotesis sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan Dana Kelurahan.
2. Terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan Dana Kelurahan.
3. Pemanfaatan teknologi informasi memoderasi pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan Dana Kelurahan.
4. Pemanfaatan teknologi informasi memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan Dana Kelurahan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Kuantitatif dikenal sebagai jenis penelitian tradisional yang berlandaskan pada filsafat positivisme (positivistik), sehingga menempatkan penelitian sebagai proses ilmiah yang menekankan pada pengamatan empiris (Sugiyono, 2023). Berdasarkan tujuan dan hubungan antar variabel yang diteliti, desain penelitian yang digunakan adalah desain kausal asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei, yang dilakukan dengan menyebarkan angket kepada responden yang telah ditentukan sesuai dengan kriteria penelitian.

3.2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan pedoman dalam mengukur sebuah variabel. Dengan membuat tabel definisi operasional, berarti peneliti telah menetukan jenis dan jumlah indikator yang akan digunakan, sehingga ruang lingkup jawaban responden terkait pendapat, pengalaman, maupun pandangan menjadi lebih terarah dan terbatas (Rangkuti dkk., 2022). Definisi operasional disusun menggunakan istilah-istilah yang bersifat konkret dan spesifik, bukan dalam bentuk definisi yang abstrak atau konseptual (Creswell, 2023). Dengan demikian, berikut disajikan penjabaran masing-masing varibabel dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi operasional	Indikator	Skala
1.	Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan (Y)	Efektivitas pengelolaan Dana Kelurahan adalah bentuk keseuaian dalam terlaksananya program untuk mengoptimalkan pembangunan dan pemberdayaan masyrakat, dengan mengacu pada regulasi dan prinsip *good governance* sebagai mekanisme pendukung guna tercapainya pengelolaan dan penggunaan dana kelurahan yang efektif.	1. Penganggaran. 2. Pelaksanaan anggaran. 3. Penatausahaan dan pertanggungjawaban. 4. Pembinaan dan Pengawasan 5. Pelaksanaan musrembangkel 6. Perlibatan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan. Pemendagri No. 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan dan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 37 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	Ordinal
2.	Transparansi (X1)	Transparansi merupakan bentuk keterbukaan informasi dan kemudahan dalam mengakses informasi terkait pengelolaan dana kelurahan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban oleh aparatur kelurahan kepada masyarakat.	1. Penyediaan informasi yang jelas mengenai prosedur, biaya, dan tanggung jawab 2. Kemudahan akses informasi 3. Sistem transparansi kebijakan anggaran 4. Ketepatan waktu dalam pelaporan pertanggungjawaban. (Krina, 2003) dan (Yanti, 2020)	Ordinal
3.	Akuntabilitas (X2)	Akuntabilitas merupakan kewajiban aparatur kelurahan untuk mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan atas segala aktivitas yang pendanaannya bersumber dari Dana Kelurahan.	1. Penghindaran penyalahgunaan jabatan. 2. Ketaatan terhadap hukum. 3. Proses dan pertanggungjawaban anggaran. 4. Pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan minim anggaran. 5. Pertimbangan tujuan dapat tercapai atau tidak dan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. (Mardiasmo, 2002)	Ordinal
4.	Pemanfaatan Teknologi Informasi (Z)	Pemanfaatan teknologi informasi merupakan upaya dalam mengoptimalkan	1. Intensitas pemanfaatan 2. Frekuensi pemanfaatan 3. Perangkat lunak yang	Ordinal

No	Variabel	Definisi operasional	Indikator	Skala
		penggunaan perangkat lunak komputer sebagai alat untuk meningkatkan keakuratan, ketepatan waktu, dan kemudahan dalam memverifikasi informasi terkait pengelolaan Dana Kelurahan.	digunakan (Thompson *et al*., 1991)	

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kelurahan pada wilayah Kecamatan Medan Timur sebanyak 11 kelurahan.

3.3.2. Waktu Penelitian

Tabel 3.2 Rencana Waktu Penelitian

No.	Jenis Kegiatan	Tahun 2026																							
		Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■																							
2.	Penyusunan Proposal		■	■	■																				
3.	Bimbingan Proposal					■	■																		
4.	Seminar Proposal								■																
5.	Penyusunan Tugas Akhir									■	■	■	■	■	■	■									
6.	Bimbingsn Tugas Akhir																■	■	■	■	■				
7.	Sidang Meja Hijau																						■		

3.4. Teknik Pengambilan Sampel

3.4.1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang mencakup obyek atau

subyek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu sebagaimana ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi tidak terbatas pada individu, tetapi juga dapat berupa obyek maupun seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subyek dan obyek tersebut (Sugiyono, 2023). Satu individu bahkan dapat dijadikan sebagai populasi penelitian karena dalam dirinya terdapat berbagai karakteristik, misalnya gaya bicara, tingkat kedisiplinan, minat, cara berinteraksi, gaya kepemimpinan dan lain-lain (Sugiyono, 2013). Berdasarkan fokus permasalahan penelitian, populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Medan Timur, yaitu sebanyak 11 kelurahan.

3.4.2. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang dipilih melalui teknik sampling tertentu sehingga dapat mewakili karakteristik populasi (Darwin dkk., 2021). Dalam penelitian kuantitatif, sampel merupakan bagian dari populasi yang merepresentasikan karakteristik tertentu. Ketika populasi berjumlah besar dan tidak memungkinkan untuk diteliti secara keseluruhan karena keterbatasan sumber daya, peneliti dapat menggunakan sampel untuk mewakili populasi (Sugiyono, 2023). Terdapat 2 bagian dari teknik sampling, yaitu *probability sampling* dan *nonprobability sampling* (Creswell, 2014).

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *nonprobability sampling. Nonprobability sampling* Merupakan teknik penentuan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih sebagai responden (Sugiyono, 2013). Khususnya dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik

penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu, di mana responden dipilih karena memiliki kompetensi, pengalaman, atau keterlibatan langsung yang relevan dengan fokus penelitian (Sugiyono, 2023). Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini yaitu 11 kelurahan, dari masing-masing kelurahan menggunakan 4 orang responden dengan total 44 responden. Adapun responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria berikut: (1) Lurah, (2) Sekretaris Lurah, (3) Kasi, dan (4) Bendahara.

Alasan pemilihan responden dalam penelitian ini adalah didasarkan pada peran strukturalnya. Pertama, pemilihan lurah sebagai responden dengan mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan kelurahan yang menetapkan lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan, hal ini sejalan dengan Pasal 30 Ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Bagian Kedua tentang Pedoman Kelurahan. Kedua, sekretaris kelurahan dipilih sebagai responden karena mimiliki fungsi koordinatif dalam administrasi di tingkat kelurahan sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu yang ditunjuk oleh Lurah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018 Pasal 12 ayat (2). Dukungan administratif tersebut berupa penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pendanaan kelurahan. Ketiga, kepala seksi dipilih sebagai responden yang berperan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai dengan bidang penugasan yang dimilikinya. Keempat, bendahara dipilih sebagai responden yang ditetapkan sebagai bendahara pengeluaran

pembantu di kelurahan yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan, pencatatan, serta pelaporan keuangan dana kelurahan.

Tabel 3.3 Sampel Lokasi Penelitian

No	Daftar Kelurahan
1.	Kelurahan Gang Buntu
2.	Kelurahan Sidodadi
3.	Kelurahan Durian
4.	Kelurahan Gaharu
5.	Kelurahan Glugur Darat I
6.	Kelurahan Glugur Darat II
7.	Kelurahan PB. Darat I
8.	Kelurahan PB. Darat II
9.	Kelurahan PB. Bengkel
10.	Kelurahan PB. Bengkel Baru
11.	Kelurahan Perintis

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan serangkaian prosedur yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian (Darwin dkk., 2021). Dalam penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data utama yang digunakan adalah kuesioner/angket (Sugiyono, 2013). Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menyusun dan menyampaikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk memperoleh jawaban sesuai dengan tujuan penelitian (Syafina & Harahap, 2019). Adapun jenis angket yang digunakan adalah angket tertutup. Angket tertutup merupakan instrumen pengumpulan data yang disusun dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan dengan alternatif jawaban yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam angket ini, responden tidak memberikan jawaban secara bebas, melainkan memilih jawaban yang paling sesuai dengan kondisi,

pengalaman, serta penilaian pribadi mereka berdasarkan pemikiran dan pendapat masing-masing (Darwin dkk., 2021).

3.5.1. Uji Instrumen Penelitian

Uji kualitas data atau uji instrumen data merupakan tahapan pengujian yang wajib dilakukan dalam penelitian yang menggunakna instrumen kuesioner. Dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki tingkat keandalan dan keabsahan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Salah satu skala pengukuran yang umum digunakan dalam menyusun sebuah angket adalah skala ordinal, yang dikenal sebagai skala item (Syafina & Harahap, 2019). Dalam pengukuran variabel menggunakan skala Likert lima tingkat, yang terdiri atas pilihan jawaban Sangat Baik (SB)/Sangat Memadai (SM), Baik (B)/Memadai (M), Cukup Baik (CB)/ Cukup Memadai (CM), Kurang Baik (KB)/ Kurang Memadai (KM), dan Tidak Baik (TB)/ Tidak Memadai (TM). Dari masing-masing kategori jawaban diberikan skor sebagai berikut:

Tabel 3.4 Skor Skala Likert

No.	Jawaban	Skor
1.	Sangat Baik (SB) / Sangat Memadai (SM)	5
2.	Baik (B) / Memadai (M)	4
3.	Cukup Baik (CB) / Cukup Memadai (CM)	3
4.	Kurang Baik (KB) / Kurang Memadai (KM)	2
5.	Tidak Baik (TB) / Tidak Memadai (TM)	1

Sumber: Sugiyono (2013)

Skala LIKERT dikategorikan sebagai skala ordinal karena setiap pilihan jawaban menunjukkan urutan tingkat preferensi. Pernyataan sangat baik memberikan skor yang lebih tinggi dibandingkan baik, sedangkan baik berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada cukup baik (Syafina & Harahap, 2019).

3.5.1.1. Uji Validitas

Uji validitas bertujuan untuk menilai tingkat ketepatan hasil penelitian

dalam mencerminkan kondisi yang sebenarnya, sehingga instrumen tetap menghasilkan temuan yang akurat meskipun digunakan pada responden yang berbeda (Syafina & Harahap, 2019). Dalam SEM-PLS, pengujian validitas pada model pengukuran reflektif diawali dengan mengevaluasi *indicator reliability* melalui nilai *outer loading*. Nilai *outer loading* menunjukkan seberapa kuat suatu indikator merepresentasikan variabel yang diukur. Suatu indikator dinyatakan layak apabila memiliki nilai *outer loading* > 0,70, yang menunjukkan bahwa indikator mampu menjelaskan lebih dari 50% varians dari variabel yang diukur (Hair *et al*., 2022). Indikator dengan *outer loading* di bawah 0,70 tidak serta-merta harus dieliminasi, melainkan perlu dievaluasi dampaknya terhadap *Composite Reliability* dan validitas isi konstruk. Indikator dengan *outer loading* antara 0,40 hingga 0,70 baru dipertimbangkan untuk dihapus apabila penghapusannya terbukti meningkatkan nilai *Composite Reliability* atau AVE melampaui ambang batas yang disarankan (J. F. Hair *et al*., 2014).

Dalam SEM-PLS ada 2 tahap uji selain validitas konvergen, yaitu validitas. Diskriminan. Dalam penelitian ini, validitas diskriminan diuji menggunakan pendekatan *Heterotrait-Monotrait Ratio of Correlation* (HTMT) yang dinilai lebih baik dibandingkan metode *Fornell-Larcker* dalam membedakan antar konstruk. Nilai HTMT yang tinggi menunjukkan adanya masalah validitas diskriminan. Batas yang digunakan umumnya < 0,90 untuk konstruk yang mirip dan < 0,85 untuk konstruk yang berbeda. Selain itu, pengujian dapat diperkuat melalui bootstrapping dengan melihat apakah batas atas interval kepercayaan berada di bawah nilai ambang yang ditentukan (Hair *et al*., 2019).

3.5.1.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan pengujian yang bertujuan untuk menilai tingkat konsistensi jawaban yang diberikan oleh responden terhadap instrumen penelitian. Reliabilitas dinyatakan dalam bentuk koefisien tertentu, di mana semakin tinggi nilai koefisien yang dihasilkan maka semakin tinggi pula tingkat konsistensi dan keandalan jawaban responden (Sahir, 2021). Uji reliabilitas dilakukan pada pertanyaan yang telah dinyatakan valid (Syafina & Harahap, 2019).

Dalam menggunakan SEM-PLS, realibilitas internal dievaluasi menggunakan *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* (CR). *Cronbach's Alpha* digunakan sebagai ukuran reliabilitas yang bersifat konservatif karena mengasumsikan bahwa seluruh indikator memiliki tingkat keandalan yang sama. Sementara *Composite Reliability* dianggap lebih sesuai dalam SEM-PLS karena memperhitungkan perbedaan kontribusi masing-masing indikator terhadap variabel yang diukur. Suatu variabel dinyatakan memiliki reliabilitas yang baik apabila nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60 dan nilai *Composite Reliability* > 0,70. Nilai reliabilitas yang terlalu tinggi (di atas 0,90) tidak dianjurkan karena dapat mengarah pada indikator yang bersifat berulang atau mengukur hal yang sama secara berlebihan, sehingga dapat mengurangi kualitas pengukuran (Hair *et al.*, 2022).

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif terdiri atas statistik deskriptif dan statistik inferensial (Sugiyono, 2013). Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran awal mengenai data penelitian tanpa melakukan generalisasi, seperti nilai rata-rata, nilai minimum dan maksimum, serta standar deviasi pada setiap variabel. Sementara itu, statistik inferensial digunakan untuk

menganalisis hubungan dan pengaruh antar variabel serta menarik kesimpulan berdasarkan data sampel terhadap populasi yang lebih luas (Sahir, 2021).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Structural Equation Modeling-Partial Least Square* (SEM-PLS). Tahap awal analisis dilakukan dengan menguji model pengukuran untuk memastikan bahwa indikator yang digunakan telah memenuhi kriteria validitas dan realibilitas (Hair *et al*., 2022).

3.6.1. Metode Analisis Deskriptif

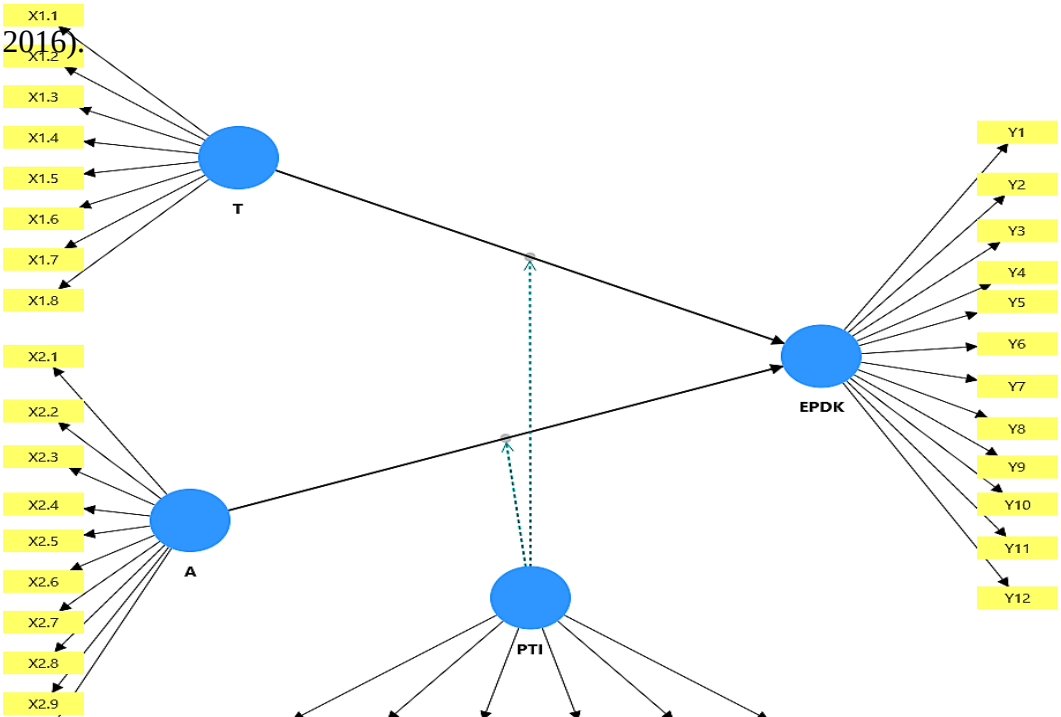
Analisis data pada penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, yang merupakan metode pengolahan data yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik data yang telah dikumpulan dari sampel atau populasi. Analisis statistik deskriptif mencakup pengukuran nilai pemusatan dan penyebaran data seperti mean, median, modus, kuartil, varians, dan standar deviasi (Darwin dkk., 2021). Dalam penelitian ini, analisis deskriptif dilakukan dengan menyajikan nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, median, dan standar deviasi dari setiap variabel. Alasan pemilihan statistik ini dikarenakan dapat memberikan gambaran umum mengenai kecenderungan jawaban responden, rentang data, serta tingkat penyebaran data.

3.6.2. SEM-PLS (*Structural Equation Modeling - Partial Least Square*)

Structural Equation Modeling (SEM) merupakan metode analisis statistik multivariat generasi kedua yang digunakan untuk menganalisis hubungan yang kompleks antara variabel laten dan variabel manifes secara simultan. SEM dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan metode statistik generasi pertama seperti regresi dan ANOVA yang hanya mampu menganalisis hubungan

sederhana, menggunakan variabel yang dapat diamati secara langsung, serta mengabaikan adanya kesalahan pengukuran. Dalam SEM, variabel penelitian umumnya bersifat laten dan diukur secara tidak langsung melalui beberapa indikator, sehingga metode ini mampu memperhitungkan kesalahan pengukuran dan menghasilkan estimasi hubungan antar variabel yang lebih akurat (Hair *et al*., 2021).

Partial Least Square (PLS) merupakan metode alternative dalam *Structural Equation Modeling* yang berfungsi untuk mengukur variabel yang sangat kompleks, distribusi data tidak normal, dan ukuran sampel data yang kecil yaitu <100. PLS berfungsi untuk menjelaskan ada tidaknya hubungan antara variabel (Setiaman, 2021). Evaluasi model dalam analisis PLS dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu evaluasi model pengukuran *(outer model)* dan evaluasi model struktural *(inner model)*. Evaluasi model pengukuran bertujuan untuk menilai kelayakan indikator dalam merepresentasikan konstruk yang diteliti, sedangkan evaluasi model struktural digunakan untuk menguji hubungan antar konstruk dalam model penelitian. Selanjutnya, evaluasi model pengukuran diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu model reflektif dan model formatif, sesuai dengan karakteristik hubungan antara konstruk dan indikatornya (Haryono, 2016).



Gambar 3.1 Model Persamaan Struktural PLS
Sumber: Smart PLS 4 (2026)

Keterangan:

X1: Transparansi (T)

X2: Akuntabilitas (A)

Y: Efektivitas Pengelolaan Dana Keurahan (EPDK)

Z: Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI)

3.6.2.1. Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Evaluasi outer model dilakukan untuk memastikan bahwa indikator-indikator yang digunakan mampu mengukur konstruk penelitian secara valid dan reliabel. Pada penelitian ini, model pengukuran yang digunakan adalah model reflektif, sehingga evaluasi dilakukan melalui pengujian reliabilitas indikator, reliabilitas konstruk, serta validitas konstruk (Haryono, 2016).

1. Validitas Konvergen *(Convergent Validity)*

   Suatu indikator dinyatakan valid apabila nilai outer loading-nya berada di atas 0,70, yang mengindikasikan bahwa indikator tersebut mampu menjelaskan lebih dari 50% varians konstruk yang diukur. Validitas konvergen juga dinilai menggunakan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) yang menunjukkan seberapa besar varians indikator dapat dijelaskan oleh konstruk laten. Nilai AVE > 0,50 menunjukkan bahwa konstruk mampu menjelaskan lebih dari

setengah varians indikator-indikatornya, sehingga memenuhi kriteria validitas konvergen yang baik (Hair *et al*., 2022).

2. Validitas Diskriminan *(Discriminant Validity)*

   Validitas diskriminan diuji menggunakan kriteria *Fornell Larcker*, yaitu dengan membandingkan nilai akar kuadrat AVE suatu variabel dengan hubungan variabel tersebut terhadap variabel lain. Suatu variabel dinyatakan memiliki validitas diskriminan yang baik apabila hubungan variabel tersebut dengan indikator-indikatornya sendiri lebih kuat dibandingkan hubungannya dengan variabel lain dalam model penelitian. Selain itu, validitas diskriminan juga dapat dilihat melalui nilai cross loading, yaitu indikator harus memiliki korelasi tertinggi dengan konstruk yang diukurnya dibandingkan dengan konstruk lainnya.

3. Reliabilitas Indikator *(Indicator Reliability)*

   Reliabilitas indikator dinilai melalui nilai outer loading *(loading factor)* yang menunjukkan hubungan antara indikator dengan konstruk yang diukurnya. Nilai *loading factor* > 0,70 menunjukkan indikator yang ideal, namun nilai > 0,50 masih dapat diterima dalam penelitian sosial.

4. Reliabilitas Konstruk *(Internal Consistency Reliability)*

   Reliabilitas konstruk dievaluasi menggunakan nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* (CR). *Composite Reliability* dianggap lebih tepat dalam SEM-PLS karena tidak mengasumsikan kesamaan kontribusi setiap indikator. Suatu konstruk dinyatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability > 0,70, sedangkan nilai > 0,80 menunjukkan tingkat reliabilitas yang sangat baik.

3.6.2.2. Evaluasi Model Struktural (*Inner Model)*

Model struktural bertujuan untuk menguji hubungan dan pengaruh antar variabel laten serta menguji hipotesis penelitian yang telah dirumuskan (Hair *et al*., 2014). Evaluasi model struktural *(inner model)* dilakukan untuk menilai kemampuan model dalam menjelaskan hubungan antar konstruk laten. Tahap ini mencakup pengujian koefisien determinasi (R^2), ukuran efek (f^2), dan predictive relevance (Q^2) (Haryono, 2016).

1. Koefisien Determinasi (R^2)

   Nilai R^2 menunjukkan seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 sebesar 0,75 menunjukkan model kuat, 0,50 sedang, dan 0,25. Nilai R^2 yang terlalu tinggi dapat mengindikasikan bahwa model mengalami *overfitting* terhadap data (Hair *et al*., 2021).

2. Ukuran Efek (f^2)

   Effect size (f^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen dengan melihat perubahan nilai R^2 ketika variabel tersebut dikeluarkan dari model. Dalam menafsirkan *Effect size* pada variabel interaksi *(interaction term)*, nilai *cutoff* f^2 yang umum digunakan tidak dapat diterapkan. Sebagai alternatif, *Effect size* interaksi dapat dikategorikan sebagai kecil, sedang, dan besar apabila nilai f^2 masing-masing sebesar 0,005, 0,01, dan 0,025 (Hair *et al*., 2021).

3. *Predictive Relevance* (Q^2)

   Nilai Q^2 diperoleh melalui prosedur *blindfolding*, yaitu teknik pengujian dengan menghilangkan sebagian data secara sistematis dan kemudian

membandingkan hasil prediksi model terhadap data yang dihilangkan tersebut. Nilai $Q^2 > 0$ menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediktif yang baik, sedangkan nilai Q^2 yang sama dengan atau kurang dari nol menunjukkan bahwa model tidak mampu memprediksi dengan baik (Hair *et al*., 2014).

3.6.3. Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan teknik *Struktural Equation Model* (SEM) melalui pendekatan *Partial Least Square* dengan bantuan *software* SmartPLS 4. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakna prosedur *bootstrapping* untuk memperoleh nilai t-*statistic* dan p-*value*. Signifikansi hubungan antar konstruk laten ditentukan berdasarkan hasil melalui proses *bootstrapping* tersebut (Garson, 2016). Untuk menguji hubungan antar variabel laten dilakukan dengan melihat nilai koefisien jalur *(path coefficient)* yang menunjukkan arah dan kekuatan pengaruh antar konstruk. Signifikansi pengaruh antar variabel dinilai berdasarkan nilai *t-statistic* atau *p-value* yang dihasilkan dari proses *bootstrapping*. Hipotesis dinyatakan diterima apabila nilai t-statistic > 1,96 atau p-value < 0,05 (Haryono, 2016).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran angket tertutup menggunakan media *google forms*. Instrumen penelitian terdiri atas 12 item pertanyaan untuk variabel efektivitas pengelolaan dana kelurahan (Y), 8 item untuk variabel transparansi (X1), 10 item untuk variabel akuntabilitas (X2), dan 6 item untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi (Z). Sampel penelitian ditentukan dengan mengambil 4 perangkat kelurahan dari 11 kelurahan, sehingga total responden berjumlah 44 orang. Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan *outer loading*, beberapa item dengan nilai di bawah kriteria > 0,70 dieliminasi sehingga hanya item yang memenuhi kriteria yang dapat digunakan.

4.1.2. Karakteristik Responden

Berikut penyajian data berdasarkan karakteristik responden yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai profil responden yang menjadi sampel penelitian, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Laki-laki	19	43%
2.	Perempuan	25	57%
Total		44	100%

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan tabel 4.1, responden dalam penelitian ini terdiri dari 19 orang laki laki dengan persentase sebesar 43% dan 25 orang perempuan dengan

persentase 57%, sehingga dapat diketahui bahwa mayoritas responden adalah perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perempuan cukup dominan dalam aktivitas pemerintahan di tingkat kelurahan, khususnya dalam pengelolaan administrasi dan keuangan.

Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	D3	4	9%
2.	S1	35	80%
3.	S2	5	11%
Total		44	100%

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan tingkat pendidikan, responden dalam penelitian ini didominasi oleh lulusan S1 sebanyak 35 orang 80%, diikuti oleh lulusan S2 sebanyak 5 orang 11%, dan lulusan D3 sebanyak 4 orang 9%. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki latar belakang pendidikan pada jenjang sarjana.

Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan Periode Bekerja

No.	Lama Bekerja di Kelurahan	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	1-5 Tahun	30	68%
2.	5-10 Tahun	10	23%
3.	> 10 Tahun	4	9%
Total		44	100%

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Dari Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini didominasi oleh masa kerja 1–5 tahun sebanyak 30 orang 68%. Selanjutnya, responden dengan masa kerja 5–10 tahun sebanyak 10 orang 23%, dan masa kerja lebih dari 10 tahun sebanyak 4 orang 9%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki masa kerja yang relatif singkat.

Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Lurah	11	25%

No.	Jabatan	Frekuensi (F)	Persentase (%)
2.	Sekretaris Lurah	11	25%
3.	Kepala Seksi	11	25%
4.	Bendahara	11	25%
Total		44	100%

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Dari Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa jumlah responden berdasarkan jabatan terdiri dari Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Seksi, dan Bendahara yang masing-masing berjumlah 11 orang 25%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah responden pada setiap jabatan memiliki proporsi yang sama, sesuai dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4.5 Distribusi Responden Berdasarkan Periode Jabatan

No.	Lama Bekerja di Jabatan	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	1-5 Tahun	34	77%
2.	5-10 Tahun	8	18%
3.	> 10 Tahun	1	2%
4.	Kurang dari 1 Tahun	1	2%
Total		44	100%

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Dari Tabel 4.5 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki masa kerja dalam jabatan selama 1–5 tahun, yaitu sebanyak 34 orang 77%. Sementara itu, responden dengan masa kerja 5–10 tahun sebanyak 8 orang 18%, lebih dari 10 tahun sebanyak 1 orang 2%, dan kurang dari 1 tahun sebanyak 1 orang 2%.

Tabel 4.6 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Perangkat Lunak

No.	Jenis Perangkat Lunak	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Laptop	18	41%
2.	Komputer/PC	20	45%
3.	Komputer/PC, Laptop	6	14%
Total		44	100%

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 4.6 adapun data jenis perangkat yang digunakan responden dalam menunjang pekerjaan sehari-hari terbagi ke dalam tiga

kelompok. Sebagian besar responden menggunakan komputer/PC, yakni sebanyak 20 orang 45%. Kelompok berikutnya adalah pengguna laptop yang berjumlah 18 orang 41%, sedangkan responden yang menggunakan kombinasi komputer/PC dan laptop berjumlah 6 orang 14%.

Tabel 4.7 Distribusi Responden Berdasarkan Pengalaman Penggunaan Perangkat Lunak

No.	Umur Perangkat Lunak	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	1-5 Tahun	32	73%
2.	5-10 Tahun	10	23%
3.	> 10 Tahun	2	5%
Total		44	100%

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dilihat pengalaman responden dalam memanfaatkan perangkat lunak sebagai penunjang pekerjaan menunjukkan distribusi yang cukup variatif. Responden sebanyak 32 orang atau setara dengan 73%, telah memiliki pengalaman antara satu hingga lima tahun. Kelompok berikutnya adalah responden dengan pengalaman lima hingga sepuluh tahun, yang berjumlah 10 orang atau sebesar 23%. Adapun responden dengan pengalaman lebih dari sepuluh tahun hanya berjumlah 2 orang, atau sekitar 5% dari keseluruhan sampel.

4.1.3. Deskripsi Variabel Penelitian

Penelitian ini melibatkan empat variabel, yaitu Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan (Y), Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (Z) sebagai variabel moderasi. Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Data interval dari skala Likert dapat dianalisis dengan menghitung rata-rata jawaban berdasarkan penskoran setiap jawaban responden (Sugiyono, 2023). Selain itu, statistik deskriptif mencakup perhitungan modus, median, dan mean sebagai ukuran tendensi sentral yang

digunakan untuk menggambarkan data sebagaimana adanya. Untuk menginterpretasikan nilai rata-rata tersebut, digunakan perhitungan rentang interval sebagai berikut:

$$Rentang\ Skor = \frac{Skor\ Maksimum - Skor\ Minimum}{Jumlah\ Kategori}$$

$$Rentang\ Skor = \frac{5-1}{5} = 0{,}80$$

Berdasarkan hasil perhitungan rentang interval tersebut, pedoman kategorisasi rata-rata skor dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.8 Pedoman Kategorisasi Rata-rata Skor Jawaban Responden

Interval Kuesioner	Kategori
4,21-5,00	Sangat Baik (SB)/Sangat Memadai
3,41-4,20	Baik (B)/Memadai (M)
2,61-3,40	Cukup Baik (CB)/Cukup Memadai (CM)
1,81-2,60	Kurang Baik (KB)/Kurang Memadai (KM)
1,00-1,80	Tidak Baik (TB)/ Tidak Memadai (TM)

Interpretasi terhadap data yang diperoleh dilakukan berdasarkan pedoman kategorisasi rata-rata skor yang telah ditetapkan. Hasil tanggapan responden untuk setiap variabel penelitian disajikan pada masing-masing subbab berikut.

4.1.3.1. Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan (Y)

Variabel efektivitas pengelolaan dana kelurahan diukur menggunakan 12 butir pernyataan yang dikembangkan dari 6 indikator. Distribusi jawaban responden terhadap setiap butir pernyataan tersebut disajikan dalam tabel rekapitulasi berikut:

Tabel 4.9 Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden tentang Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan (Y)

No.	Pernyataan	Distribusi Tanggapan						Nilai Rata-rata	Kriteria
		SB	B	CB	KB	TB	Total		
		F	F	F	F	F			
Penganggaran								4,66	Sangat Baik
1.	Aparatur kelurahan menyusun	30	14	0	0	0	44	4,68	Sangat Baik

No.	Pernyataan	Distribusi Tanggapan						Nilai Rata-rata	Kriteria
		SB	B	CB	KB	TB	Total		
		F	F	F	F	F			
	anggaran Dana Kelurahan berdasarkan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.								
	Persentase	68,18	31,82	0	0	0	100		
2.	Aparatur kelurahan menetapkan kegiatan Dana Kelurahan sesuai hasil musrenbangkel.	28	16	0	0	0	44	4,64	Sangat Baik
	Persentase	63,64	36,36	0	0	0	100		
Pelaksanaan Anggaran								4,60	Sangat Baik
3.	Aparatur kelurahan melaksanakan kegiatan Dana Kelurahan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.	29	14	1	0	0	44	4,64	Sangat Baik
	Persentase	65,91	31,82	2,27	0	0	100		
4.	Aparatur kelurahan menggunakan Dana Kelurahan untuk kegiatan yang hasilnya dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.	25	19	0	0	0	44	4,57	Sangat Baik
	Persentase	56,82	43,18	0	0	0	100		
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban								4,57	Sangat Baik
5.	Aparatur kelurahan mencatat dan melaporkan penggunaan Dana Kelurahan secara lengkap dan tepat waktu.	25	19	0	0	0	44	4,57	Sangat Baik
	Persentase	56,82	43,18	0	0	0	100		
6.	Aparatur kelurahan menggunakan laporan pertanggungjawaban sebagai dasar evaluasi kegiatan Dana Kelurahan.	26	17	1	0	0	44	4,57	Sangat Baik
	Persentase	59,09	38,64	2,27	0	0	100		
Pembinaan dan Pengawasan								4,55	Sangat Baik
7.	Camat memberikan pembinaan kepada kelurahan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Kelurahan.	25	19	0	0	0	44	4,57	Sangat Baik
	Persentase	56,82	43,18	0	0	0	100		
8.	Inspektorat melakukan pengawasan terhadap	23	21	0	0	0	44	4,52	Sangat Baik

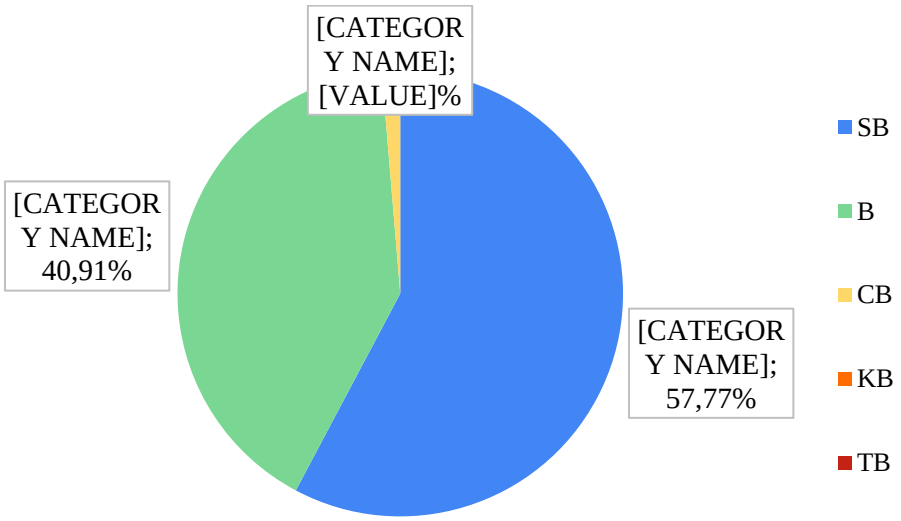
No.	Pernyataan	Distribusi Tanggapan						Nilai Rata-rata	Kriteria
		SB	B	CB	KB	TB	Total		
		F	F	F	F	F			
	pengelolaan Dana Kelurahan untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan.								
	Persentase	52,27	47,73	0	0	0	100		
Pelaksanaan Musrembangkel								4,55	Sangat Baik
9.	Aparatur kelurahan merealisasikan hasil musrenbangkel sebagai dasar penyusunan program Dana Kelurahan.	25	19	0	0	0	44	4,57	Sangat Baik
	Persentase	56,82	43,18	0	0	0	100		
10.	Aparatur kelurahan menindaklanjuti hasil musrenbangkel dalam pelaksanaan kegiatan Dana Kelurahan.	23	21	0	0	0	44	4,52	Sangat Baik
	Persentase	52,27	47,73	0	0	0	100		
Perlibatan Kelompok Masyarkat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan								4,47	Sangat Baik
11.	Aparatur kelurahan melibatkan masyarakat dalam perencanaan kegiatan Dana Kelurahan.	25	18	1	0	0	44	4,55	Sangat Baik
	Persentase	56,82	40,91	2,27	0	0	100		
12.	Aparatur kelurahan melibatkan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan Dana Kelurahan.	21	19	4	0	0	44	4,39	Sangat Baik
	Persentase	47,73	43,18	9,09	0	0	100		
Rata-rata		57,77	40,91	1,33	0	0	100	4,56	Sangat Baik

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa secara keseluruhan, rata-rata nilai untuk seluruh indikator variabel efektivitas pengelolaan dana kelurahan (Y) adalah 4,56 yang tergolong dalam kategori sangat baik. Indikator penganggaran mencatat rata-rata tertinggi sebesar 4,66, diikuti indikator pelaksanaan anggaran sebesar 4,60. Indikator penatausahaan dan pertanggungjawaban serta pelaksanaan musrenbangkel masing-masing memperoleh rata-rata 4,57 dan 4,55, sedangkan

indikator pembinaan dan pengawasan mencatat rata-rata 4,55. Adapun indikator pelibatan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan memperoleh rata-rata terendah sebesar 4,47, dengan pernyataan nomor 12 mencatat rata-rata 4,33 dan menjadi satu-satunya item yang mendapat respons cukup baik dari 4 responden 9,09%.

Distrbusi jawaban responden pada variabel efektivitas pengelolaan dana kelurahan secara visual disajikan pada Gambar 4.1 berikut:



Gambar 4.1 Persentase Jawaban Responden tentang Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan (Y)

Gambar 4.1 menunjukkan distribusi rata-rata jawaban responden terhadap variabel efektivitas pengelolaan dana kelurahan (Y). Sebesar 57,77% responden rata-rata memberikan penilaian sangat baik, 40,91% baik, dan 1,33% cukup baik. Penilaian sangat baik menjadi kategori tertinggi, yang menggambarkan persepsi positif responden terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan di Kecamatan Medan Timur.

4.1.3.2. Transparansi (X1)

Pengukuran variabel transparansi (X1) mencakup 8 butir pernyataan yang dijabarkan dari 4 indikator. Berikut disajikan rekapitulasi distribusi jawaban

responden terhadap setiap butir pernyataan dalam tabel berikut:

Tabel 4.10 Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden tentang Transparansi (X1)

No.	Pernyataan	Distribusi Tanggapan						Nilai Rata-rata	Kriteria
		SB	B	CB	KB	TB	Total		
		F	F	F	F	F			
Penyediaan informasi yang jelas mengenai prosedur, biaya, dan tanggung jawab								4,11	Baik
1.	Aparatur kelurahan menyediakan informasi mengenai prosedur penggunaan Dana Kelurahan melalui media yang mudah diakses seperti papan pengumuman/spanduk/website resmi.	13	27	4	0	0	44	4,20	Baik
	Persentase	29,55	61,36	9,09	0	0	100		
2.	Aparatur kelurahan mempublikasikan rincian anggaran dan realisasi belanja Dana Kelurahan kepada masyarakat.	8	29	7	0	0	44	4,02	Baik
	Persentase	18,18	65,91	15,91	0	0	100		
Kemudahan akses informasi								4,00	Baik
3.	Pihak kelurahan menyediakan informasi mengenai rencana penggunaan Dana Kelurahan melalui media yang dapat diakses masyarakat.	8	27	9	0	0	44	3,98	Baik
	Persentase	18,18	61,36	20,45	0	0	100		
4.	Pihak kelurahan memberikan akses bagi masyarakat untuk mengetahui realisasi fisik dan biaya kegiatan Dana Kelurahan.	10	25	9	0	0	44	4,02	Baik
	Persentase	22,73	56,82	20,45	0	0	100		
Sistem transparansi kebijakan anggaran								4,02	Baik
5.	Aparatur kelurahan mempublikasikan informasi mengenai alokasi anggaran Dana Kelurahan kepada masyarakat.	11	24	9	0	0	44	4,05	Baik
	Persentase	25,00	54,55	20,45	0	0	100		
6.	Aparatur kelurahan mengumumkan perubahan kebijakan anggaran Dana Kelurahan kepada masyarakat.	10	24	10	0	0	44	4,00	Baik
	Persentase	22,73	54,55	22,73	0	0	100		
Ketepatan waktu dalam pelaporan pertanggungjawaban								4,11	Sangat

No.	Pernyataan	Distribusi Tanggapan						Nilai Rata-rata	Kriteria
		SB	B	CB	KB	TB	Total		
		F	F	F	F	F			
									Baik
7.	Aparatur kelurahan menyampaikan laporan penggunaan Dana Kelurahan secara terbuka kepada pihak yang berkepentingan.	13	28	3	0	0	44	4,23	Sangat Baik
	Persentase	29,55	63,64	6,82	0	0	100		
8.	Aparatur kelurahan menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kelurahan kepada masyarakat pada setiap akhir semester.	10	24	10	0	0	44	4,00	Baik
	Persentase	22,73	54,55	22,73	0	0	100		
Rata-rata		23,58	59,09	17,33	0	0	100	4,06	Baik

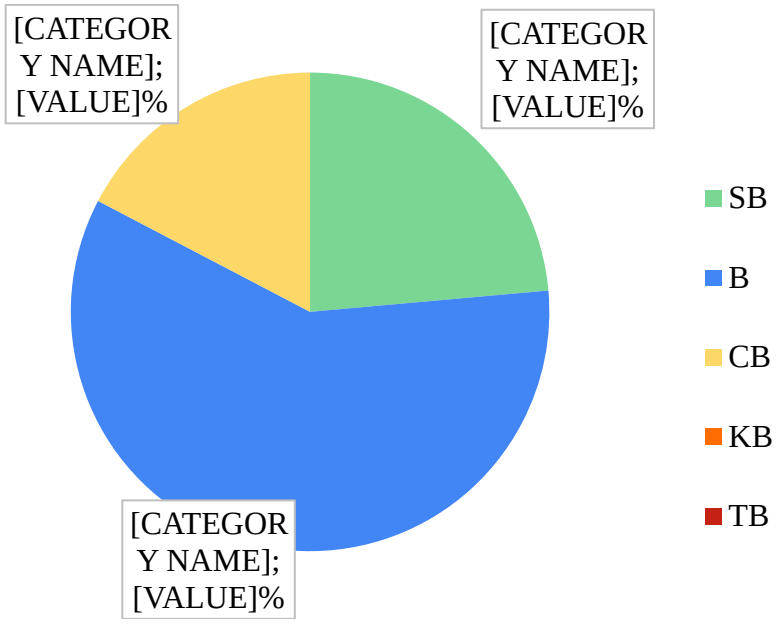
Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Data pada Tabel 4.10 menunjukkan bahwa rata-rata nilai untuk seluruh indikator variabel transparansi (X1) secara keseluruhan memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,06 yang tergolong dalam kategori baik. Indikator pertama, yaitu penyediaan informasi yang jelas mengenai prosedur, biaya, dan tanggung jawab memperoleh rata-rata sebesar 4,11 yang tergolong baik, dengan mayoritas responden pada kedua item menjawab baik. Indikator kedua, kemudahan akses informasi memperoleh rata-rata sebesar 4,00 yang tergolong baik. Pada indikator ini, proporsi jawaban cukup baik tercatat sebesar 20,45% pada masing-masing item, menjadikannya indikator dengan proporsi jawaban cukup baik tertinggi di antara seluruh indikator pada variabel ini.

Indikator ketiga, sistem transparansi kebijakan anggaran memperoleh rata-rata sebesar 4,02 yang tergolong baik, dengan mayoritas responden pada kedua item menjawab baik dengan proporsi masing-masing sebesar 54,55%. Adapun indikator keempat, ketepatan waktu dalam pelaporan pertanggungjawaban mencatat rata-rata tertinggi sebesar 4,11 yang tergolong sangat baik, dengan 13

responden 29,55% menyatakan sangat baik dan mayoritas 28 responden 63,64% menyatakan baik pada item pertama.

Adapun distribusi rata-rata jawaban responden terhadap variabel transparansi (X1) disajikan pada Gambar 4.2 bberikut:



Gambar 4.2 Distribusi Rata-rata Jawaban Responden tentang Transparansi (X1)

Gambar 4.2 menunjukkan distribusi rata-rata jawaban responden terhadap variabel transparansi sebesar 59,09% dengan kategori penilaian baik, sebesar 23,58% memberikan penilaian sangat baik, dan 17,33% memberikan penilaian cukup baik. Hasil ini menggambarkan bahwa rata-rata responden menilai transparansi pengelolaan dana kelurahan dalam kategori baik.

4.1.3.3. Akuntabilitas (X2)

Variabel akuntabilitas (X2) diukur menggunakan 10 butir pernyataan yang dikembangkan dari 5 indikator. Distribusi jawaban responden terhadap setiap butir pernyataan tersebut disajikan dalam tabel rekapitulasi berikut:

Tabel 4.11 Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden tentang Akuntabilitas (X2)

No.	Pernyataan	Distribusi Tanggapan						Nilai Rata-rata	Kriteria
		SB	B	CB	KB	TB	Total		
		F	F	F	F	F			
Penghindaran penyalahgunaan jabatan								4,60	Sangat Baik
1.	Aparatur kelurahan menggunakan kewenangan pengelolaan Dana Kelurahan sesuai tugas dan tanggung jawabnya.	28	15	1	0	0	44	4,61	Sangat Baik
	Persentase	63,64	34,09	2,27	0	0	100		
2.	Aparatur kelurahan melaksanakan seluruh kegiatan Dana Kelurahan murni berdasarkan rencana kerja yang telah disepakati tanpa kepentingan pribadi.	26	18	0	0	0	44	4,59	Sangat Baik
	Persentase	59,09	40,91	0	0	0	100		
Ketaatan terhadap hukum								4,59	Sangat Baik
3.	Aparatur kelurahan melaksanakan pengelolaan Dana Kelurahan sesuai peraturan dan perundang-undangan.	30	13	1	0	0	44	4,66	Sangat Baik
	Persentase	68,18	29,55	2,27	0	0	100		
4.	Aparatur kelurahan melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan standar harga dan prosedur yang berlaku.	25	18	0	1	0	44	4,52	Sangat Baik
	Persentase	56,82	40,91	0	2,27	0	100		
Proses dan pertanggungjawaban anggaran								4,60	Sangat Baik
5.	Aparatur kelurahan menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Kelurahan secara lengkap.	24	20	0	0	0	44	4,55	Sangat Baik
	Persentase	54,55	45,45	0	0	0	100		
6.	Aparatur kelurahan melakukan verifikasi internal terhadap laporan pertanggungjawaban sebelum diserahkan kepada pihak kecamatan.	29	15	0	0	0	44	4,66	Sangat Baik
	Persentase	65,91	34,09	0	0	0	100		
Pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan minim anggaran								4,43	Sangat Baik
7.	Aparatur kelurahan menindaklanjuti	18	19	7	0	0	44	4,25	Sangat Baik

No.	Pernyataan	Distribusi Tanggapan						Nilai Rata-rata	Kriteria
		SB	B	CB	KB	TB	Total		
		F	F	F	F	F			
	permohonan masyarakat terkait Dana Kelurahan sesuai prosedur yang berlaku.								
	Persentase	40,91	43,18	15,91	0	0	100		
8.	Aparatur kelurahan memastikan setiap rupiah Dana Kelurahan yang dibelanjakan memiliki bukti transaksi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.	27	17	0	0	0	44	4,61	Sangat Baik
	Persentase	61,36	38,64	0	0	0	100		
Pertimbangan tujuan dapat tercapai atau tidak dan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal								4,47	Sangat Baik
9.	Aparatur kelurahan menetapkan target capaian yang jelas pada setiap kegiatan Dana Kelurahan yang direncanakan.	22	21	1	0	0	44	4,48	Sangat Baik
	Persentase	50,00	47,73	2,27	0	0	100		
10.	Aparatur kelurahan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dana Kelurahan untuk menilai pencapaian tujuan.	21	22	1	0	0	44	4,45	Sangat Baik
	Persentase	47,73	50,00	2,27	0	0	100		
Rata-rata		56,82	40,45	2,50	0,23	0	100	4,54	Sangat Baik

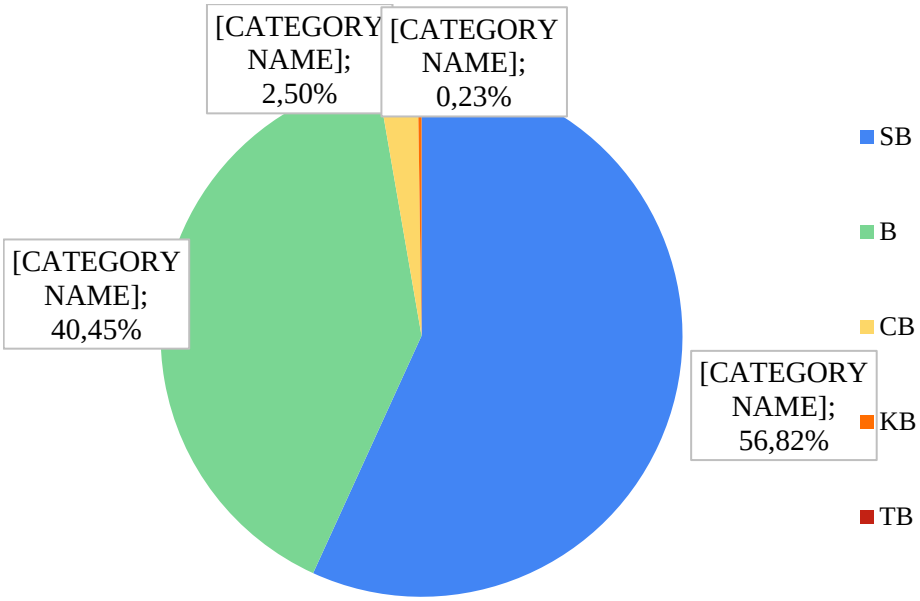
Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Data pada Tabel 4.11 menunjukkan bahwa rata-rata nilai untuk seluruh indikator variabel akuntabilitas (X2) memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,54 yang tergolong dalam kategori sangat baik. Di antara kelima indikator, penghindaran penyalahgunaan jabatan dan proses dan pertanggungjawaban anggaran masing-masing mencatat rata-rata tertinggi sebesar 4,60, diikuti indikator ketaatan terhadap hukum sebesar 4,59.

Adapun indikator pertimbangan tujuan dapat tercapai atau tidak dan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal memperoleh rata-rata 4,47. Indikator pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan minim anggaran mencatat

rata-rata terendah sebesar 4,43. Item pertama pada indikator ini memperoleh rata-rata 4,25 terendah di antara seluruh item pada variabel akuntabilitas. Satu catatan pada item nomor 4 mengenai pengadaan barang dan jasa sesuai standar harga, terdapat 1 responden (2,27%) yang memberikan penilaian kurang baik menjadikannya satu-satunya item pada variabel ini yang mendapat respons di bawah kategori cukup baik.

Sebaran rata-rata tanggapan responden terhadap variabel akuntabilitas (X2) dapat dilihat pada Gambar 4.3 di bawah ini:



Gambar 4.3 Distribusi Rata-rata Jawaban Responden tentang Akuntabilitas (X2)

Gambar 4.3 menunjukkan distribusi rata-rata jawaban responden terhadap variabel akuntabilitas (X2). Kategori sangat baik memperoleh proporsi terbesar sebesar 56,82%, diikuti kategori baik sebesar 40,45%, cukup baik sebesar 2,50%, dan kurang baik sebesar 0,23%. Hasil ini menggambarkan bahwa secara rata-rata, responden menilai akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan dalam kategori sangat baik.

4.1.3.4. Pemanfaatan Teknologi Informasi (Z)

Variabel pemanfaatan teknologi informasi (Z) diukur melalui 6 butir pernyataan yang dikembangkan dari 3 indikator. Berikut disajikan distribusi jawaban responden terhadap setiap butir pernyataan dalam tabel rekapitulasi di bawah ini:

Tabel 4.12 Rekapitulasi Skor dan Distribusi Tanggapan Responden tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi (Z)

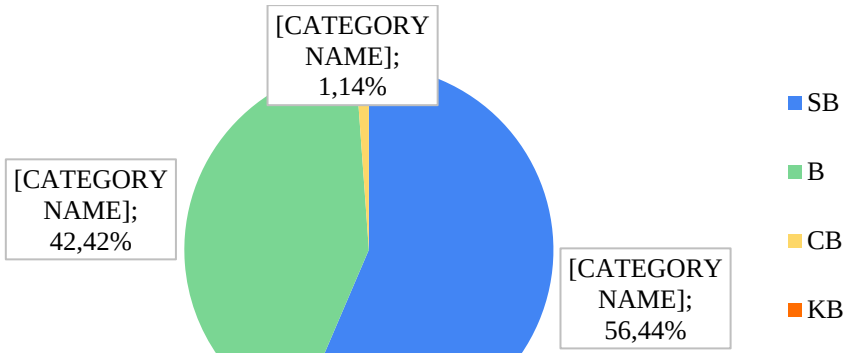
No.	Pernyataan	Distribusi Tanggapan						Nilai Rata-rata	Kriteria
		SB	B	CB	KB	TB	Total		
		F	F	F	F	F			
Intensitas pemanfaatan								4,56	Sangat Baik
1.	Aparatur kelurahan menggunakan teknologi informasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Dana Kelurahan.	22	21	1	0	0	44	4,48	Sangat Baik
	Persentase	50,00	47,73	2,27	0	0	100		
2.	Aparatur kelurahan memanfaatkan aplikasi pengolah data seperti *Microsoft Excel*, *Google Sheets*, dan aplikasi sejenisnya.	28	16	0	0	0	44	4,64	Sangat Baik
	Persentase	63,64	36,36	0	0	0	100		
Frekuensi pemanfaatan								4,55	Sangat Baik
3.	Aparatur kelurahan menggunakan aplikasi atau sistem informasi secara rutin dalam mengelola administrasi Dana Kelurahan.	25	18	1	0	0	44	4,55	Sangat Baik
	Persentase	56,82	40,91	2,27	0	0	100		
4.	Aparatur kelurahan memperbarui data kegiatan dan keuangan Dana Kelurahan ke dalam sistem informasi segera setelah adanya transaksi.	24	20	0	0	0	44	4,55	Sangat Baik
	Persentase	54,55	45,55	0	0	0	100		
Perangkat lunak yang digunakan								4,56	Sangat Baik
5.	Aparatur kelurahan	27	17	0	0	0	44	4,61	Sangat

No.	Pernyataan	Distribusi Tanggapan						Nilai Rata-rata	Kriteria
		SB	B	CB	KB	TB	Total		
		F	F	F	F	F			
	menggunakan aplikasi resmi yang ditetapkan pemerintah daerah seperti SIPD dan aplikasi sejenis dalam pengelolaan Dana kelurahan.								Baik
	Persentase	61,36	38,64	0	0	0	100		
6.	Aparatur kelurahan menginput dan mengolah data keuangan secara digital untuk meminimalkan kesalahan hitung manual.	23	20	1	0	0	44	4,50	Sangat Baik
	Persentase	52,27	45,45	2,27	0	0	100		
Rata-rata		56,44	42,42	1,14	0	0	100	4,55	Sangat Baik

Sumber: Data diolah peneliti (2026)

Data pada Tabel 4.12 menunjukkan bahwa rata-rata nilai untuk seluruh indikator variabel pemanfaatan teknologi informasi (Z) memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,55 yang tergolong dalam kategori sangat baik. Indikator intensitas pemanfaatan dan perangkat lunak yang digunakan masing-masing mencatat rata-rata tertinggi sebesar 4,56, sedangkan indikator frekuensi pemanfaatan memperoleh rata-rata sebesar 4,55. Pada tingkat item, item nomor 2 mengenai pemanfaatan aplikasi pengolah data mencatat rata-rata tertinggi sebesar 4,64, sementara item nomor 6 mengenai pengolahan data keuangan secara digital untuk meminimalkan kesalahan hitung manual mencatat rata-rata terendah sebesar 4,50. Adapun item nomor 1, 3, dan 6 masing-masing mendapat 1 responden 2,27% yang memberikan penilaian cukup baik.

Adapun persentase keseluruhan jawaban responden mengenai pemanfaatan teknologi informasi (Z), berikut disajikan dalam bentuk *pie chart*:



Gambar 4. 4 Distribusi Rata-rata Jawaban Responden tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi (Z)

Distribusi rata-rata jawaban responden pada variabel pemanfaatan teknologi informasi (Z) menunjukkan bahwa kategori sangat baik mendominasi dengan proporsi 56,44%, diikuti baik sebesar 42,42%, dan cukup baik sebesar 1,14%. Sehingga rata-rata responden menilai pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana kelurahan sudah berjalan sangat baik.

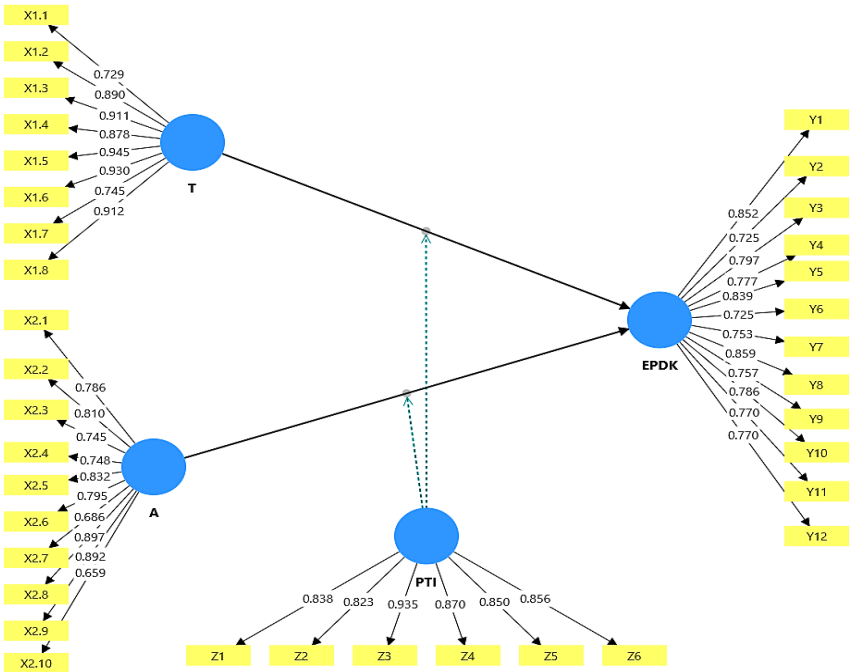
4.2. Hasil Uji Persyaratan Analisis

4.2.1. Evaluasi Model Pengukuran *(Outer Model)*

4.2.1.1. Uji Validitas Konvergen

Evaluasi validitas konvergen dalam PLS-SEM dilakukan dengan memeriksa nilai *outer loading* setiap indikator. Menurut (J. F. Hair *et al*., 2014) indikator dinyatakan valid apabila nilai *outer loading*-nya berada di atas 0,70, yang menunjukkan bahwa indikator tersebut mampu menjelaskan lebih dari 50% varians konstruk yang diukur. Selain *outer loading*, validitas konvergen juga dievaluasi melalui nilai *Average Variance Extracted* (AVE). Suatu konstruk dinyatakan memenuhi validitas konvergen apabila nilai AVE-nya berada di atas 0,50, yang mengindikasikan bahwa konstruk tersebut mampu menjelaskan lebih dari separuh varians indikator-indikatornya (J. F. Hair *et al*., 2022).

Berikut disajikan gambar hasil pengujian *outer loading* seluruh indikator dalam model PLS-SEM:



Gambar 4.5 Hasil Model Struktural PLS
Sumber: Smart PLS 4 (2026)

Berdasarkan gambar 4.5 seluruh indikator memenuhi nilai ambang batas *outer loading* di atas 0,70 dan dinyatakan valid, kecuali dua indikator pada variabel akuntabilitas. Adapun nilai *loading factor* dan AVE seluruh indikator disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.13 Validitas Konvergen

Item Pengkuran	*Loading Factor*				AVE
	X1	X2	Y	Z	
X1.1	0.729				0.759
X1.2	0.890				
X1.3	0.911				
X1.4	0.878				
X1.5	0.945				
X1.6	0.930				
X1.7	0.745				
X1.8	0.912				
X2.1		0.786			0.622
X2.2		0.810			
X2.3		0.745			
X2.4		0.748			
X2.5		0.832			
X2.6		0.795			
X2.7		0.686			
X2.8		0.897			
X2.9		0.892			
X2.10		0.659			
Y1			0.852		0.617
Y2			0.725		
Y3			0.797		
Y4			0.777		
Y5			0.839		
Y6			0.725		
Y7			0.753		
Y8			0.859		
Y9			0.757		
Y10			0.786		
Y11			0.770		
Y12			0.770		
Z1				0.838	0.744
Z2				0.823	
Z3				0.935	
Z4				0.870	
Z5				0.850	
Z6				0.856	

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan Smart PLS 4 (2026)

Berdasarkan Tabel 4.13, seluruh item pada variabel transparansi (X1) yang diturunkan dari 4 indikator dengan 8 butir pernyataan memperoleh nilai *outer*

loading yang memenuhi ambang batas minimum sebesar 0,70, bahkan seluruhnya melampaui nilai tersebut. Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) variabel transparansi sebesar 0,759 yang melebihi ambang batas 0,50, sehingga variabel ini dinyatakan memenuhi kriteria validitas konvergen. Pada variabel akuntabilitas (X2), terdapat dua item yang memperoleh nilai *outer loading* di bawah 0,70, masing-masing sebesar 0,659 dan 0,686. Nilai AVE variabel akuntabilitas tetap memenuhi syarat pada angka 0,622. Menurut (Hair *et al*., 2017), indikator dengan outer loading antara 0,40 hingga 0,70 baru dipertimbangkan untuk dihapus apabila penghapusannya terbukti meningkatkan nilai *composite reliability* atau AVE melampaui ambang batas yang disarankan.

Variabel efektivitas pengelolaan dana kelurahan (Y) memperoleh nilai *outer loading* pada seluruh itemnya di atas 0,70 dengan nilai AVE sebesar 0,617 yang melampaui ambang batas 0,50, sehingga dinyatakan valid. Begitu pula dengan variabel pemanfaatan teknologi informasi (Z) sebagai variabel moderasi, seluruh item memperoleh nilai *outer loading* di atas 0,70 dengan AVE sebesar 0,744, sehingga seluruh indikator pada variabel ini juga dinyatakan memenuhi kriteria validitas konvergen.

Pengujian ulang dilakukan setelah mengeliminasi dua item pertanyaan yang memperoleh nilai *outer loading* di bawah 0,72, yakni item X2.7 dan X2.10. Hasil pengujian ulang menunjukkan adanya peningkatan nilai AVE dan *composite reliability* pada masing-masing variabel, sebagaimana disajikan pada tabel 4.14:

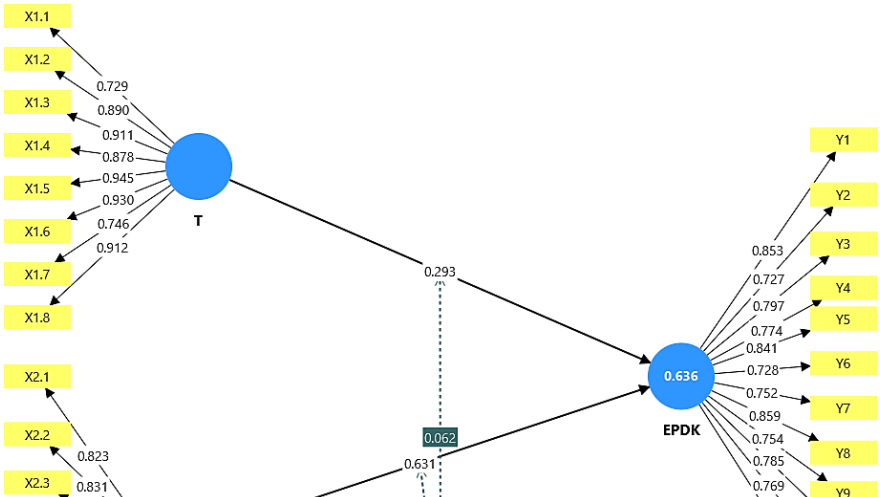
Tabel 4.14 Hasil Uji Validitas Konvergen Setelah Eliminasi

Item Pengkuran	*Loading Factor*				AVE
	X1	X2	Y	Z	
X1.1	0.729				0.759
X1.2	0.890				
X1.3	0.911				
X1.4	0.878				

Item Pengkuran	*Loading Factor*				AVE
	X1	X2	Y	Z	
X1.5	0.945				
X1.6	0.930				
X1.7	0.746				
X1.8	0.912				
X2.1		0.823			0.689
X2.2		0.831			
X2.3		0.761			
X2.4		0.782			
X2.5		0.847			
X2.6		0.798			
X2.8		0.921			
X2.9		0.867			
Y1			0.853		0.617
Y2			0.785		
Y3			0.769		
Y4			0.770		
Y5			0.727		
Y6			0.797		
Y7			0.774		
Y8			0.841		
Y9			0.728		
Y10			0.752		
Y11			0.859		
Y12			0.754		
Z1				0.838	0.744
Z2				0.823	
Z3				0.935	
Z4				0.870	
Z5				0.850	
Z6				0.856	

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan Smart PLS 4 (2026)

Tabel 4.14 menyajikan hasil pengujian ulang setelah mengeliminasi item X2.7 pada indikator pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan minim anggaran, serta item X2.10 pada indikator pertimbangan tujuan dapat tercapai atau tidak dan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Eliminasi kedua item tersebut meningkatkan nilai AVE konstruk akuntabilitas dari 0,622 menjadi 0,689.



Gambar 4.6 Hasil Pengujian Ulang Model PLS-SEM Setelah Eliminasi

4.2.1.2. Uji Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan digunakan untuk menilai sejauh mana suatu konstruk dapat dibedakan dari konstruk lainnya. Suatu konstruk dinyatakan memenuhi validitas diskriminan apabila nilai *Heterotrait-Monotrait Ratio of Correlation* (HTMT) < 0,90 untuk konstruk yang memiliki kemiripan dan < 0,85 untuk konstruk yang lebih berbeda (Hair *et al*., 2019). Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.15 *Heterotrait-Monotrait Ratio of Correlation* (HTMT)

	X1	X2	Y	Z	Z x X2	Z x X1
X1						
X2	0.439					
Y	0.615	0.764				
Z	0.139	0.614	0.329			
Z x X2	0.134	0.506	0.348	0.221		
Z x X1	0.524	0.160	0.179	0.130	0.488	

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan Smart PLS 4 (2026)

Berdasarkan Tabel 4.15, nilai *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT) antar konstruk telah memenuhi kriteria < 0,90 dan < 0,85. Dapat dilihat bahwa nilai tertinggi terdapat pada hubungan antara akuntabilitas (X1) dan efektivitas pengelolaan dana kelurahan (Y) sebesar 0,764 dan tetap memenuhi validitas diskriminan apabila nilai HTMT < 0,90 dan bahkan nilai tersebut masih < 0,85.

Secara keseluruhan, nilai HTMT dalam penelitian ini berada di bawah 0,90, bahkan tidak ada yang melebihi 0,85. Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing konstruk memiliki tingkat perbedaan yang memadai dan tidak saling tumpang tindih dalam mengukur konsep yang diteliti.

4.2.1.3. Uji Reliabilitas Konstruk

Penilaian reliabilitas apabila nilai yang diperoleh > 0,60 - 0,70 masih dapat diterima, sedangkan nilai di atas 0,70 menunjukkan tingkat konsistensi yang baik. Pengujian reliabilitas konstruk dilakukan menggunakan *Composite Reliability* sebagai ukuran utama, dan *Cronbach's Alpha* sebagai ukuran pendukung untuk melihat konsistensi internal indikator dalam mengukur konstruk (Hair *et al.*, 2019). Hasil pengujian reliabilitas disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.16 Hasil Uji *Cronbach Alpa* dan *Composite Reliability*

	Cronbach's alpha	***Composite reliability* (rho_a)**	***Composite reliability* (rho_c)**	***Average variance extracted* (AVE)**
X1	0.953	0.961	0.962	0.759
X2	0.935	0.943	0.946	0.689
Y	0.943	0.946	0.951	0.617
Z	0.933	0.966	0.946	0.744

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan Smart PLS 4 (2026)

Hasil pengujian pada tabel 4.16 menunjukkan bahwa seluruh konstruk dalam model memiliki nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,70, yang artinya instrumen penelitian memiliki konsistensi internal yang baik, serta menunjukkan bahwa setiap indikator mampu mengukur konstruk yang sama secara konsisten. pada nilai *Composite Reliability* pada seluruh konstruk > 0,70 sebagai batas minimum yang disarankan, sehingga semakin memperkuat bahwa konstruk dalam penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas yang memadai. Kemudian nilai AVE pada seluruh konstruk memiliki nilai lebih besar dari 0,50, yang berarti konstruk mampu menjelaskan setidaknya separuh variansi dari indikator-indikatornya.

Sebaliknya, nilai AVE di bawah 0,50 mengindikasikan bahwa varians error lebih besar dibandingkan varians yang dapat dijelaskan oleh konstruk (Garson, 2016).

4.2.2. Evaluasi Model Struktural *(Inner Model)*

4.2.2.1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) menunjukkan seberapa besar variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan variansi variabel dependen. Nilai R^2 sebesar 0,75 tergolong kuat, 0,50 tergolong sedang, dan 0,25 tergolong lemah (Hair *et al*., 2021). Hasil pengujian koefisien determinasi dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.17 Hasil Uji *R-Square*

	R-square	***R-square adjusted***
Y	0.636	0.588

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan Smart PLS 4 (2026)

Berdasarkan hasil pengujian yang disajikan pada tabel 4.17, nilai *R-square* pada variabel efektivitas pengelolaan dana kelurahan sebesar 0,636. Artinya, variabel transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan teknologi informasi mampu menjelaskan sebesar 63,6% variasi efektivitas pengelolaan dana kelurahan. Sementara itu, sisanya sebesar 36,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan 63,6% variansi variabel efektivitas pengelolaan dana kelurahan (Y), yang tergolong dalam kategori sedang.

4.2.2.2. Uji *Effect Size* (f^2)

Uji *effect size* (f^2) digunakan untuk melihat besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam model. Secara umum, nilai f^2 sebesar 0,02 menunjukkan pengaruh kecil, 0,15 menunjukkan

pengaruh sedang, dan 0,35 menunjukkan pengaruh besar. Hasil pengujian f^2 dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.18 Hasil Uji *F-Square*

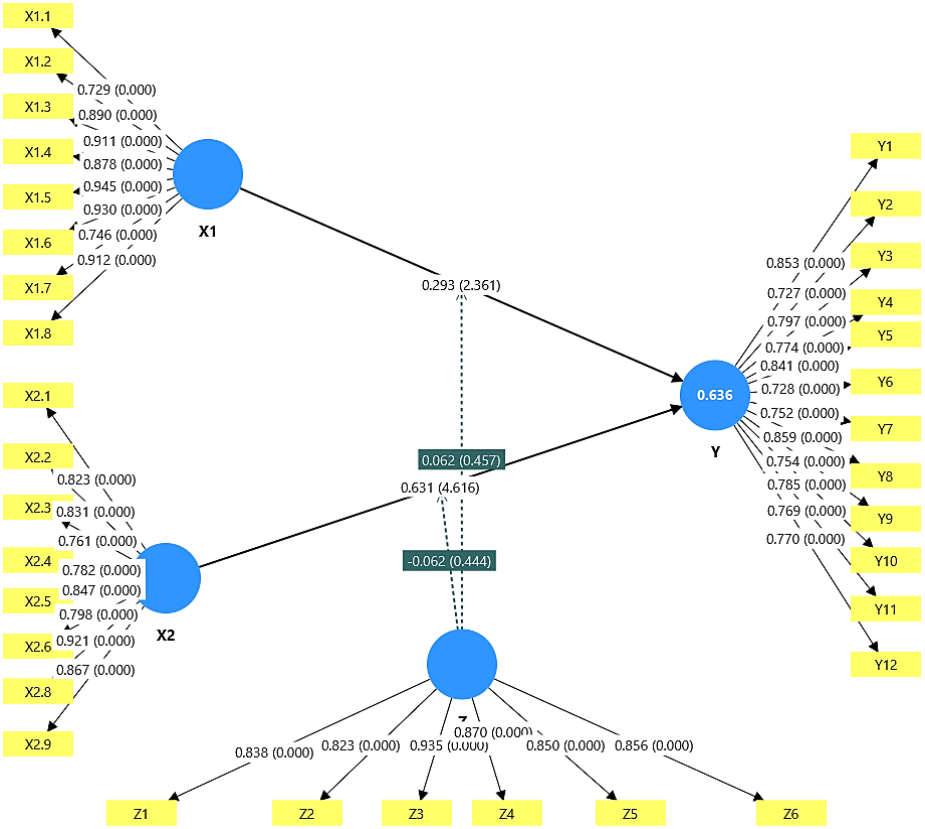
	X1	X2	Y	Z	Z x X2	Z x X1
X1			0.112			
X2			0.422			
Y						
Z			0.013			
Z x X2			0.005			
Z x X1			0.005			

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan Smart PLS 4 (2026)

Berdasarkan hasil uji *effect size* (f^2) pada tabel 4.18, variabel akuntabilitas memiliki pengaruh yang besar terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan dengan nilai sebesar 0,422 yaitu > 0,35. Sementara itu, variabel transparansi menunjukkan pengaruh yang tergolong kecil dengan nilai sebesar 0,112 < 0,15. Adapun pemanfaatan teknologi informasi secara langsung memiliki pengaruh yang sangat kecil dengan nilai sebesar 0,013 < 0,02. Kemudian untuk variabel moderasi, yaitu interaksi pemanfaatan teknologi informasi dengan akuntabilitas serta transparansi, menunjukkan nilai sebesar 0,005 < 0,02, yang mengindikasikan bahwa tidak terdapat pengaruh moderasi dalam model penelitian.

4.2.3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan melalui prosedur *bootstrapping* dengan 5.000 sampel *bootstrap* yang menghasilkan nilai koefisien jalur beserta tingkat signifikansinya. Hasil pengujian selanjutnya disajikan pada gambarl berikut:



Gambar 4.7 *Path Coefficient*

4.2.3.1. Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung

Hasil uji pengaruh langsung disajikan dan dapat dilihat pada tabel 4.18 *path coefficient* berikut:

Tabel 4.19 *Path Coefficient*

	***Original sample* (O)**	***Sample mean* (M)**	***Standard deviation* (STDEV)**	***T statistics* (|O/STDEV|)**	***P values***
X1 -> Y	0.293	0.294	0.124	2.361	0.018
X2 -> Y	0.631	0.633	0.137	4.616	0.000

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan Smart PLS 4 (2026)

Berasarkan pada tabel 4.19 di atas, berikut diuraikan hasil pengujian hipotesis pengaruh langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen:

1. Pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan mempunyai koefisein jalur sebesar 0.293 (positif) dengan nilai probabilitas (p-*values*) 0,000 < 0,05. Artinya variabel transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel efektivitas pengelolaan dana kelurahan.
2. Pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan memperoleh nilai keofisien jalur sebesar 0.631 dengan arah pengaruh positif dan nilai p-*value* sebesar 0.000 < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan.

4.2.3.2. Pengujian Hipotesis Efek Interaksi

Hasil pengujian hipotesis efek interaksi selanjutnya disajikan pada tabel 4.20 *Interaction Effect* berikut:

Tabel 4.20 *Interaction Effects*

	***Original sample* (O)**	***Sample mean* (M)**	***Standard deviation* (STDEV)**	***T statistics* (|O/STDEV|)**	***P values***
Z x X1 -> Y	0.062	0.057	0.136	0.457	0.648
Z x X2 -> Y	-0.062	-0.044	0.139	0.444	0.657

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan Smart PLS 4 (2026)

Berasarkan pada tabel 4.19, berikut diuraikan hasil pengujian hipotesis efek interaksi:

1. Pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan dengan moderasi pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0.062 (positif) dan nilai p-*value* sebesar 0.648 > 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mampu memoderasi pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan.
2. Pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan dengan moderasi pemanfaatan teknologi informasi memperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0.062 (negatif), dengan nilai p-*value* sebesar 0.657 > 0,05. Artinya variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak mampu memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Pengaruh Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pengaruh langsung, transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan, dengan koefisien jalur sebesar 0,293, nilai T-statistik 2,631, dan nilai signifikansi 0,018 < 0,05. Dengan demikian, hipotesis penelitian diterima, yang

berarti peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana kelurahan secara langsung berkontribusi pada peningkatan efektivitasnya. Adapun nilai *effect size* (f^2) sebesar 0,112 menunjukkan bahwa transparansi memberikan kontribusi yang tergolong kecil.

Hasil tersebut didukung oleh kualitas model pengukuran variabel transparansi yang telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Seluruh indikator variabel transparansi memiliki nilai *outer loading* di atas 0,70 dengan rentang nilai terendah 0,729 pada indikator X1.1 yaitu penyediaan informasi mengenai prosedur, biaya, dan tanggung jawab, hingga tertinggi 0,945 pada indikator X1.5 yaitu publikasi informasi alokasi anggaran Dana Kelurahan kepada masyarakat. Tingginya outer loading X1.5 mencerminkan bahwa keterbukaan informasi anggaran merupakan aspek yang paling kuat dalam membentuk persepsi responden terhadap transparansi pengelolaan dana kelurahan. Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) sebesar 0,759 telah melampaui batas minimum 0,50, sementara nilai *Composite Reliability* (rho_c) sebesar 0,962 dan *Cronbach's Alpha* sebesar 0,953 keduanya berada di atas ambang batas 0,70, yang mencerminkan konsistensi internal yang tinggi.

Hal ini dapat dipahami karena transparansi pada dasarnya membuka ruang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memantau seluruh proses dan hasil pengelolaan dana publik, sehingga peluang terjadinya penyimpangan seperti korupsi dapat ditekan. Sebagaimana dikemukakan oleh (Edowai dkk., 2021), keterbukaan informasi atas setiap aktivitas pemerintah menjadi salah satu mekanisme pencegahan kecurangan yang efektif dalam tata kelola sektor publik.

Variabel transparansi memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,06 yang termasuk dalam kategori baik. Distribusi jawaban responden menunjukkan bahwa sebagian besar memberikan penilaian pada kategori baik sebesar 59,09%, diikuti kategori sangat baik sebesar 23,58% dan cukup baik sebesar 17,33%, tanpa ada satu pun responden yang memberikan penilaian kurang baik maupun tidak baik. Dari keempat indikator, nilai rata-rata tertinggi sebesar 4,11 diperoleh secara bersamaan oleh indikator penyediaan informasi mengenai prosedur, biaya, dan tanggung jawab serta indikator ketepatan waktu dalam pelaporan pertanggungjawaban, sementara indikator kemudahan akses informasi mencatat nilai terendah sebesar 4,00.

Temuan ini sejalan dengan teori keagenan, yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal selaku pemilik kepentingan dan agen selaku pelaksana tugas. Dalam organisasi sektor publik, masyarakat berperan sebagai prinsipal sedangkan pemerintah berperan sebagai agen yang diberi mandat untuk menyelenggarakan pelayanan publik (Edowai dkk., 2021). Persoalan yang kerap muncul dalam hubungan ini adalah asimetri informasi, yakni kondisi di mana pemerintah sebagai agen menguasai lebih banyak informasi dibandingkan masyarakat, sehingga membuka celah bagi perilaku yang tidak sepenuhnya selaras dengan kepentingan publik. Di sinilah transparansi berperan atas keterbukaan informasi pengelolaan dana publik yang dapat meminimalisir asimetri informasi.

Berdasarkan temuan di lapangan, menunjukkan bahwa aparatur kelurahan di Kecamatan Medan Timur telah menjalankan prinsip transparansi dengan baik. Pada indikator penyediaan informasi mengenai prosedur, biaya, dan tanggung jawab, informasi penggunaan dana kelurahan disampaikan kepada masyarakat

melalui berbagai media seperti papan pengumuman, spanduk, maupun website resmi kelurahan, disertai publikasi rincian anggaran dan realisasi belanjanya, sehingga indikator ini memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,11 dengan kategori baik. Indikator kemudahan akses informasi memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,00 dengan kategori baik, mencerminkan bahwa masyarakat tidak hanya memperoleh informasi pada tahap perencanaan, tetapi juga dapat mengakses realisasi fisik dan keuangan kegiatan Dana Kelurahan secara langsung.

Indikator sistem transparansi kebijakan anggaran memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,02 dengan kategori baik, yang menggambarkan bahwa aparatur secara aktif mempublikasikan informasi alokasi maupun perubahan kebijakan anggaran kepada masyarakat. Indikator ketepatan waktu dalam pelaporan pertanggungjawaban turut memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,11 dengan kategori baik, mencerminkan bahwa penyampaian laporan Dana Kelurahan kepada pihak yang berkepentingan dilakukan secara terbuka dan tidak tertunda.

Temuan ini juga diperkuat oleh sejumlah penelitian terdahulu, di antaranya (Djamiraga & Widajantie, 2022) yang secara spesifik membuktikan pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan dengan arah pengaruh positif dan signifikan, serta (Mojo, 2023), (Salasa dkk., 2024), (Ashsifa dkk., 2023), dan (Iskandar dkk., 2024) yang menghasilkan temuan serupa dalam konteks pengelolaan dana desa. Meskipun sebagian penelitian tersebut berfokus pada dana desa, kesamaan prinsip pengelolaan yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan regulasi menjadi temuan yang tetap relevan sebagai penguat hasil penelitian.

4.3.2. Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pengaruh langsung, akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan dengan koefisien jalur sebesar 0.631 dengan arah pengaruh positif, T-statistik 4,616, dan nilai signifikansi 0.000 < 0,05. Dengan demikian, hipotesis kedua diterima, yang berarti peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kelurahan secara langsung berkontribusi pada peningkatan efektivitasnya. Nilai effect size (f^2) sebesar 0,422 menunjukkan bahwa akuntabilitas memberikan kontribusi yang tergolong besar terhadap model, menjadikannya variabel dengan pengaruh paling dominan dalam penelitian ini. Hal ini sejalan dengan konsep akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang diemban (Sawir, 2022).

Dalam proses pengujian validitas konvergen, dua item pernyataan yaitu X2.7 dan X2.10 dikeluarkan dari model karena nilai *outer loading* < 0,70, sehingga masing-masing indikator pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan minim anggaran serta indikator pertimbangan tujuan dapat tercapai atau tidak dan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal hanya diwakili oleh satu item. Delapan item yang dipertahankan seluruhnya memiliki nilai outer loading di atas 0,70 dengan rentang nilai terendah 0,745 pada item X2.3 dan tertinggi 0,897 pada item X2.8 yang berkaitan dengan pembuktian penggunaan setiap rupiah Dana Kelurahan melalui bukti transaksi yang sah. Nilai AVE sebesar 0,622 > 0,50, sementara *Composite Reliability* (rho_c) sebesar 0,946 dan *Cronbach's Alpha* sebesar 0,935 keduanya berada di atas ambang batas 0,70.

Nilai rata-rata keseluruhan variabel akuntabilitas sebesar 4,54 dengan kategori sangat baik didukung oleh distribusi jawaban responden yang menunjukkan bahwa sebagian besar memberikan penilaian pada kategori sangat baik sebesar 56,82%, diikuti kategori baik sebesar 40,45%, cukup baik sebesar 2,50%, dan kurang baik sebesar 0,23%. Dapat disimpulkan bahwa seluruh aspek pertanggungjawaban pengelolaan dana kelurahan telah terlaksana secara konsisten, sekaligus menjelaskan mengapa akuntabilitas dapat berpengaruh dominan terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori keagenan, yang mana hubungan antara aparatur kelurahan selaku agen dan masyarakat selaku prinsipal pada dasarnya menyimpan potensi konflik kepentingan dan asimetri informasi. Akuntabilitas hadir sebagai mekanisme yang menjembatani ketimpangan tersebut melalui kewajiban pelaporan dan pertanggungjawaban atas setiap penggunaan dana kelurahan. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang diterapkan aparatur kelurahan, semakin sempit pula ruang bagi penyalahgunaan wewenang dan praktik kecurangan dalam pengelolaan dana kelurahan.

Temuan di lapangan pada Kecamatan Medan Timur menunjukkan bahwa aparatur kelurahan yakni lurah, sekretaris lurah, kepala seksi, dan bendahara telah melaksanakan pengelolaan dana kelurahan secara sangat baik, yang mana kewenangannya berlandaskan pada rencana kerja yang telah disepakati tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi. Yang selanjutnya dinilai sudah sangat baik dalam menghindari penyalahgunaan jabatan, sebagaimana terlihat dari nilai rata-rata indikator penghindaran penyalahgunaan jabatan yang berada pada rentang skala 4,60 dengan kategori sangat baik. Hal ini berkaitan dengan akuntabilitas

kejujuran menurut (Mardiasmo, 2002) yang menekankan pentingnya penghindaran penyalahgunaan jabatan dalam pengelolaan sumber daya publik.

Dari sisi ketaatan terhadap hukum, aparatur kelurahan di Kecamatan Medan Timur juga menunjukkan capaian yang sangat baik dalam pengelolaan dana kelurahan. Pelaksanaan pengelolaan dana juga yang senantiasa mengacu pada regulasi yang berlaku. Selain itu, proses pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan kelurahan juga telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berpedoman pada Permendagri Nomor 130 Tahun 2018. Indikator ketaatan terhadap hukum ini memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,59 dengan kategori sangat baik. Temuan ini sejalan dengan konsep akuntabilitas hukum menurut (Mardiasmo, 2002) yang menegaskan bahwa pengelolaan sumber dana publik harus disertai jaminan kepatuhan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang dipersyaratkan.

Efektivitas pengelolaan dana kelurahan juga ditentukan oleh proses penyusunan pertanggungjawaban anggaran, laporan penggunaan dana disusun secara lengkap dan melalui verifikasi internal sebelum diserahkan kepada pihak kecamatan. Proses ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana tercatat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut terlihat dari nilai rata-rata indikator proses dan pertanggungjawaban anggaran sebesar 4,60 dengan kategori sangat baik. Tidak hanya pada aspek administratif, pertanggungjawaban juga terlihat dari kualitas layanan yang dirasakan masyarakat. Indikator pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan minim anggaran memperoleh nilai rata-rata 4,43 dengan kategori sangat baik.

Keduanya berkaitan dengan konsep akuntabilitas proses menurut (Mardiasmo, 2002), yang menegaskan bahwa akuntabilitas tidak cukup hanya dilihat dari dokumen pertanggungjawaban, melainkan juga terwujud melalui penyelenggaraan pelayanan publik yang cepat, responsif, dan efisien dari sisi pembiayaan.

Lebih lanjut, akuntabilitas juga dilihat dari sejauh mana program yang didanai benar-benar mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang efisien. Dalam hal ini, aparatur kelurahan di Kecamatan Medan Timur telah menetapkan target yang jelas untuk setiap kegiatan dan melakukan evaluasi dalam menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan. Indikator pertimbangan tujuan dapat tercapai atau tidak dan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,48 dengan kategori sangat baik. Pengelolaan dana kelurahan tidak sekadar habis dibelanjakan, melainkan diarahkan pada hasil yang terukur. Hal ini selaras dengan konsep akuntabilitas program menurut (Mardiasmo, 2002), yang menekankan bahwa pertanggungjawaban tidak hanya soal kepatuhan prosedur, tetapi juga soal apakah program yang dilaksanakan benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian-penelitian terdahulu seperti (Mojo, 2023), (Salasa dkk., 2024), (Ashsifa dkk., 2023), (Iskandar dkk., 2024), dan (Tangdilintin dkk., 2025), yang secara umum menemukan bahwa akuntabilitas, baik secara parsial maupun simultan bersama transparansi, berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa.

4.3.3. Pemanfaatan Teknologi Informasi Memoderasi Pengaruh Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis efek interaksi, diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,062 dengan arah positif, T-statistik 0,457, dan p-*value* sebesar 0,648 > 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berperan sebagai variabel moderasi. Artinya, ada atau tidaknya pemanfaatan teknologi informasi tidak memberikan kontribusi yang berarti terhadap kuat lemahnya pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan. Nilai *effect size* (f^2) sebesar 0,005 mempertegas bahwa kontribusi moderasi ini tergolong sangat kecil dan tidak memberikan perubahan berarti terhadap model.

Meskipun efek moderasi tidak signifikan, variabel pemanfaatan teknologi informasi memenuhi seluruh kriteria validitas dan reliabilitas. Seluruh item memiliki nilai *outer loading* di atas 0,70 dengan rentang nilai terendah 0,823 pada item Z2 yaitu pemanfaatan aplikasi pengolah data seperti *Microsoft Excel*, *Google Sheets*, dan aplikasi sejenisnya, hingga tertinggi 0,935 pada item Z3 yaitu penggunaan aplikasi atau sistem informasi secara rutin dalam mengelola administrasi Dana Kelurahan. Nilai AVE sebesar 0,744 > 0,50, sementara Composite Reliability (rho_c) sebesar 0,946 dan Cronbach's Alpha sebesar 0,933 keduanya berada di atas ambang batas 0,70.

Penilaian responden terhadap variabel pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan capaian yang sangat baik. Indikator intensitas pemanfaatan dan indikator perangkat lunak yang digunakan masing-masing mencatat nilai rata-rata

tertinggi sebesar 4,56 dengan kategori sangat baik, hal ini menggambarkan bahwa aparatur kelurahan telah memanfaatkan teknologi informasi secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Dana Kelurahan, serta menggunakan aplikasi resmi yang ditetapkan pemerintah daerah seperti SIPD dalam pengelolaan keuangan. Indikator frekuensi pemanfaatan memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,55 dengan kategori sangat baik, menggambarkan tingkat penggunaan aplikasi dan sistem informasi dalam rutinitas kerja aparatur kelurahan.

Distribusi jawaban responden juga memperlihatkan bahwa sebagian besar memberikan penilaian pada kategori sangat baik sebesar 56,44%, diikuti kategori baik sebesar 42,42%, dan cukup baik sebesar 1,14%. Nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4,55 dengan kategori sangat baik ini justru menjadi temuan yang menarik, karena tingginya capaian pemanfaatan teknologi informasi secara deskriptif tidak serta-merta memperkuat pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan.

Berdasarkan dokumen (Rencana Strategis Kecamatan Medan Timur Tahun 2021-2026) , yang secara eksplisit mencatat bahwa masih terbatasnya sarana dan prasarana berbasis teknologi tinggi di lingkungan kecamatan dan kelurahan menjadi salah satu permasalahan yang menghambat pelayanan kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi tidak mampu memoderasi pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan, sebab teknologi yang belum memadai tentu belum dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen yang dapat memperkuat prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Investasi dan pengembangan teknologi informasi yang masih terbatas menjadi akar

persoalan yang menjelaskan mengapa variabel ini tidak memberikan efek moderasi yang signifikan.

Pemanfaatan teknologi informasi di bidang akuntansi diharapkan mampu mendukung proses pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan secara lebih transparan dan efisien. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak memoderasi pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan. Kondisi ini dapat dijelaskan melalui konsep yang dikemukakan oleh (Thompson *et al*., 1991), yang menyatakan bahwa ketersediaan teknologi informasi tidak dengan sendirinya menjamin pemanfaatannya secara efektif, bahwa pemanfaatan TI secara optimal sangat bergantung pada kapasitas SDM penggunanya. Dalam dokumen (Rencana Strategis Kecamatan Medan Timur Tahun 2021-2026), keterbatasan kompetensi SDM dan sarana teknologi informasi yang belum memadai menjadi hambatan dalam optimalisasi penggunaan sistem. Akibatnya, pemanfaatan teknologi informasi belum mampu memberikan penguatan terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan.

Jika dikaji kembali, pengujian H1 menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan. Penelitian oleh (Nurrizkiana dkk., 2017) menunjukkan bahwa semakin terbuka informasi yang diberikan, maka pengelolaan keuangan akan semakin transparan dan akuntabel. Dengan demikian, transparansi yang telah berjalan dengan baik secara langsung sudah mampu mendukung efektivitas pengelolaan dana, sehingga pemanfaatan teknologi informasi tidak memberikan efek moderasi yang signifikan. Sejalan dengan penelitian oleh (Ramadani dkk., 2025) yang mengemukakan bahwa teknologi informasi tidak memperkuat maupun

memperlemah hubungan transparansi terhadap pengelolaan dana karena pemanfaatannya belum optimal.

4.3.4. Pemanfaatan Teknologi Informasi Memoderasi Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan

Hasil pengujian efek interaksi menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,062 (negatif) dengan T-statistik 0,444, dan p-*value* sebesar 0,657 > 0,05, yang berarti hipotesis ditolak. Pemanfaatan teknologi informasi tidak memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan, ada atau tidaknya pemanfaatan teknologi informasi tidak mengubah besaran maupun arah pengaruh tersebut secara signifikan.

Nilai *effect size* (f^2) sebesar 0,005 mempertegas bahwa kontribusi moderasi ini tergolong sangat kecil dan tidak memberikan perubahan yang berarti terhadap model struktural. Untuk besaran nilai AVE sebesar 0,744 telah melampaui batas minimum 0,50, sementara *Composite Reliability* (rho_c) sebesar 0,946 dan *Cronbach's Alpha* sebesar 0,933 keduanya berada di atas ambang batas 0,70, yang memperlihatkan konsistensi internal yang tinggi pada seluruh item pembentuk variabel pemanfaatan teknologi informasi.

Berdasarkan dokumen (Renstra Kecamatan Medan Timur Tahun 2021-2026), yang menunjukkan masih terbatasnya sarana dan prasarana berbasis teknologi serta belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan teknologi informasi belum mampu memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan. Temuan ini sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh (Ramadani dkk., 2025) yang menunjukkan bahwa teknologi informasi tidak memberikan kontribusi yang bermakna dalam memperkuat maupun memperlemah pengaruh akuntabilitas terhadap pengelolaan dana. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal, keterbatasan pelatihan, serta pemahaman pegawai menjadi faktor yang menyebabkan efek moderasi tidak muncul.

Adapun penelitian serupa oleh (Ice dkk., 2023), dalam penelitiannya ditemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak memoderasi pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal, maupun partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kendala utama yang menjelaskan ketidaksignifikanan peran moderasi TI berkaitan dengan kesiapan SDM, di mana diperlukan sinergi dari SDM agar teknologi informasi dapat benar-benar mewujudkan akuntabilitas yang diharapkan. Kondisi ini relevan dengan temuan penelitian ini, mengingat keterbatasan kompetensi aparatur kelurahan sebagaimana tercatat dalam Renstra Kecamatan Medan Timur 2021-2026 menjadi faktor yang menjelaskan mengapa pemanfaatan teknologi informasi belum mampu berperan sebagai variabel yang memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan.

Kondisi ini diperkuat dengan hasil penelitian (Faisal, 2025) yang menemukan bahwa rendahnya kemampuan aparatur dalam mengoperasikan sistem informasi secara optimal menjadi salah satu akar permasalahan yang secara konsisten menghambat pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Selama kapasitas SDM aparatur belum memadai, teknologi

informasi tidak akan mampu berperan sebagai variabel yang dapat memperkuat pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan. Meskipun persepsi responden terhadap pemanfaatan teknologi informasi tergolong sangat baik, hal ini tidak serta-merta berarti teknologi informasi mampu memoderasi hubungan antar variabel.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui "Pengaruh Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan di Kecamatan Medan Timur Dengan Pemanfaatan Tenologi Informasi Sebagai Variabel *Moderating*". Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transparansi berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan dengan arah pengaruh positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin optimal keterbukaan informasi yang diberikan, maka semakin efektif pula pengelolaan dana kelurahan karena dapat meminimalisir asimetri informasi antara aparatur kelurahan, pemangku kepentingan, dan masyarakat.
2. Akuntabilitas berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan dengan arah pengaruh positif. Artinya, semakin baik penerapan prinsip akuntabilitas, maka pengelolaan dana kelurahan akan semakin tepat sasaran melalui pelaporan, pengungkapan informasi, serta penggunaan sumber daya publik yang lebih bertanggung jawab.
3. Pemanfaatan teknologi informasi tidak memoderasi pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan. Ketersediaan teknologi informasi tidak serta merta menjamin pemanfaatannya secara optimal sebagai instrumen yang mendukung keterbukaan dan aksesibilitas informasi dalam pengelolaan dana kelurahan. Kondisi ini juga dipengaruhi oleh belum

optimalnya kapasitas SDM aparatur kelurahan dalam memanfaatkan teknologi informasi tersebut.

4. Pemanfaatan teknologi informasi tidak memoderasi pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan. Ketersediaan teknologi informasi tidak dengan sendirinya mampu memperkuat pengaruh akuntabilitas, apabila pemanfaatannya dalam mendukung pertanggungjawaban pengelolaan keuangan belum berjalan secara optimal. Kondisi ini turut dipengaruhi oleh belum memadainya kapasitas SDM aparatur kelurahan dalam mengoperasikan sistem informasi yang tersedia.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi terkait dan peneliti selanjutnya:

1. Pemerintah Kecamatan Medan Timur diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan pelatihan bagi aparatur kelurahan guna mengoptimalkan kompetensi aparatur mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
2. Pemerintah kota dan kecamatan diharapkan dapat menyelenggarakan pelatihan literasi digital bagi aparatur kelurahan, sehingga pemanfaatan teknologi informasi tidak hanya terbatas pada kegiatan administratif, tetapi juga mencakup pencatatan dan pengelolaan keuangan. Dengan demikian, teknologi informasi dapat berperan lebih optimal dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kelurahan.

3. Pemerintah kota diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi di lingkungan kecamatan dan kelurahan, sehingga proses pencatatan, pelaporan, pengelolaan data keuangan dan anggaran, serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih mudah dan efisien.
4. Peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat mengkaji variabel lain di luar model penelitian ini, mengingat nilai *R-square* sebesar 0,636 menunjukkan masih terdapat sekitar 36,4 persen variasi yang belum dijelaskan. Variabel seperti kompetensi aparatur dan partisipasi masyarakat dapat menjadi pertimbangan berdasarkan fenomena yang teridentifikasi dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Alpi, M. F., & Akmalia, S. N. (2025). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Di Kecamatan Medan Barat. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, *8*(September), 114–125. https://doi.org/https://doi.org/10.30596/maneggio.v8i2.26940

Ariasih, K. D., Asana, G. H. S., & Clarissa, S. V. (2024). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Gerokgak. *Jurnal Akuntansi Profesi*, *15*(1), 2338–6177. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jippg.v3i2

Ashsifa, I., Hidayanti, A. N., & Mulyani, U. R. (2023). The Effectiveness Of Village Fund Management: Accountability, Transparency And Community. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, *8*(1), 107–121. https://doi.org/10.31002/rep.v8i1.946

Assa, C. M. D., Lapian, M., & Singkoh, F. (2020). Efektivitas Penggunaan Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Di Kelurahan Sendangan Kecamatan Kawangkan Kabupaten Minahasa. *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, *2*(5), 1–12. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/31812

BPHN. (2025). *Sekata Episode 10 Bahas Pencegahan Korupsi Dana Desa dan Kelurahan*. https://bphn.go.id/berita-utama/sekata-episode-10-bahas-pencegahan-korupsi-dana-desa-dan-kelurahan

Cahyaningtyas, N. T., & Natsir, M. (2025). Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Dan Sarana Dan Prasarana Di Kelurahan Wonoasih Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo. *MAP (Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik)*, *7*(1), 69–79. https://doi.org/https://doi.org/10.37504/map.v7i1.599

Christopher Djamiraga, A., & Diah Widajantie, T. (2022a). Pengaruh Kompetensi dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Pada Kelurahan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, *4*(11), 4806–4814. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1779

Christopher Djamiraga, A., & Diah Widajantie, T. (2022b). Pengaruh Kompetensi Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Pada Kelurahan Di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, *4*(11), 4806–4814. https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1779

Creswell, J. W. (2014). *Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4 ed.). Sage.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6 ed.). Sage.

Darwin, M., Mamondol, M. R., Sormin, S. A., Nurhayati, Y., Tambunan, H., Sylvia, D., Adnyana, I. M. D. M., Prasetiyo, B., Vianitati, P., & Gebang, A. A. (2021). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif* (T. S. Tambunan (ed.)). Media Sains Indonesia. http://www.penerbit.medsan.co.id/

Davis, F. (1987). *User Acceptance Of Information System: The Technology Acceptance Model (TAM).*

Edowai, M., Abubakar, H., & Said, M. (2021). *Akuntabilitas & Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah* (A. Musfirah, A. Puspita, & Hasriani (ed.)). Pusaka Almaida.

Ellwood, S. (1993). Parish And Town Councils : Financial Accountability And Management. *Local Government Studies*, *19*(3), 369–386. https://doi.org/10.1080/03003939308433687

Fadjar Trisakti, Adnin Dikeu Dewi Berliana, Al Bukhori, & Alya Fitr. (2022). Transparansi Dan Kepentingan Umum. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, *19*(1), 29–38. https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i1.61

Faisal, H. (2025). Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Bappenas Working Papers*, *VIII*(3), 460–484. https://doi.org/https://doi.org/10.47266/bwp.v8i3.411

Forisa Riofan Gandi, R., Sumtaky, M., & Ani Pangastuti, D. (2025). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Dana Desa dengan Akuntabilitas sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Global Ilmiah*, *2*(5), 326–336. https://doi.org/10.55324/jgi.v2i5.184

Garson, G. D. (2016). *Partial Least Squares: Regression & Structural Equation Model.*

Hadis, F., Ihsan, H., Dwiharyadi, A., Septriani, Y., & Afni, Z. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi , Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Akuntansi dan Manajemen*, *17*(2), 106–121. https://doi.org/https://doi.org/10.30630/jam.v17i2.202

Haikal, M. F., & Mauliana, D. (2022). Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus Pelayanan E-Ktp Di Kantor Kecamatan Tallo Kota Makassar) Public Service Accountability And Transparency (Case Study Of E-Ktp Service In Tallo District Office Makassar. *Jurnal Administrasi Negara*, *28*(April), 89–112.

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Michigan, Ringle, C. M., Hamburg, & Sarstedt, M. (2017). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* (2 ed.). Sage.

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2014). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM).* Sage.

Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2022). *A Primer on*

Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) (3 ed.). Sage.

Hair, J. F. J., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Soumya, R. (2021). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) Using R*.

Hair, J. F., Risher, J. J., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report The results of PLS-SEM. *Emerald Publishing*, *31*(1), 2–24. https://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203

Haris, A. (2025). Transformasi Digital Pengelolaan Anggaran Dana Desa; Studi Tentang E-Budgeting, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat. *Journal of Governance and Policy Innovation*, *5*(1), 28–37.

Hartono, H. (2025). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Persfektif Undang Undang Desa Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance). *JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara*, *2*(4), 5741–5752. https://jicnusantara.com/index.php/jicn

Haryono, S. (2016). *Metode SEM Untuk Penelitian Manajemen Dengan AMOS LISREL PLS* (H. Mintardja (ed.)). PT. Intermedia Personalia Utama.

Ice, M. N., Ardini, L., & Kurnia. (2023). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, *7*(4), 3207–3219. https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1831

Ikhsan, A., Lesmana, S., Aziza, N., Sufitrayati, Setiawan, P., Noch, M. Y., Helmiati, Wardi, J., Hasibuan, A. F., & Febriansyah, E. (2019). *Teori Akuntansi* (H. Harmain (ed.)). Medan: Madenatera.

Indonesia Corruption Watch. (2024). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023*.

Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, *10*(4), 1–15.

Insawan, H., & Alwahidin. (2021). *Teknologi Informasi Dan Piranti Keuangan* (S. Anselah & Zulkifli (ed.)). AA-DZ Grafika.

Iskandar, M. A., Fatmala, W., & Murnisari. (2024). The Influence Of Accountability , Transparency And Community Participation On The Effectiveness Of Village Fund. *International Jornal Of Multidiciplynary Learners*, *1*(2), 171–176. https://www.ejournal.poltekbaubau.ac.id/index.php/ijml/article/view/980

Januri, Alpi, M. F., & Sinaga, A. (2024). Peranan Efektiitas Pengelolaan dana desa: Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi Desa Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Intervening. *Liabilities: Jurnal Pendidikan*

Akuntansi, *7*(3), 46–54. https://doi.org/10.30596/liabilities.v7i3.21835

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, *3*(4), 305–360.

Joko, E. A., Mane, A. A., & Abubakar, H. (2022). *Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan Pajak Daerah* (H. Remmang (ed.)). Chakti Pustaka Indonesia.

Juliyanti, W., & Ditasari, R. A. (2025). *Does E-Government Maturity Enhance Transparency and Public Accountability in Local Government Finance ? (An Empirical Study on Regency Governments in Indonesia 2020 – 2022*. *8*(2), 1620–1639.

Juniarti, U., Adha Inapty, B., & Rakhmawati, I. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat, Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Labuhan Haji Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, *2*(3), 608–620. https://doi.org/10.29303/risma.v2i3.298

Khoirudin, M. R., Arifianto, M. S., Siti, S., & Ariyanti, I. (2025). Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan dalam Rangka Peningkatan Sarana dan Prasarana dan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Dukuh Menanggal Kecamatan Gayungan Kota Surabaya. *Anggaran: Jurnal Publikasi Ekonomi dan Akuntansi*, *3*(2), 214–227. https://doi.org/https://doi.org/10.61132/anggaran.v3i2.1426

Krina. (2003). *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi*.

KSAP. (2020). *Teori Keagenan Dituturkan Dr Jan Hoesada*.

Kusrawan. (2019). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Pengendalian Internal Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Di Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe. *Jurnal GeoEkonomi*, *10*(2), 271–284. https://doi.org/doi.org/10.36277/geoekonomi

LAN dan BPKP. (2000). *Akuntabilitas Dan Good Governance*.

Maharani, G., & Susanto, B. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Desa Di Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang). *Borobudur Accounting Review*, *1*(2), 210–222. https://doi.org/10.31603/bacr.6396

Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik* (2 ed.). Yogyakarta: Andi.

Mareta, & Firdaus. (2024). Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan*, *6*, 231–240.

Moenek, R., & Suwanda, D. (2019). *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah* (N. N. Muliawati (ed.); 1 ed.). PT Remaja Rosdakarya.

Mojo, A. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, *12*(7), 1–15. https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/

Mudanews. (2022). *Program Kelurahan Medan Timur Diduga Menjadi Ajang Praktik Korupsi Oknum Organisasi Berinisial 'YP.'* https://mudanews.com/medan/2022/02/06/program-kelurahan-medan-timur-diduga-menjadi-ajang-praktik-korupsi-oknum-organisasi-berinisial-yp

Nurrizkiana, B., Handayani, L., & Widiastuty, E. (2017). Determinan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Implikasinya terhadap Kepercayaan. *Jurnal Akuntansi dan Investas*, *18*(1), 28–47. https://doi.org/10.18196/jai.18159

Octavia, V., Wijayanti, R. R., Ardhiarisca, O., Andini, D. P., & Putra, R. (2023). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Asersi: Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis*, *3*(2), 142–146. https://doi.org/https://doi.org/10.25047/asersi.v3i2.4447

OECD. (2002). *Public Sector Transparency and Accountability*. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2002/09/public-sector-transparency-and-accountability_g1gh2c53/9789264176287-en.pdf

OECD. (2025). *Quality Budget Institutions: Developments in OECD countries*. https://doi.org/https://doi.org/10.1787/8e811202-en

Pemerintah Kota Medan. (2021). *Rencana Strategis Kecamatan Medan TIMUR 2021-2026 Pemerintah Kota Medan*.

Pemerintah Kota Medan. (2022). *Profil Kecamatan Medan Timur*. https://www.medantimur.medan.go.id/menu/Profil/Gambaran-Umum.html

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, 3 91 (2018). https://peraturan.bpk.go.id/Details/111302/permendagri-no-130-tahun-2018

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, 453 (2020). https://jdih.kemendagri.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, 1 (2018).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, 14 (2005).

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 37 Tahun2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, 18 (2019).

https://peraturan.bpk.go.id/Details/126056/perwali-kota-medan-no-37-tahun-2019

Pewarta. (2024). *LPM Kota Medan Demo Kantor Wali Kota, Tuntut Transparansi Pengelolaan Dana Kelurahan*. https://pewarta.co/news/sumut/lpm-kota-medan-demo-kantor-wali-kota-tuntut-transparansi-pengelolaan-dana-kelurahan?

Pramono, T., Desa, D., & Masyarakat, P. (2020). Pengelolaan Dana Kelurahan Dalam Perspektif Community Driven Development. *MEDIASOSIAN: Jurnal Ilmu Sosial dan IlmuAdministrasi Negara*, *4*(1), 51–62. https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/mediasosian/article/view/819/733

Purba, R. B. (2023). *Teori Akutansi: Sebuah Pemahaman untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akuntansi* (Tim Kreatif Merdeka Kreasi Group (ed.)). CV. Merdeka Kreasi Group.

Rachmawaty, A. (2014). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Guru Pada Smp Negeri 43 Bandung. *Tematik - Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, *1*(1), 26–35.

Rahmat, M. R., Syamsa, M. F., Dema, H., & Lubis, S. (2025). Peran Teknologi Informasi dalam Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kalempang. *PAMARENDA : Public Administration and Government Journal*, *5*(1), 117–127. https://doi.org/https://doi.org/10.52423/pamarenda.v5i1.136

Ramadani, A. S., Yuliusman, & Friyani, R. (2025). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah , Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Dengan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderasi di OPD Kabupaten Merangin. *Journal of Innovation in Management, Accounting and Business*, *4*(3), 532–544. https://doi.org/https://doi.org/10.56916/jimab.v4i3.2573

Rangkuti, A. N., Lubis, M. S., & Samsuddin. (2022). *Modul MeTode Penelitian* (1 ed.). Perdana Publishing. https://repo.uinsyahada.ac.id/1045/1/Repo Metopel %281%29.pdf

Renanda, A. A., & Rosidin, A. (2025). Efektivitas Pelayanan Digital Dalam Mempermudah Birokrasi Dan Pengelolaan Data Publik. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, *1*(8), 1651–1657. https://doi.org/https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i8.310

Ririhena, S. W., & Richard, Y. F. (2022). Agency Relations , Accountability , and Their Relation to Local Government Public Value Creation. *International Journal of Science and Society*, *4*(3), 126–139.

Sabdosih, W. N., & Sarwono, A. edy. (2023). Analisis Faktor Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Aparat Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Kontemporer (JAKK)*, *6*(2). http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAKK/index

Safrizal. (2024). Penggunaan Teknologi Informasi Sebagai Moderasi Atas Transparansi Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Kebijakan Pembangunan dan Inovasi*, *6*(2), 110-119.

Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian* (T. Koryati (ed.)). Penerbit KBM Indonesia.

Salasa, N., Bailusy, M. N., & Amiro, S. (2024). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Soagimalaha Kecamatan Kota Maba Kabupaten Halmahera Timur. *Ekonomika45 : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, *11*(2), 540–575. https://doi.org/10.30640/ekonomika45.v11i2.2553

Sari, E. N. (2010). Konsep Anggaran Dalam Perspektif Balance Scorecard: Suatu Tinjauan Teoritis. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, *10*(2), 119–135.

Sarosa, S., & Zowghi, D. (2003). Strategy for Adopting Information Technology for SMEs : Experience in Adopting Email within an Indonesian Furniture Company. *Electronic Journal of Information Systems Evaluation*, *6*(2), 165–176.

Saskia, A., Setiawan, A. B., Anwar, S., Kelurahan, D., & Cibodas, K. (2025). Pengaruh Transparansi , Akuntabilitas Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Good Governance Pada Dana Kelurahan di Tingkat Kecamatan. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang*, *5*(1), 117–130. https://doi.org/https://doi.org/10.31933/sj5gap68

Sawir, M. (2022). Konsep Akuntabilitas Publik. In *Universitas Yapis Papua - Publikasi Jurnal*.

Setiaman, S. (2021). *Analisa Parsial Model Persamaan Struktural Dengan Software Smart-Pls Versi 3 Analisa Parsial Model Persamaan Struktural Dengan Software Smart-Pls Versi 3* (2 ed.).

Silitonga, P. D. P., Novalisa, I., Karo-karo, B. S., Program, T., Teknik, S., Katolik, U., & Thomas, S. (2021). Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Desa Pardomuan Ajibata. *Ulead: Jurnal E-Pengabdian*, *1*(1), 1–6. https://doi.org/https://doi.org/10.54367/ulead.v1i1.1304

Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, *18*(2), 93–101.

Siregar, O. K., Hasibuan, H. A., Natasi, A., & Erhan, J. (2019). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah Terhadap Kinerja Guru Di Smp Negeri 1 Tanjungbalai. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, *10*(1), 57–71.

Suciana, S., Widiastuti, C. T., & Meiriyanti, R. (2025). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dombo Dengan Good Governance Sebagai Variabel Intervening Sinta. *Balance:*

Jurnal Akuntansi dan Manajemen, *4*(2), 53–60.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kauntitatif, Kualitatif, dan R&D* (Sutopo (ed.); 2 ed.). Alfabeta.

Supartini, Abdullah, S., Kurniawati, S. B., & Maryanti, I. E. (2025). The Influence of Participation , Transparency , Accountability , and Utilization of Information Technology in the Management of Village Funds. *Journal of Social Knowledge Education (JSKE)*, *6*(4), 429–437. https://doi.org/10.37251/jske.v6i4.1964

Supit, B. F., & Lumingkewas, E. M. C. (2023). Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Kompetensi Pegawai terhadap Pengelolaan Dana Kelurahan di Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa. *Jurnal Kajian Kebijakan dan Ilmu Administrasi Negara*, *5*(1), 12–20.

Syafina, L., & Harahap, N. (2019). *Metode Penelitian Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. FEBI UIN-SU Press.

Tangdilintin, B., Walandouw, S. K., & Rundengan, F. D. P. (2025). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara. *Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting*, *2*(10), 2888–2901. https://jurnal.intekom.id/index.php/ijema

Thompson, R. L., Higgins, C. A., & Howell, J. M. (1991). Personal Computing : Toward a Conceptual Model of Utilization1. *Management Information Systems Research Center, University of Minnesota*, *15*(1), 125–143. http://www.jstor.org/stable/249443?origin=JSTOR-pdf

Umuri, H. (2019). Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pelayanan Publik Pada Kantor Camat Marisa. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, *11*(2), 105–118. https://doi.org/https://doi.org/10.52166/madani.v11i2.1603

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 53 (2008).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 1 1 (2014).

UNDP. (2006). *Governance for sustainable human development A UNDP policy document*.

Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan. (2020). Pengelolaan Dana Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Dana Kelurahan). In *Jurnal BPK Kalimantan Selatan*.

Waspada.id. (2022). *Korpus API Sumut Bertekad Terus Soroti Ratusan Miliar Dana Kelurahan Di Medan*. https://www.waspada.id/medan/korpus-api-sumut-bertekad-terus-soroti-ratusan-miliar-dana-kelurahan-di-medan

Yanti, R. D. (2020). *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Etika Kerja Islam Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur)*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Yulita, R., Apriani, N., & Fitrianingsih, S. D. (2023). Pengaruh Akuntabilitas , Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Kelurahan di Kecamatan Palu Timur The Influence of Accountability , Transparency and Community Participation on the Effectiveness of Village Financi. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *6*(12), 1975–1982. https://doi.org/10.56338/jks.v6i12.4586

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Dengan Hormat,

Berkenaan dengan penelitian Tugas Akhir saya yang berjudul **"Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Di Kecamatan Medan Timur Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel *Moderating*"**. Saya sangat membutuhkan informasi dari Bapak/Ibu untuk menyelesaikan tugas akhir ini, maka dari itu, saya mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk dapat mengisi angket ini. Informasi dan data yang diperoleh bersifat rahasia dan hanya akan dipergunakan untuk penelitian ini. Sebelum dan sesudahnya, saya mengucapkan terimakasih atas kesediaan Bapak/Ibu untuk membantu dalam pengisian angket ini.

Hormat Saya

NAURAH JACINDA SYAZWANA

1. Tata Cara Pengisian

a. Jawablah pernyataan ini sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu

b. Pilihlah jawaban dari tabel daftar pernyataan dengan memberi tanda checklist (√) pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu.

c. Jawaban Anda akan digunakan untuk tujuan penelitian dan dijamin kerahasiaannya.

Adapun makna atau kode dari pilihan jawaban tersebut disakikan sebagai berikut:

No	Kode	Makna Kode	Skor
1	SB/SM	Sangat Baik/Sangat Memadai	5
2	B/M	Baik/Memadai	4
3	CB/CM	Cukup Baik/Cukup Memadai	3
4	KB/KM	Kurang Baik/Kurang Memadai	2
5	TB/TM	Tidak Baik/Tidak Memadai	1

2. Identitas Responden

Nama Kecamatan : _____

Nama Kelurahan : _____

Jabatan di Kelurahan sebagai : _____

Jabatan di Kelurahan : ☐ Lurah ☐ Sekretaris Lurah

☐ Kepala Seksi ☐ Bendahara

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Pendidikan Terakhir : ☐ SMA/SMK ☐ S1

☐ S2 ☐ Lainnya

Lama Bekerja di Kelurahan : ☐ < 1 Tahun ☐ 1-5 Tahun

☐ 5 – 10 Tahun ☐ > 10 Tahun

Lama Bekerja di Jabatan : ☐ < 1 Tahun ☐ 1-5 Tahun

☐ 5 – 10 Tahun ☐ > 10 Tahun

3. Fasilitas Komputer/Sarana Teknologi

Jenis Perangkat	:	☐ Komputer/PC	☐ Laptop
		☐ Tidak Ada	
Umur Perangkat	:	☐ < 1 Tahun	☐ 1 - 5 Tahun
		☐ 5 – 10 Tahun	☐ > 10 Tahun
Koneksi Internet	:	☐ < 1 Tahun	☐ 1 - 5 Tahun
		☐ 5 – 10 Tahun	☐ > 10 Tahun

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA KELURAHAN (Y)

Petunjuk Pengisian:

Berikan penilaian Anda terhadap pernyataan-pernyataan berikut sesuai dengan kondisi yang ada, dengan memberi tanda checklist (√) pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu. Gunakan skala penilaian berikut:

Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup Baik (CB), Kurang Baik (KB), Tidak Baik (TB).

No	Pernyataan	SB	B	CB	KB	TB
	Penganggaran					
1	Aparatur kelurahan menyusun anggaran Dana Kelurahan berdasarkan prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat.					
2	Aparatur kelurahan menetapkan kegiatan Dana Kelurahan sesuai hasil musrenbangkel.					
	Pelaksanaan anggaran					
3	Aparatur kelurahan melaksanakan kegiatan Dana Kelurahan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.					
4	Aparatur kelurahan menggunakan Dana Kelurahan untuk kegiatan yang hasilnya dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.					
	Penatausahaan dan pertanggungjawaban					
5	Aparatur kelurahan mencatat dan melaporkan penggunaan Dana Kelurahan secara lengkap dan tepat waktu.					
6	Aparatur kelurahan menggunakan laporan pertanggungjawaban sebagai dasar evaluasi kegiatan Dana Kelurahan.					
	Pembinaan dan Pengawasan					
7	Camat memberikan pembinaan kepada kelurahan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Kelurahan.					
8	Inspektorat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Kelurahan untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan.					
	Pelaksanaan musrembangkel					

No	Pernyataan	SB	B	CB	KB	TB
9	Aparatur kelurahan merealisasikan hasil musrenbangkel sebagai dasar penyusunan program Dana Kelurahan.					
10	Aparatur kelurahan menindaklanjuti hasil musrenbangkel dalam pelaksanaan kegiatan Dana Kelurahan.					
Perlibatan Kelompok Masyarkat dan/atau organisasi kemasyarakatan						
11	Aparatur kelurahan melibatkan masyarakat dalam perencanaan kegiatan Dana Kelurahan.					
12	Aparatur kelurahan melibatkan organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan kegiatan Dana Kelurahan.					

TRANSPARANSI (X1)

Petunjuk Pengisian:

Berikan penilaian Anda terhadap pernyataan-pernyataan berikut sesuai dengan kondisi yang ada, dengan memberi tanda checklist (√) pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu. Gunakan skala penilaian berikut:

Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup Baik (CB), Kurang Baik (KB), Tidak Baik (TB).

No	Pertanyaan	SB	B	CB	KB	TB
Penyediaan informasi yang jelas mengenai prosedur, biaya, dan tanggung jawab						
1	Aparatur kelurahan menyediakan informasi mengenai prosedur penggunaan Dana Kelurahan melalui media yang mudah diakses seperti papan pengumuman/spanduk/website resmi.					
2	Aparatur kelurahan mempublikasikan rincian anggaran dan realisasi belanja Dana Kelurahan kepada masyarakat.					
Kemudahan akses informasi						
3	Pihak kelurahan menyediakan informasi mengenai rencana penggunaan Dana Kelurahan melalui media yang dapat diakses masyarakat.					
4	Pihak kelurahan memberikan akses bagi masyarakat untuk mengetahui realisasi fisik dan biaya kegiatan Dana Kelurahan.					
Sistem transparansi kebijakan anggaran						
5	Aparatur kelurahan mempublikasikan informasi mengenai alokasi anggaran Dana Kelurahan kepada masyarakat.					
6	Aparatur kelurahan mengumumkan perubahan kebijakan anggaran Dana Kelurahan kepada masyarakat.					
Ketepatan waktu dalam pelaporan pertanggungjawaban						
7	Aparatur kelurahan menyampaikan laporan penggunaan Dana Kelurahan secara terbuka kepada pihak yang berkepentingan.					
8	Aparatur kelurahan menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kelurahan kepada masyarakat pada setiap akhir semester.					

AKUNTABILITAS (X2)

Petunjuk Pengisian:

Berikan penilaian Anda terhadap pernyataan-pernyataan berikut sesuai dengan kondisi yang ada, dengan memberi tanda checklist (√) pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu. Gunakan skala penilaian berikut:

Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup Baik (CB), Kurang Baik (KB), Tidak Baik (TB).

No	Pertanyaan	SB	B	CB	KB	TB
Penghindaran penyalahgunaan jabatan						
1	Aparatur kelurahan menggunakan kewenangan pengelolaan Dana Kelurahan sesuai tugas dan tanggung jawabnya.					
2	Aparatur kelurahan melaksanakan seluruh kegiatan Dana Kelurahan murni berdasarkan rencana kerja yang telah disepakati tanpa kepentingan pribadi.					
Ketaatan terhadap hukum						
3	Aparatur kelurahan melaksanakan pengelolaan Dana Kelurahan sesuai peraturan dan perundang-undangan.					
4	Aparatur kelurahan melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan standar harga dan prosedur yang berlaku.					
Proses dan pertanggungjawaban anggaran						
5	Aparatur kelurahan menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Kelurahan secara lengkap.					
6	Aparatur kelurahan melakukan verifikasi internal terhadap laporan pertanggungjawaban sebelum diserahkan kepada pihak kecamatan.					
Pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan minim anggaran						
7	Aparatur kelurahan menindaklanjuti permohonan masyarakat terkait Dana Kelurahan sesuai prosedur yang berlaku.					

No	Pertanyaan	SB	B	CB	KB	TB
8	Aparatur kelurahan memastikan setiap rupiah Dana Kelurahan yang dibelanjakan memiliki bukti transaksi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.					
Pertimbangan tujuan dapat tercapai atau tidak dan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal						
9	Aparatur kelurahan menetapkan target capaian yang jelas pada setiap kegiatan Dana Kelurahan yang direncanakan.					
10	Aparatur kelurahan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dana Kelurahan untuk menilai pencapaian tujuan.					

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (Z)

Petunjuk Pengisian:

Berikan penilaian Anda terhadap pernyataan-pernyataan berikut sesuai dengan kondisi yang ada, dengan memberi tanda checklist (√) pada salah satu jawaban yang paling sesuai menurut Bapak/Ibu. Gunakan skala penilaian berikut:

Sangat Memadai (SM), Memadai (M), Cukup Memadai (CM), Kurang Memadai (KM), Tidak Memadai (TM).

No	Pernyataan	SM	M	CM	KM	TM
Intensitas pemanfaatan						
1	Aparatur kelurahan menggunakan teknologi informasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Dana Kelurahan.					
2	Aparatur kelurahan memanfaatkan aplikasi pengolah data seperti *Microsoft Excel, Google Sheets*, dan aplikasi sejenisnya.					
Frekuensi pemanfaatan						
3	Aparatur kelurahan menggunakan aplikasi atau sistem informasi secara rutin dalam mengelola administrasi Dana Kelurahan.					
4	Aparatur kelurahan memperbarui data kegiatan dan keuangan Dana Kelurahan ke dalam sistem informasi segera setelah adanya transaksi.					
Perangkat lunak yang digunakan						
5	Aparatur kelurahan menggunakan aplikasi resmi yang ditetapkan pemerintah daerah seperti SIPD dan aplikasi sejenis dalam pengelolaan Dana kelurahan.					
6	Aparatur kelurahan menginput dan mengolah data keuangan secara digital untuk meminimalkan kesalahan hitung manual.					

Lampiran 2 Tabulasi Data Jawaban Responden

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA KELURAHAN (Y)

No.	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12	Jumlah
1	5	5	4	5	5	4	5	4	5	4	5	5	**56**
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**60**
3	5	4	5	5	5	5	4	4	5	4	5	5	**56**
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**60**
5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	**59**
6	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	**58**
7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**60**
8	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	5	4	**55**
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**60**
10	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	**53**
11	4	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	**52**
12	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	**57**
13	4	4	5	5	4	4	5	4	5	4	5	5	**54**
14	4	4	3	4	4	3	5	4	5	4	4	3	**47**
15	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	**58**
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**48**
17	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	4	3	**53**
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**60**
19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**60**
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**48**
21	5	4	5	5	4	5	4	4	5	5	4	4	**54**
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**48**
23	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	3	**49**
24	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	**59**
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	**59**
26	5	4	5	5	4	4	4	5	4	5	5	4	**54**
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**60**
28	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	**56**
29	5	5	5	4	4	5	4	4	5	5	4	4	**54**
30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**60**
31	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**60**
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**60**
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**60**
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**60**
35	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	**51**
36	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**60**
37	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**50**
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**48**
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**48**
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**48**
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**48**
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**48**
43	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	**56**
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	**46**

TRANSPARANSI (X1)

No.	X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	Jumlah
1	5	5	4	4	5	5	4	5	**37**
2	5	5	5	5	5	5	5	5	**40**
3	4	4	4	4	4	4	5	4	**33**
4	4	4	4	4	4	4	4	4	**32**
5	5	4	4	4	4	4	5	4	**34**
6	5	4	4	5	5	5	5	4	**37**
7	5	5	5	5	5	5	5	4	**39**
8	4	4	4	4	4	4	4	4	**32**
9	5	4	4	4	5	5	4	4	**35**
10	4	4	4	3	3	3	4	3	**28**
11	4	4	4	4	4	4	4	4	**32**
12	4	4	4	4	4	4	4	4	**32**
13	4	4	4	4	4	4	4	4	**32**
14	5	4	3	3	3	3	3	3	**27**
15	4	4	5	5	5	5	5	5	**38**
16	4	4	4	4	4	4	4	4	**32**
17	3	4	3	3	4	3	5	3	**28**
18	5	5	5	5	5	5	5	5	**40**
19	5	5	5	5	5	5	5	5	**40**
20	4	4	4	4	4	4	4	4	**32**
21	5	4	5	5	4	4	4	4	**35**
22	4	3	3	4	3	3	3	3	**26**
23	3	3	3	3	3	3	4	3	**25**
24	4	4	4	4	4	4	4	4	**32**
25	3	3	3	3	3	3	4	3	**25**
26	4	4	4	4	4	4	4	4	**32**
27	5	5	5	5	5	5	5	5	**40**
28	4	4	4	5	4	4	4	5	**34**
29	5	5	4	5	4	4	5	5	**37**
30	5	5	5	4	5	4	5	5	**38**
31	4	4	4	4	5	5	5	5	**36**
32	4	4	4	4	4	4	4	4	**32**
33	4	4	4	4	4	4	4	4	**32**
34	4	4	4	4	4	4	4	4	**32**
35	4	3	3	3	3	3	4	3	**26**
36	4	4	4	4	4	4	4	4	**32**
37	4	4	4	4	4	4	4	4	**32**
38	4	3	3	3	3	3	4	3	**26**
39	4	4	4	4	4	4	4	4	**32**
40	4	4	4	4	4	4	4	4	**32**
41	4	4	4	4	4	4	4	4	**32**
42	4	4	4	4	4	4	4	4	**32**
43	4	3	3	3	3	3	4	3	**26**
44	3	3	3	3	3	3	3	3	**24**

AKUNTABILITAS (X2)

No.	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X2.7	X2.8	X2.9	X2.10	Jumlah
1	5	5	5	4	5	5	4	5	4	5	**47**
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**50**
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**50**
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**50**
5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	**49**
6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**50**
7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	**49**
8	5	5	5	5	5	5	3	5	5	4	**47**
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**50**
10	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	**48**
11	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	**42**
12	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	**49**
13	5	4	5	4	4	5	4	4	4	4	**43**
14	3	4	5	2	4	5	3	4	3	5	**38**
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**50**
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**40**
17	4	5	5	4	5	4	3	4	4	4	**42**
18	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**50**
19	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**50**
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**40**
21	5	5	4	4	4	5	4	5	4	4	**44**
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**40**
23	5	4	3	4	4	4	3	4	4	4	**39**
24	4	5	5	4	4	5	4	5	5	5	**46**
25	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**50**
26	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	**42**
27	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**50**
28	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	**48**
29	4	4	4	5	5	5	5	5	5	3	**45**
30	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**50**
31	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**50**
32	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**50**
33	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	**50**
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**40**
35	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	**45**
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**40**
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**40**
38	5	5	5	5	4	5	3	5	4	4	**45**
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**40**
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**40**
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**40**
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	**40**
43	5	4	5	5	5	5	3	5	4	4	**45**
44	5	5	5	5	4	4	3	5	4	4	**44**

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI (Z)

No.	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Jumlah
1	5	5	5	5	5	4	**29**
2	5	5	5	5	5	5	**30**
3	4	4	4	5	4	5	**26**
4	5	5	5	5	5	5	**30**
5	5	5	5	5	5	5	**30**
6	5	5	5	5	5	5	**30**
7	4	5	5	5	5	5	**29**
8	5	5	5	4	5	5	**29**
9	5	5	5	5	5	5	**30**
10	5	5	5	5	5	5	**30**
11	5	5	5	5	5	4	**29**
12	5	5	5	5	5	5	**30**
13	5	5	5	5	5	5	**30**
14	3	5	3	4	5	3	**23**
15	4	5	5	5	4	4	**27**
16	4	4	4	4	4	4	**24**
17	4	5	4	4	5	5	**27**
18	5	5	5	5	5	5	**30**
19	5	5	5	5	5	5	**30**
20	4	4	4	4	4	4	**24**
21	4	5	4	4	4	4	**25**
22	4	4	4	4	4	4	**24**
23	5	5	5	4	5	5	**29**
24	4	5	5	5	5	5	**29**
25	5	5	5	5	5	5	**30**
26	5	5	5	4	5	4	**28**
27	5	5	5	5	5	5	**30**
28	5	4	4	5	5	4	**27**
29	4	5	5	5	5	5	**29**
30	4	4	4	4	4	4	**24**
31	4	4	4	4	4	4	**24**
32	4	4	4	4	4	4	**24**
33	4	4	4	4	4	4	**24**
34	4	4	4	4	4	4	**24**
35	5	5	5	5	5	5	**30**
36	4	4	4	4	4	4	**24**
37	4	4	4	4	4	4	**24**
38	5	5	5	5	5	5	**30**
39	4	4	4	4	4	4	**24**
40	4	4	4	4	4	4	**24**
41	4	4	4	4	4	4	**24**
42	4	4	4	4	4	4	**24**
43	5	5	5	5	5	5	**30**
44	5	5	5	5	5	5	**30**

Lampiran 3 Hasil Output Pengelolaan Data SmartPLS 4

Nilai *Outer Loadings* (Validitas Konvergen)

	X1	X2	Y	Z	Z x X2	Z x X1
X1.1	0.729					
X1.2	0.890					
X1.3	0.911					
X1.4	0.878					
X1.5	0.945					
X1.6	0.930					
X1.7	0.746					
X1.8	0.912					
X2.1		0.823				
X2.2		0.831				
X2.3		0.761				
X2.4		0.782				
X2.5		0.847				
X2.6		0.798				
X2.8		0.921				
X2.9		0.867				
Y1			0.853			
Y10			0.785			
Y11			0.769			
Y12			0.770			
Y2			0.727			
Y3			0.797			
Y4			0.774			
Y5			0.841			
Y6			0.728			
Y7			0.752			
Y8			0.859			
Y9			0.754			
Z1				0.838		
Z2				0.823		
Z3				0.935		
Z4				0.870		
Z5				0.850		
Z6				0.856		
Z x X1						1.000
Z x X2					1.000	

Construct Reliability and Validity

	Cronbach's alpha	Composite reliability	Composite reliability	Average variance extracted (AVE)

		(rho_a)	(rho_c)	
X1	0.953	0.961	0.962	0.759
X2	0.935	0.943	0.946	0.689
Y	0.943	0.946	0.951	0.617
Z	0.933	0.966	0.946	0.744

Discriminant Validity

	X1	X2	Y	Z	Z x X2	Z x X1
X1						
X2	0.439					
Y	0.615	0.764				
Z	0.139	0.614	0.329			
Z x X2	0.134	0.506	0.348	0.221		
Z x X1	0.524	0.160	0.179	0.130	0.488	

R–Square

	R-square	R-square adjusted
Y	0.636	0.588

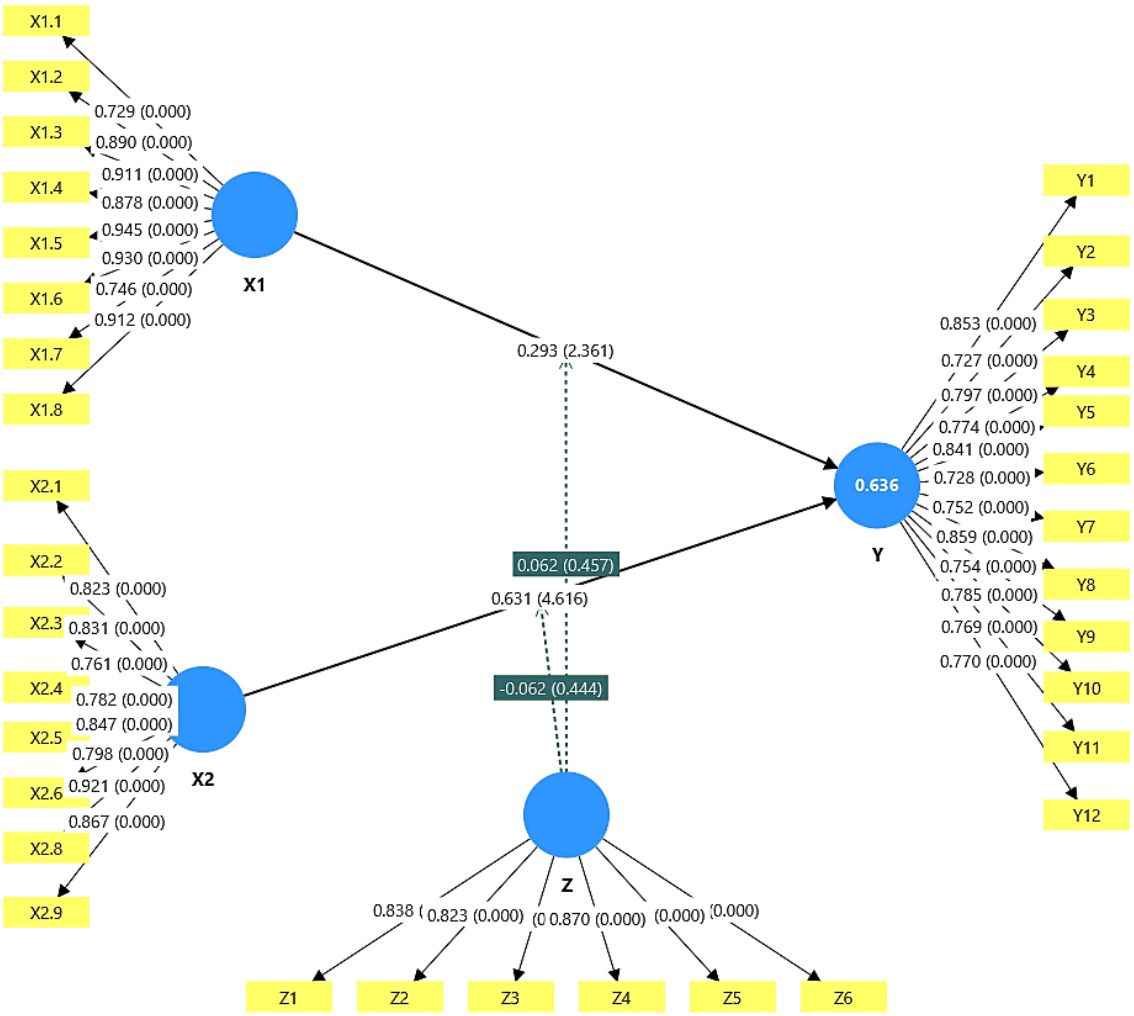
F–Square

	X1	X2	Y	Z	Z x X2	Z x X1
X1			0.112			
X2			0.422			
Y						
Z			0.013			
Z x X2			0.005			
Z x X1			0.005			

Path Coeficien

	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (|O/STDEV|)	P values
X1 -> Y	0.293	0.294	0.124	2.361	0.018
X2 -> Y	0.631	0.633	0.137	4.616	0.000
Z -> Y	-0.088	-0.083	0.098	0.902	0.367
Z x X1 -> Y	0.062	0.057	0.136	0.457	0.648
Z x X2 -> Y	-0.062	-0.044	0.139	0.444	0.657

Graphical Output Model Pengukuran dan Model Struktural



Lampiran 4 Form Pengajuan Judul

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan. Telp. 061-6624567. Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 518 /JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/21/07/2025

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 21/07/2025

Dengan hormat.
Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: NAURAH JACINDA SYAZWANA
NPM	: 2405170245P
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Judul 1: "PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DI KECAMATAN MEDAN TIMUR DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING" Identifikasi Masalah: 1. Minimnya transparansi dalam penggunaan Dana Kelurahan. a. Aksi demonstrasi LPM Kota Medan Oktober 2024 menuntut transparansi karena proses perencanaan dan pelaksanaan tidak melibatkan masyarakat dan informasi publik tidak dibuka secara maksimal. 2. Lemahnya akuntabilitas aparatur kelurahan. a. Dugaan penyimpangan oleh CV. Cevreitta Kencana di beberapa kelurahan (Durian, Sidodadi, Gang Buntu) mengindikasikan rendahnya pertanggungjawaban dalam penggunaan dana. b. Pelantikan kepala lingkungan oleh lurah/camat yang tidak sesuai Perwal menandakan kurangnya tanggung jawab dan prosedur administratif. 3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan publik. a. Berdasarkan dokumen RENSTRA Kecamatan Medan Timur, keterbatasan infrastruktur digital membuat sistem pelaporan dan pengawasan dana masih manual/semi-manual. Judul 2: "PENGARUH TRANSPARANSI DAN SISTEM PENGELOLAAN DANA KELURAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN AKUNTABILITAS SEBAGAI VARIABEL MEDIASI DI KECAMATAN MEDAN TIMUR" Identifikasi Masalah: 1. Ketidakjelasan sistem pengelolaan Dana Kelurahan a. Banyak kegiatan tidak memiliki dokumentasi dan pelaporan keuangan yang dapat ditelusuri. b. Dalam dugaan kasus CV. Cevreitta Kencana, kegiatan yang dijalankan tidak sesuai RAB, bahkan bahan pelatihan diganti dengan sembako. 2. Kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan kelurahan a. Publik sulit mengakses informasi realisasi penggunaan dana karena tidak adanya saluran komunikasi atau portal digital. 3. Akuntabilitas yang lemah sebagai penyebab kualitas

Lembaran ini dinyatakan sah jika nomor agenda sama dengan nomor agenda pada saat pengajuan judul online. Halaman ke 1 dari 2 halaman

laporan keuangan yang rendah b. Laporan yang seharusnya menjadi pertanggungjawaban tidak dibuat dengan detail dan tidak diumumkan secara publik. Judul 3: "PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DAN TRANSPARANSI TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DI KECAMATAN MEDAN TIMUR" Identifikasi Masalah: 1. Rendahnya kompetensi aparatur dalam pengawasan program a. Dugaan penyimpangan pelaksanaan pelatihan UMKM oleh CV. Cevreitta Kencana di Kelurahan Durian dan sekitarnya menunjukkan bahwa aparatur kelurahan tidak memiliki kapasitas memadai dalam memantau kegiatan yang didanai Dana Kelurahan. Hal ini menyebabkan penggunaan anggaran tidak sesuai perencanaan dan berpotensi merugikan publik. 2. Minimnya transparansi dalam proses penganggaran dan pelaporan a. Aksi unjuk rasa LPM Kota Medan pada Oktober 2024 menunjukkan adanya keluhan masyarakat terkait tidak dilibatkannya lembaga lokal serta tidak terbukanya informasi pengelolaan Dana Kelurahan. Kondisi ini menunjukkan lemahnya transparansi yang dapat menghambat akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program. 3. Pengelolaan Dana Kelurahan belum efektif a. Terjadinya konflik terkait pembangunan pagar di Kelurahan Durian dan pelantikan kepala lingkungan yang dinilai tidak sesuai aturan memperlihatkan bahwa program dan keputusan kelurahan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukkan pengelolaan dana belum tepat sasaran dan tidak berdampak maksimal.

Rencana Judul : 1. "PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA KELURAHAN DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI VARIABEL INTERVENING"
2. "PENGARUH TRANSPARANSI DAN SISTEM PENGELOLAAN DANA KELURAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN AKUNTABILITAS SEBAGAI VARIABEL MEDIASI"
3. "PENGARUH KOMPETENSI APARATUR DAN TRANSPARANSI TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA KELURAHAN"

Objek/Lokasi Penelitian : KECAMATAN MEDAN TIMUR, KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA UTARA (KELURAHAN DI WILAYAH KECAMATAN MEDAN TIMUR)

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(NAURAH JACINDA SYAZWANA)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan. Telp. 061-6624567. Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 518/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/21/07/2025

Nama Mahasiswa	: NAURAH JACINDA SYAZWANA
NPM	: 2405170245P
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Pengajuan Judul	: 21/07/2025
Nama Dosen pembimbing*)	: Dr. Eka Nurmalasari, SE, MSi
Judul Disetujui**)	: 1) Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Efektivitas pengelolaan Dana Kelurahan di Kecamatan Medan Timur dengan pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel ~~Intervening~~, Moderasi

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

(M. Shareza Hafiz, S.E., M.ACC.)

Medan, 17 Desember 2025

Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak.)

Keterangan:
*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi
**) Diisi oleh Dosen Pembimbing
setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen Pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload pengesahan Judul Skripsi"

Lampiran 5 Permohonan Izin Riset

PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

Medan, 20 Januari 2026

UMSU

Kepada Yth.
Bapak Dekan
Fakultas Ekonomi
Univ.Muhammadiyah Sumatera Utara

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalammu'alaikum Wr.Wb

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap	:	NAURAH JACINDA SYAZWANA
NPM	:	2405170245P
Tempat/Tgl Lahir	:	BANDA ACEH 20 MARET 2004
Program Studi	:	**Akuntansi**
Alamat Mahasiswa	:	JLN. PERJUANGAN SELKERA HILIR I
Tempat Penelitian:		BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA MEDAN
Alamat Penelitian	:	JLN. JEND. AHMAD YANI NO. 32 KEC. MEDAN JOHOR

Memohon kepada Bapak untuk pembuatan izin penelitian sebagai syarat untuk memperoleh data dan identifikasi masalah dari perusahaan tersebut guna pengajuan judul penelitian.
Berikut saya lampirkan syarat-syarat lain :
1. Kwitansi SPP tahap berjalan
Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenarnya, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih

Diketahui :
Ketua jurusan / Sekretaris

(M. Shareza Hafiz, S.E., M.Ak)

Wassalam
Pemohon

(Naurah Jacinda Syazwana)

Lampiran 6 Surat Izin Riset dari Prodi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://feb.umsu.ac.id feb@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 193/II.3.AU/UMSU-05/F/2026
Lampiran : -
Perihal : **Izin Pra Riset**

Medan, 01 Sya'ban 1447 H
19 Januari 2026 M

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
Jln. Jenderal Besar A.H. Nasution No. 32 Medan
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, teriring salam dan doa kami ucapkan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'fiat serta senantiasa dilindungi Allah SWT dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studi, maka dengan ini kami mohon Bapak/Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa/i kami melakukan Pra Riset di Perusahaan/Instansi yang Bapak/Ibu pimpin guna untuk penyusunan Tugas Akhir yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1).

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama	: Naurah Jacinda Syazwana
Npm	: 2405170245P
Program Studi	: Akuntansi
Semester	: III (Tiga)
Judul Tugas Akhir	: Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan di Kecamatan Medan Timur Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderating

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan

Dr. Radiman, S.E., M.Si
NIDN. **0107087801**

Tembusan :
1. Pertinggal

Lampiran 7 SK Penetapan Dosen Pembimbing

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://feb.umsu.ac.id feb@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / TUGAS AKHIR MAHASISWA
Nomor : 193/TGS/II.3.AU/UMSU-05/F/2026

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Tugas Akhir dari Ketua/Sekretaris :
Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 17 Desember 2025

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa :

Nama	: Naurah Jacinda Syazwana
N P M	: 2405170245P
Semester	: III (Tiga)
Program Studi	: Akuntansi
Judul Tugas Akhir	: Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan di Kecamatan Medan Timur Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderating
Dosen Pembimbing	: Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA

Dengan demikian di izinkan menulis Tugas Akhir dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelakasanaan Sidang Tugas Akhir harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Tugas Akhir
3. **Tugas Akhir** dinyatakan **" BATAL "** bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal **: 20 Januari 2027**
4. Revisi Judul …….

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 01 Sya'ban 1447 H
19 Januari 2026 M

Dekan

Dr. Radiman, S.E., M.Si
NIDN. **0107087801**

Tembusan :
1. Pertinggal

Lampiran 8 Surat Balasan Izin Riset dari Instansi

PEMERINTAH KOTA MEDAN
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Jalan Jenderal Besar A. H. Nasution Nomor 32 Medan Kode Pos 20143
Telepon (061) 7873439 Faksimile (061) 7873314
Laman https://brida.medan.go.id, Pos-el brida@medan.go.id

SURAT KETERANGAN PRA RISET

Nomor : 000.9.2/0390

DASAR : 1. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor : 8 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan.
2. Peraturan Walikota Medan Nomor : 97 Tahun 2022, tanggal 30 Desember 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan.

MENIMBANG : Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 193/II.3.AU/UMSU-05/F/2026 Tanggal 19 Januari 2026 Perihal Izin Pra Riset.

NAMA	:	**Naurah Jacinda Syazwana**
NIM	:	2405170245P
PROGRAM STUDI	:	Akuntansi
JUDUL	:	**"Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan di Kecamatan Medan Timur dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderating"**
LOKASI	:	Kecamatan Medan Timur Kota Medan
LAMANYA	:	2 (dua) Bulan
PENANGGUNG JAWAB	:	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Melakukan Pra Riset, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melakukan Pra Riset terlebih dahulu harus melapor kepada pimpinan Perangkat Daerah lokasi Yang ditetapkan.
2. Mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di lokasi Pra Riset .
3. Tidak dibenarkan melakukan Pra Riset atau aktivitas lain di luar lokasi yang telah ditetapkan.
4. **Hasil Pra Riset diserahkan kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah Pra Riset dalam bentuk *softcopy* atau melalui Email (brida@medan.go.id).**
5. Surat Keterangan Pra Riset dinyatakan batal apabila pemegang surat keterangan tidak mengindahkan ketentuan atau peraturan yang berlaku pada Pemerintah Kota Medan.
6. Surat Keterangan Pra Riset ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Medan
Pada Tanggal : 22 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Badan
Riset dan Inovasi Daerah,

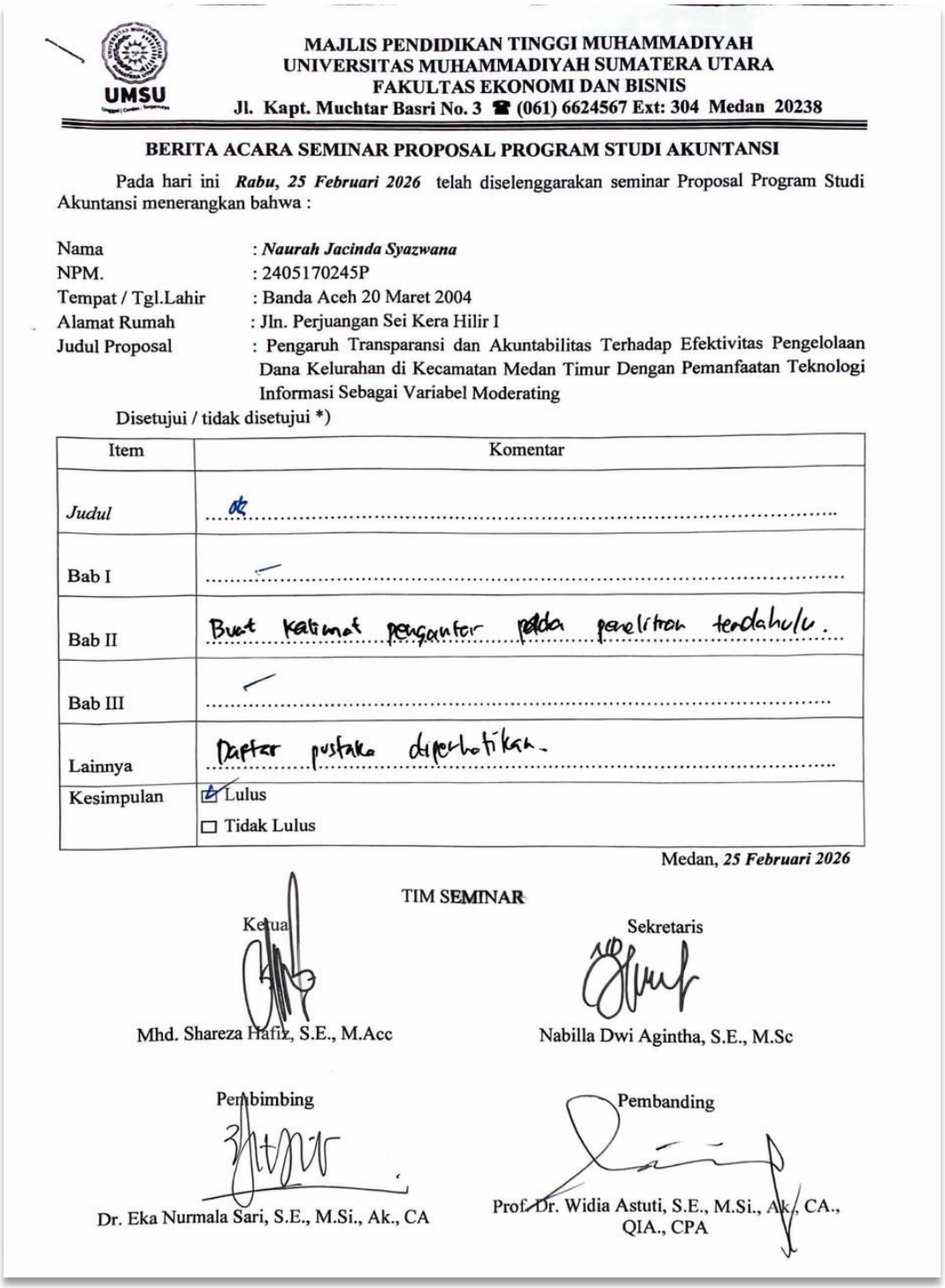
Benny Iskandar, ST, MT
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197404292000031008

Tembusan :
1. Wali Kota Medan.
2. Camat Medan Timur Kota Medan.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah."*

Lampiran 9 Berita Acara Seminar dan Pengesahan Seminar



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini ***Rabu, 25 Februari 2026*** telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama	: ***Naurah Jacinda Syazwana***
NPM.	: 2405170245P
Tempat / Tgl.Lahir	: Banda Aceh 20 Maret 2004
Alamat Rumah	: Jln. Perjuangan Sei Kera Hilir I
Judul Proposal	: Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan di Kecamatan Medan Timur Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderating

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	ok
Bab I	–
Bab II	Buat kalimat pengantar pada penelitian terdahulu.
Bab III	–
Lainnya	Daftar pustaka diperbaiki.
Kesimpulan	☑ Lulus ☐ Tidak Lulus

Medan, ***25 Februari 2026***

TIM SEMINAR

Ketua

Mhd. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc

Sekretaris

Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc

Pembimbing

Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA

Pembanding

Prof. Dr. Widia Astuti, S.E., M.Si., Ak., CA., QIA., CPA

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238

بسم الله الرحمن الرحيم

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar Proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari ***Rabu, 25 Februari 2026*** menerangkan bahwa:

Nama	: Naurah Jacinda Syazwana
NPM	: 2405170245P
Tempat / Tgl.Lahir	: Banda Aceh 20 Maret 2004
Alamat Rumah	: Jln. Perjuangan Sei Kera Hilir I
Judul Proposal	: Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan di Kecamatan Medan Timur Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderating

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi / Jurnal Ilmiah dengan pembimbing : ***Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA***

Medan, 25 Februari 2026

TIM SEMINAR

Ketua	Sekretaris
Mhd. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc	Nabilla Dwi Agintha, S.E., M.Sc
Pembimbing	Pembanding
Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA	Prof. Dr. Widia Astuti, S.E., M.Si., Ak., CA., QIA., CPA

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si
NIDN : 0118127401

Lampiran 10 Berita Acara Bimbingan Proposal

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Naurah Jacinda Syazwana
NPM : 2405170245P
Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA.
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Pengaruh Transparansi, dan Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan di Kecamatan Medan Timur Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderating

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Perbaiki sistematika penulisan, harus ada gap Research, Belum nampak, identifikasi masalah pulsan	5/1 26	
Bab 2	Teori untuk masing2 variabel perbaiki. untuk indikator 3 Referensi terengin konsepnya 5 artikel star dosen	5/1 26	
Bab 3	- Perbaiki tabel operasional variabel. - Tehnik penarik sampel tehnik analisis data blm ada	5/1 26	
Daftar Pustaka	gunakan mendeley / Status minimal 5 artikel dosen	5/1 26	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	—		
Persetujuan Seminar Proposal	—		

Medan, 19 Januari 2026

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi

(M. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc)

Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA.)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Naurah Jacinda Syazwana
NPM : 2405170245P
Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Pengaruh Transparansi, Dan Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan di Kecamatan Medan Timur Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderating

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	—		
Bab 2	—		
Bab 3	Bab 3 Buat jenis SEM PLS. pengaruh Hipotesis dibuat	19/1 26	
Daftar Pustaka	lebih lagi	19/1 26	
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	perbaiki instrumen buat variabel aktif	19/1 26	
Persetujuan Seminar Proposal	ACC lanjut seminar proposal	19/1 26	

Medan, 19 Januari 2026

Diketahui Oleh:
Ketua Program Studi

(M. Shareza Hafiz, S.E., M.Acc)

Disetujui Oleh:
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA)

Lampiran 11 Surat Selesai Riset dari Prodi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.PpjPT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

http://feb.umsu.ac.id feb@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 2644/II.3.AU/UMSU-05/F/2026
Lamp. :
H a l : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 08 Shafar 1448 H
22 Juli 2026 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
Kantor Camat Medan Timur
Jl. H.M. Said No.1, Perintis, Kec. Medan Timur, Kota Medan
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, teriring salam dan doa kami ucapkan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'fiat serta senantiasa dilindungi Allah SWT dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk ***melanjutkan Penyusunan / Penulisan Tugas Akhir pada Bab IV – V,*** dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama	: Naurah Jacinda Syazwana
N P M	: 2405170245P
Semester	: IV (Emapat)
Program Studi	: Akuntansi
Judul Tugas Akhir	: Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan Di Kecamatan Medan Timur Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderating

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan

Dr. Radiman, S.E., M.Si
NIDN. **0107087801**

Tembusan :
1. Pertinggal

Lampiran 12 Surat Selesai Riset dari Instansi

PEMERINTAH KOTA MEDAN
KECAMATAN MEDAN TIMUR
Jalan H.M. Said No. 1,Medan Timur, Medan, Sumatera Utara 20235
Telepon : (061) 4556007
Laman: medantimur.medan.go.id **Pos- el** medantimur@medan.go.id

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 070 / 628

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	FERNANDA, S.STP
Nip	:	197811241997111001
Pangkat/Gol	:	Pembina /(IV-a)
Jabatan	:	Camat Medan Timur

Menerangkan bahwa :

Nama	:	Naurah Jacinda Syazwana
NIM	:	2405170245P
Program Studi	:	Akuntansi
Judul	:	Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan di Kecamatan Medan Timur dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel Moderating

Telah melaksanakan penelitian di wilayah Kecamatan Medan Timur mulai tanggal 22 Januarai 2026 s/d 22 Maret 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Medan April 2026
Camat Medan Timur

Fernanda, S.STP
Pembina /(IV.a)
NIP 197811241997111001

Lampiran 13 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama	:	Naurah Jacinda Syazwana
NPM	:	2405170245P
Tempat dan Tanggal Lahir	:	Banda Aceh, 20 Maret 2004
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Anak Ke	:	1 dari 3 bersaudara
Alamat	:	Jl. Perjuangan Sei Kera Hilir I
No. Telephone	:	082180670117
Email	:	naurahjacinda@gmail.com

2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah	:	Sofian Yanofi. M
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil
Nama Ibu	:	Rofinawati
Pekrejaan	:	Pegawai Negeri Sipil
Alamat	:	Jl. Perjuangan Sei Kera Hilir I
No. Telephone	:	085373245646

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

Sekolah Dasar	:	SD Negeri 56, Banda Aceh
Sekolah Menengah Tingkat Pertama	:	SMP Muhammadiyah 7, Kota Medan
Sekolah Menengah Tingkat Atas	:	SMA Swasta Islam Al-Ulum Terpadu, Kota Medan
Program Diploma (III)	:	Universitas Sumetera Utara
Program Sarjana (S1)	:	Universitas Muhammadiyah Sumetera Utara

Medan, 19 Agustus 2026

Hormat saya,

(Naurah Jacinda Syazwana)

Lampiran 14 Surat Pernyataan Keaslian Tugas Akhir

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3. Medan. Telp. 061-6624567. Kode Pos 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Mahasiswa	: Naurah Jacinda Syazwana
NPM	: 2405170245P
Program Studi	: Akuntansi
Konsentrasi	: Akuntansi Sektor Publik

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir saya yang berjudul "Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Kelurahan di Kecamatan Medan Timur Dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Variabel *Moderating*" adalah bersifat asli (original), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



NAURAH JACINDA SYAZWANA